

Literasi sesungguhnya menjadi dasar dari sebuah kebijakan agar kegiatan ilmiah dosen dapat diorientasikan kepada produktivitas publikasi ilmiahnya. Dengan demikian, dosen yang ada di perguruan tinggi dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan kehidupan akademis melalui publikasi ilmiah. Perguruan tinggi sebagai corong pembangunan budaya ilmiah dalam konteks publikasi memerlukan dukungan kebijakan pimpinan perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pembangunan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat serta mampu mendorong para dosen untuk terlibat dalam kepentingan publikasi ilmiah.

Publikasi ilmiah lahir dengan adanya gagasan dan pemikiran yang dihasilkan oleh para dosen. Gagasan dan pemikiran tersebut dapat dituangkan dalam publikasi ilmiah sebagai upaya untuk mendokumentasikan gagasan dan pemikirannya yang telah dilakukan. Publikasi ilmiah merupakan produk berpikir dalam mencerminkan kiprah dan keterlibatan para dosen dalam membaca kenyataan hidup dan kehidupan dalam masyarakat. Persoalan bangsa dan rakyat coba dipikirkan, direnungkan, dikaji, dan diperdalam melalui disiplin dan multidisiplin ilmu yang dimiliki guna menghasilkan karya pemikiran berbentuk publikasi ilmiah.

Literasi merupakan sebuah kekuatan besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Literasi dapat dimaknai sebagai modal utama dalam mengembangkan dan membangun wacana keilmuan agar terjadi dinamika gagasan dan pemikiran. Karena terjadi dinamika pemikiran dan gagasan, untuk mengasah kemampuan menulis dan melakukan aktivitas ilmiah publikasi yang harus diawali dari modal literasi yang kuat.



DOSEN DAN LITERASI PUBLIKASI

DOSEN DAN LITERASI PUBLIKASI



PENULIS :

Astadi Pangarso | Ade Tutty R Rosa | Safridi | Hari Sapto Adji
Yurni Rahman | Suharyanto H. Soro | Novian Swasono Hadi
Endang Noerhartanti | Togo Cholik Mutohir | Yoyok Soesatyo
Yatim Riyanto | Soedjarwo | Moedjito | Lusy Tunik Muharlisani
Abdul Talib Bin Bon

Dosen dan literasi publikasi



IP. 063.11.2019

Model Model Pembelajaran Kontemporer

Pertama kali diterbitkan Desember 2019

Oleh **Ideas Publishing**

Alamat: Jalan Joesoef Dalie No. 110 Kota Gorontalo

Surel: infoideaspublishing@gmail.com

Anggota IKAPI, No. 0001/ikapi/gtlo/II/14

ISBN: 978-623-234-031-2

Penyunting : Abdul Rahmat, Mira Mirnawati, Eri Sarimanah

Penata Letak : Abdul Hanan Nugraha

Desain Sampul: Moh. Hasan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

Atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat satu bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memasarkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iii
Prakata	vii

DOSEN DAN LITERASI PUBLIKASI

Astadi Pangarso

PENTINGNYA LITERASI BAGI AKADEMISI.....

Falimu

**LITERASI DIGITAL DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DI ERA DISRUPSI DAN REVOLUSI
INDUSTRI 4.0**

Ade Tutty R Rosa

MANAJEMEN MUTU TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI DI ERA INDUSTRI 4.0

Prof. Dr. Hj. Siti Patimah., S.Ag., M.Pd

Safriadi

REVOLUSI PENDIDIKAN BIDANG GIZI DI ERA 4.0

Novian Swasono Hadi

PRINSIP KETERBUKAAN PADA PERUSAHAAN *GO PUBLIC* DI
INDONESIA TERKAIT PRAKTIK *INSIDER TRADING*

Hari Sapto Adjii

GENDER, PENDIDIKAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Yurni Rahman

BAHASA SELALU TERJADI DALAM KONTEKS

Suharyanto H. Soro

PENDIDIKAN *ENTREPRENEURSHIP* BERBASIS KOMPETENSI
BAHAN PANGAN ALTERNATIF SORGUM (*SORGHUM SP*)

Endang Noerhartati, Toho Cholik Mutohir, Yoyok Soesatyo, Yatim Riyanto,
Soedjarwo, Moedjito, Lusy Tunik Muharlisiani, Abdul Talib Bin Bon

URGENSI PENGETAHUAN AWAL (*PRIOR KNOWLEDGE*) PADA
PEMBELAJARAN SAINS DI SEKOLAH DASAR

Irvin Novita Arifin

MENUMBUHKAN MINAT BACA SISWA MELALUI *E-LEARNING* BERBASIS EDMODO
Zefrin

MODEL PEMBELAJARAN AKTIF TIPE *TEAM QUIZ*
Meylan Saleh

PERGURUAN TINGGI: NASIBMU KINI?
Elita Rahmi

Prakata

Segala puji bagi Allah SWT. Dialah yang telah menurunkan al-Kitab kepada hambaNya tanpa sedikit pun mengandung kesalahan. Kitab yang mampu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan ijin RabbNya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, penerima al-Kitab yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Sunnah dan sirrahnya merupakan penjelasan teoritis sekaligus aplikasi ilmiah atas al-Quran, kitab yang diturunkan kepada manusia. Tentu saja dengan tujuan agar mereka dapat memahaminya. Seperti ditegaskan Aisyah r.a., orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. “ Ahlak Rasulullah SAW. Adalah al-Quran”.

Buku ini diterbitkan atas permintaan dari berbagai pihak pengemasan materi-materi pada buku ini merupakan materi yang dipandang sesuai dengan kondisi saat ini dalam pembahasan yang lebih luas.

Buku ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu. Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangannya, dan kami terbuka terhadap kritik dan saran. Semoga buku ini berguna baik untuk pengembangan pengetahuan dan pendidikan, maupun usaha-usaha praktis yang dilakukan kalangan profesional. Insyaallah, buku ini dapat dimanfaatkan sebagai setitik air dilautan samudra.

Desember, 2019

Tim

DOSEN DAN LITERASI PUBLIKASI

Astadi Pangarso
Universitas Telkom Bandung
astadipangarso@telkomuniversity.ac.id

Sebagai dosen yang berkecimpung di dunia akademis atau pendidikan tinggi, maka publikasi hasil penelitian merupakan hal yang sangat penting. Peran publikasi hasil penelitian ini berdampak baik secara langsung bagi dosen yang bersangkutan. Dampak baik ini antara lain: mendapatkan poin nilai kum untuk kenaikan jabatan fungsional, mendapatkan kredibilitas kepakaran atas suatu ilmu/bidang/teori, mendapatkan jejaring hubungan dengan peneliti lain baik secara nasional maupun internasional. Selain itu, institusi tempat dosen mengabdikan mendapatkan kredit poin terkait dengan akreditasi baik secara nasional maupun internasional, industri/dunia praktisi mendapatkan implikasi terkait hilirisasi hasil penelitian yang terpublikasi.

Di dalam suatu penelitian, dibutuhkan literasi (literatur atau pustaka) yang merupakan bahan baku untuk mendasari suatu penelitian. Literasi ini biasanya merupakan hasil pemikiran dan penelitian dalam bentuk artikel jurnal penelitian ilmiah (nasional dan internasional), buku, prosiding, diktat dan lain-lain. Oleh karena itu, terkait literasi maka akan dijelaskan beberapa hal penting dalam hubungannya dengan publikasi penelitian sebagai berikut.

1. Sumber literasi.
2. Cara memperoleh literasi.
3. Penyusunan studi/tinjauan literasi.
4. Dukungan *software* literasi.

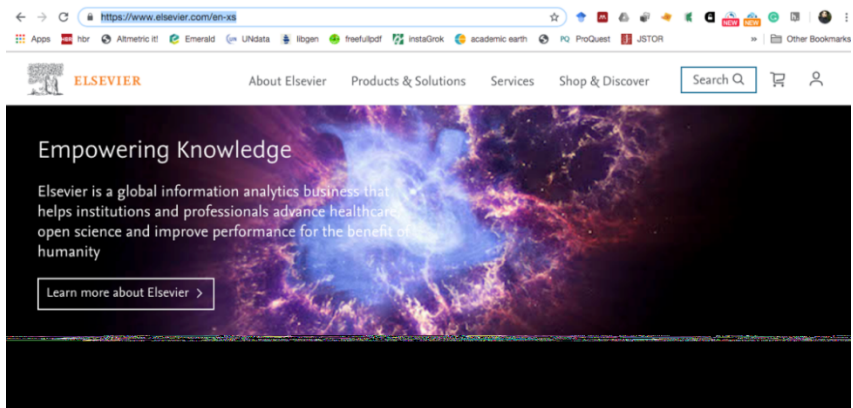


Sumber Literasi

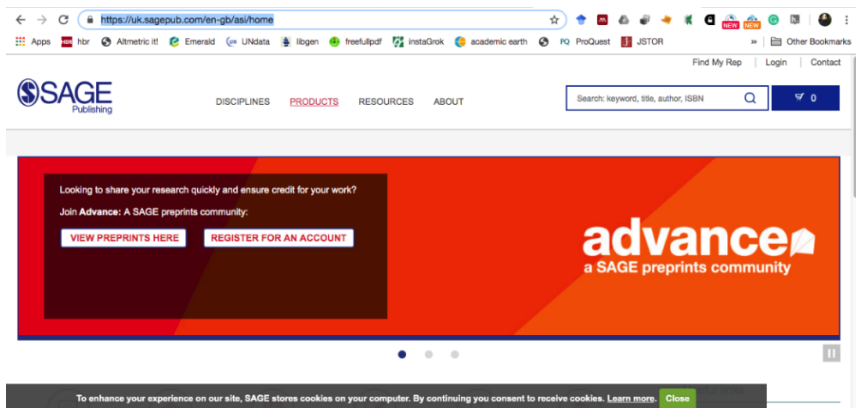
Sebagai dasar suatu penelitian, maka dibutuhkan literasi dari sumber-sumber yang berkualitas baik. Definisi literasi yang berkualitas baik ini antara lain sebagai berikut.

- I. Dari penerbit yang kredibel. Penerbit kredibel (*top 10*) antara lain:

Elsevier (<https://www.elsevier.com/en-xs>)

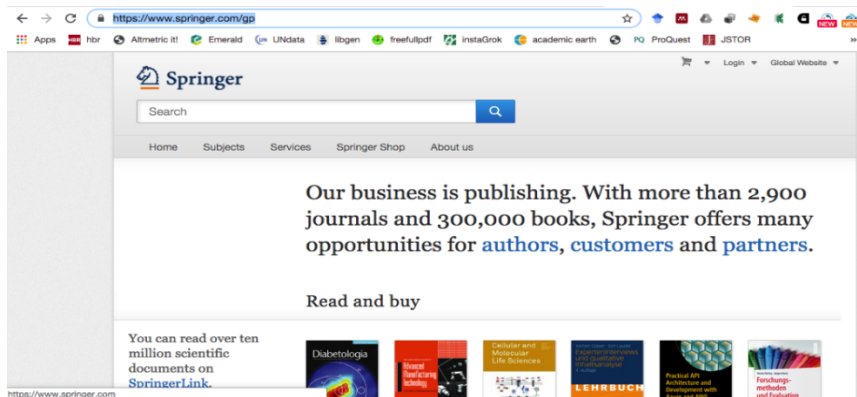


Sage (<https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/home>)

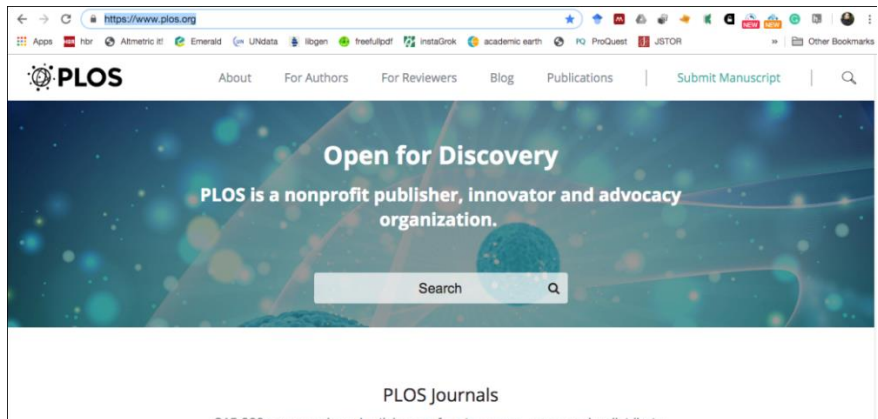


Springer (<https://www.springer.com/gp>)

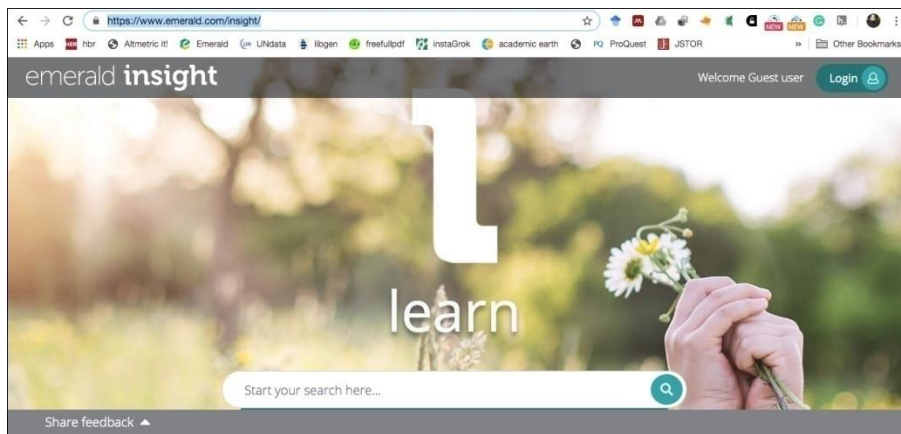




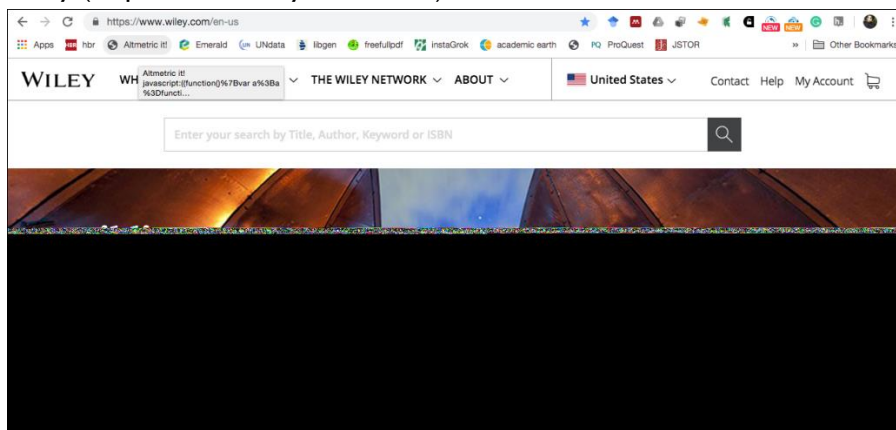
Plos (<https://www.plos.org/>)



Emerald (<https://www.emerald.com/insight/>)



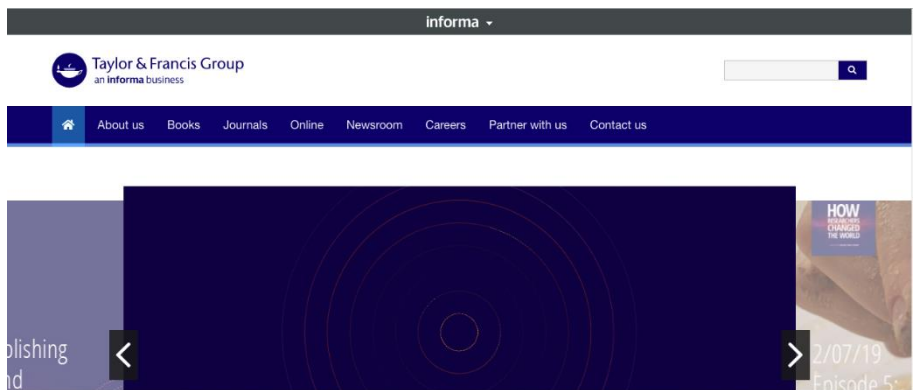
Wiley (<https://www.wiley.com/en-us>)



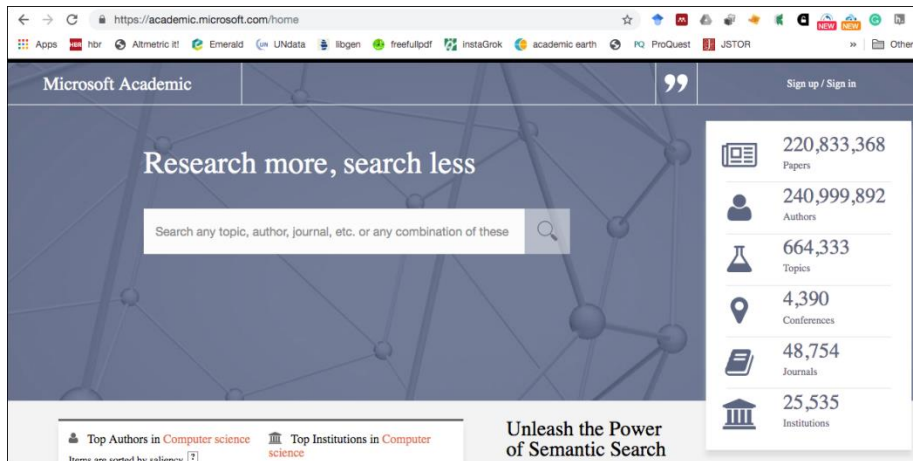
Taylor & Francis (<https://taylorandfrancis.com/>)



Literasi Publikasi



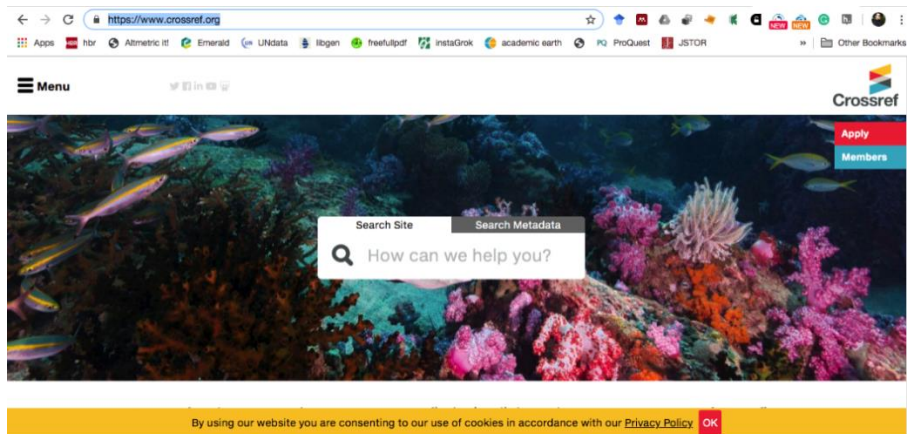
Microsoft academic (<https://academic.microsoft.com/home>)



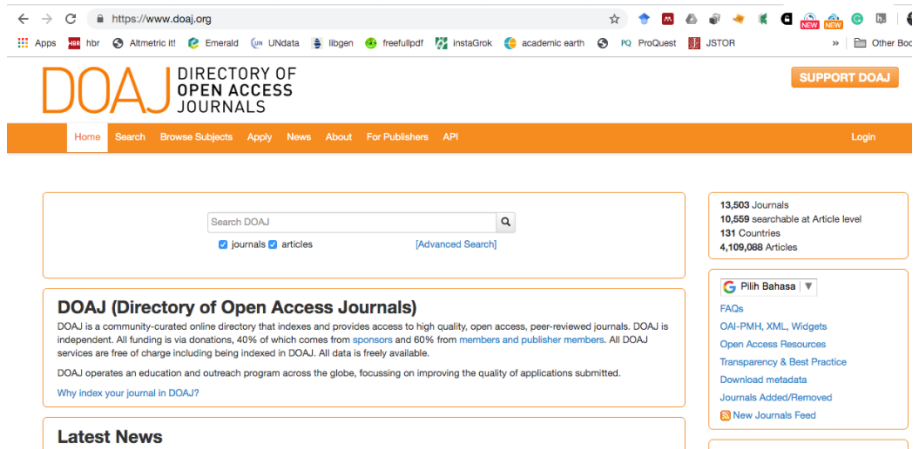
Cross Ref (<https://www.crossref.org/>)

Literasi Publikasi



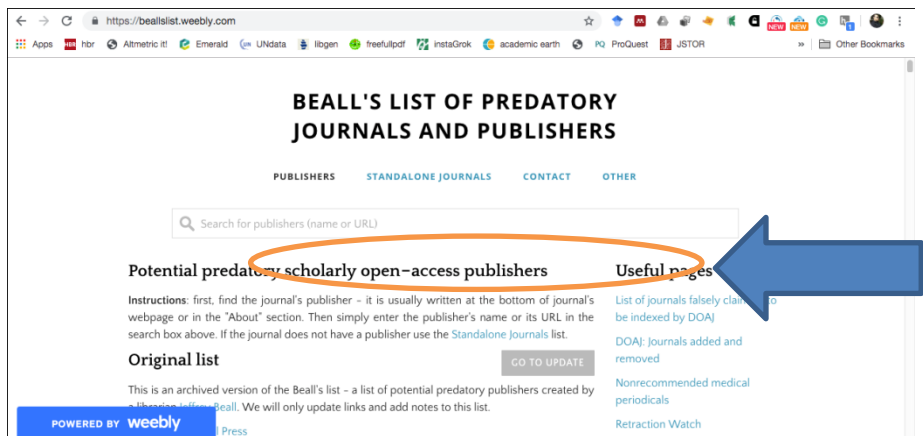


DOAJ (<https://www.doaj.org/>)



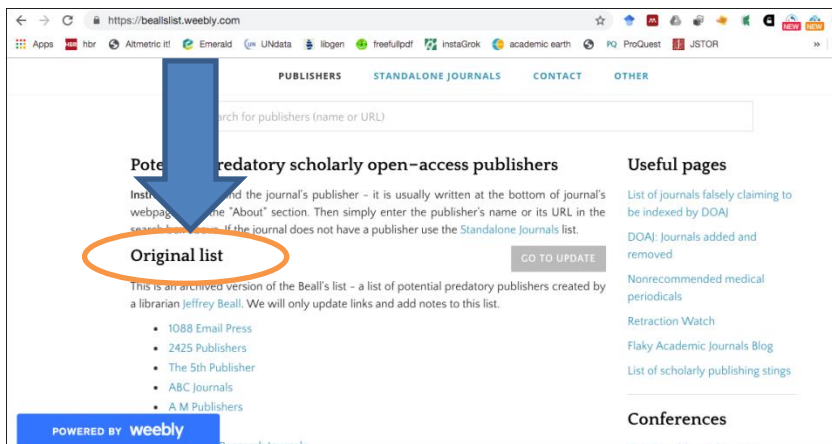
Untuk mengecek apakah suatu penerbit tersebut termasuk kategori predator/ yang diragukan kredibilitasnya, maka dapat dicek pada website: <https://beallist.weebly.com>. Cuplikan website tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:





Jika setelah kita ketik dan nama penerbit/jurnal yang kita ketik pada kotak yang sudah dilingkari dan diberi tanda anak panah tersebut muncul, maka penerbit tersebut diragukan kredibilitasnya sebagai penerbit jurnal yang berkualitas baik. Akan tetapi jika tidak muncul maka kemungkinan besar penerbit dan atau jurnal yang dimaksud masuk kategori 'aman'. Dianjurkan sebaiknya tidak menggunakan artikel dari penerbit tersebut untuk dimasukkan sebagai bagian dari penelitian.

Atau bisa juga mencari satu per satu pada website tersebut dengan urutan alfabet seperti gambar di bawah ini pada menu *original list*:



2. *Up to date* (diupayakan kurang dari 5 tahun). Ada baiknya literasi yang digunakan untuk bahan penelitian adalah yang tahun terbitnya 5 tahun terakhir dan untuk buku adalah 10 tahun terakhir.
3. Didapat dalam bentuk artikel jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan di jurnal internasional yang bereputasi. Definisi bereputasi disini adalah terindeks scopus dan/atau WoS/World of Science (ESCI, SSCI dsb). Selain itu, artikel jurnal juga dapat diperoleh dari buku yang diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi (termasuk didalamnya ke 10 penerbit jurnal top diatas).

Cara Memperoleh Literasi

Artikel jurnal internasional bereputasi dapat diperoleh dengan mengunduh (*download*) dari:

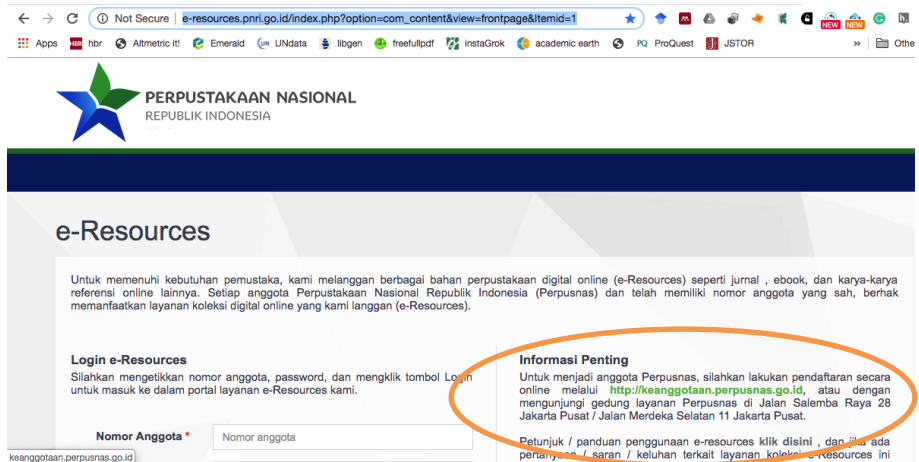
1. Google scholar: <https://scholar.google.co.id/>. Langsung diketikkan saja judul artikel atau topik yang ingin dicari pada kotak yang dilingkari.



2. Website resmi penerbit-penerbit yang kredibel (salah satunya adalah ke sepuluh penerbit yang telah disebutkan di atas). Akan tetapi terkadang ada beberapa artikel yang tidak dapat diunduh (karena tidak bebas unduh/*open access*). Oleh karena itu, solusinya adalah pada no 3, 4 & 5 selanjutnya.
3. Melalui website perpustnas: http://e-resources.pnri.go.id/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1. Untuk menggunakan fasilitas ini terlebih dahulu harus mendaftar. Untuk



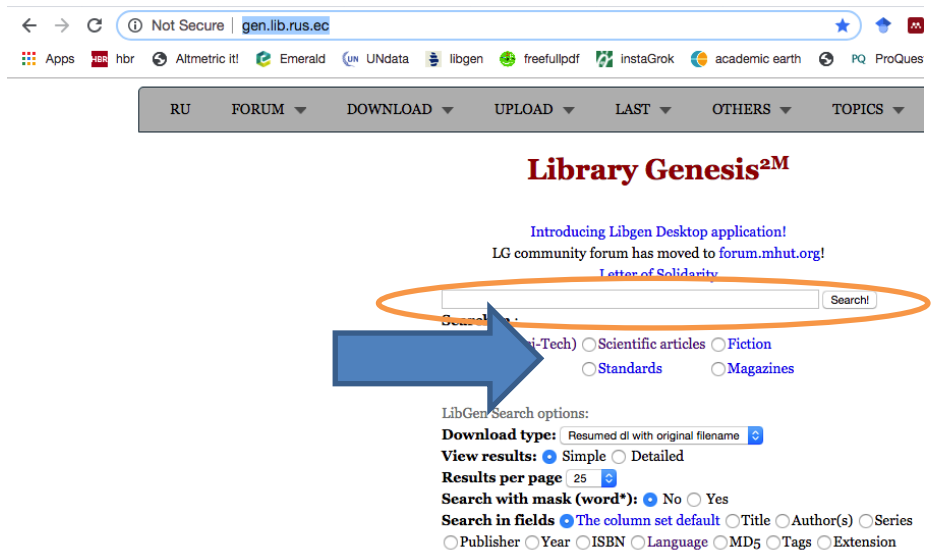
dapat mendaftar dapat dilihat pada bagian yang dilingkari dan ikuti petunjuk selanjutnya.



4. Melalui website sci-hub: <https://sci-hub.tw/>. Langsung diketikkan saja judul artikel atau topik yang ingin dicari pada kotak yang dilingkari.



5. Melalui website libgen: <http://gen.lib.rus.ec/>. Langsung diketikkan saja judul artikel atau topik yang ingin dicari pada kotak yang dilingkari.



6. Melalui teman, kerabat, saudara yang sedang studi di luar negeri yang kemungkinan mendapat akses terbuka untuk mengunduh jurnal dan ataupun buku.

Penyusunan Studi/Tinjauan Literasi

Studi literasi dalam penelitian bertujuan:

1. Menginformasikan dasar teori apa yang digunakan dalam melakukan penelitian atau teori apa yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.
2. Menginformasikan penelitian-penelitian terdahulu (yang *up to date* dari artikel jurnal ilmiah internasional bereputasi) sebanyak mungkin.
3. Menginformasikan adanya gap/celah penelitian. Celah penelitian ini merupakan hal-hal yang merupakan kekurangan atau hal-hal yang tidak selaras dengan mayoritas penelitian-penelitian terdahulu dan atau teori yang ada.
4. Menginformasikan adanya *novelty/originality*/kebaruan penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya.



Untuk menyusun studi literasi maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

1. Unduh sebanyak-banyaknya artikel dan buku yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
2. Buka artikel berbentuk pdf. Cara membaca artikel dengan cepat dan tepat adalah sebagai berikut:
 - a) Baca bagian abstrak. Jika sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan menarik lanjut poin b. Jika tidak artikel tersebut tidak perlu dibaca lebih lanjut.
 - b) Cari dan baca gambar dan/atau tabel pada bagian *literature review*.
 - c) Setelah poin a dan b, selanjutnya baca kesimpulan. Jika sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan menarik, lanjut poin d. Jika tidak artikel tersebut tidak perlu dibaca lebih lanjut.
 - d) Setelah poin c baca bagian metodologi & diskusi.
3. Buka artikel dan/atau buku berbentuk pdf. Lalu baca satu per satu artikel dan/atau buku dengan cara cepat yaitu dengan mengetik topik spesifik tentang penelitian menggunakan fitur *search*. Baca saja bagian-bagian yang *highlight* untuk mempercepat waktu.
4. Kelompokkan artikel dan buku berdasarkan bagian-bagian secara spesifik dari penelitian yang dilakukan dengan membuat folder.

Dengan keempat cara tersebut diharapkan akan didapatkan artikel yang benar-benar sesuai baik topik, konteks, teori dan/atau metodologi sehingga penelitian didasarkan pada sumber-sumber yang berkualitas baik.

Dari sumber literasi yang telah terkumpul, maka didapat ditemukan adanya celah penelitian. Celah penelitian ini biasanya dapat diketahui pada bagian kesimpulan yang memuat keterbatasan penelitian dan agenda penelitian mendatang. Celah penelitian juga secara lebih spesifik dapat ditemukan pada bagian diskusi hasil penelitian yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori yang ada dan/atau mayoritas penelitian sebelumnya.

Jika dari berbagai sumber literasi ditemukan celah-celah penelitian, maka hal ini dapat menjadi 'bahan baku' untuk munculnya

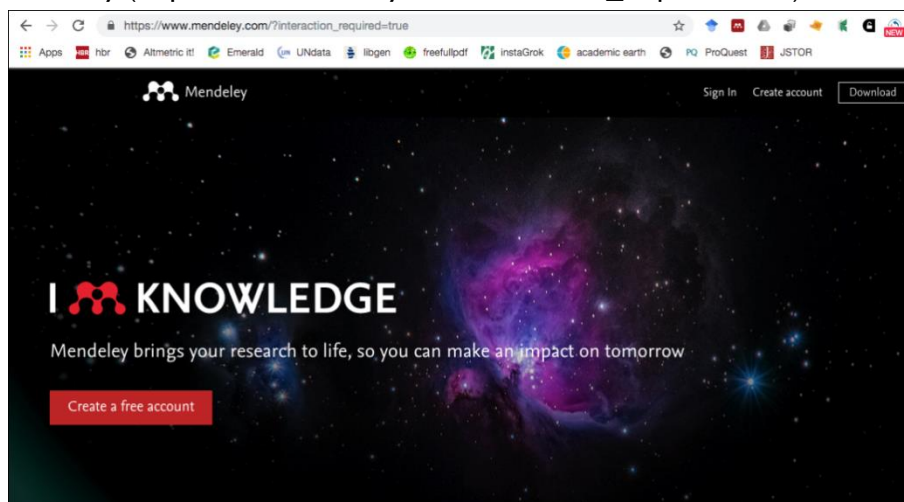


novelty/originality/kebaruan penelitian. Kebaruan penelitian ini merupakan sesuatu yang belum pernah diteliti sebelumnya. Hal ini dapat berupa munculnya hubungan pengaruh antar variabel/konsep/konstruk yang belum terhubung sebelumnya. Selain itu, hubungan ini juga dapat berupa fungsi mediasi/*intervening* dan/atau moderasi; adanya penelitian yang belum diuji secara empiris sebelumnya; adanya penelitian dalam konteks yang berbeda (lokasi, jumlah sampel, jenis penelitian yang digunakan kuantitatif atau kualitatif atau mix), dsb. Kebaruan penelitian ini yang menjadi inti dari penelitian yang selanjutnya dapat berimplikasi baik secara teoritis bagi keilmuan maupun secara praktis.

Dukungan Software Literasi

Untuk mendukung penulisan studi literasi yang lebih baik (praktis dan terkelola rapi), maka dapat digunakan *software* untuk membantu. Ada beberapa *software* yang dapat digunakan antara lain sebagai berikut.

Mendeley (https://www.mendeley.com/?interaction_required=true)



End Note (<https://endnote.com/>)




← → ↻ <https://endnote.com> ☆

Apps hbr Altmetric It Emerald UNdata libgen freefullpdf InstaGrok academic earth PQ ProQuest JSTOR

EndNote online login [Buy now](#)

Clarivate Analytics | **EndNote** Product Details Downloads Training Support Contact Sales: +1-888-418-1937



Research Smarter

With EndNote X9, you can leave behind the tedious work of formatting bibliographies, finding full text, and searching for references.

[Buy EndNote X9](#) [Learn More](#)

Our policy towards the use of cookies

All Clarivate Analytics websites use cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings through your browser.

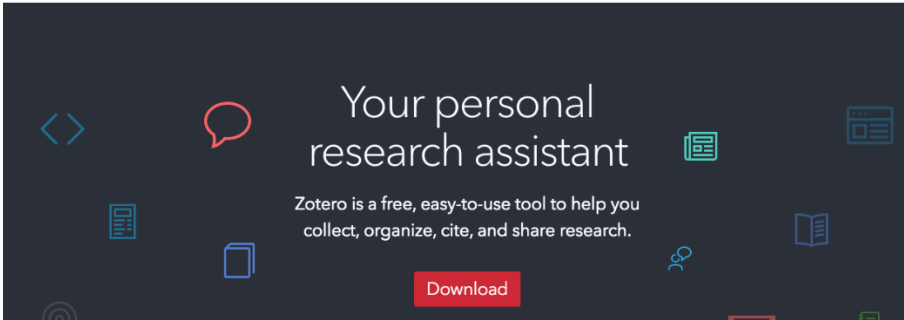
[Ok to Continue](#) [Cookie Policy](#)

Zotero (<https://www.zotero.org/>)

← → ↻ <https://www.zotero.org> ☆

Apps hbr Altmetric It Emerald UNdata libgen freefullpdf InstaGrok academic earth PQ ProQuest JSTOR

zotero Groups Documentation Forums Get Involved [Log In](#) [Upgrade Storage](#)



Your personal research assistant

Zotero is a free, easy-to-use tool to help you collect, organize, cite, and share research.

[Download](#)

PENTINGNYA LITERASI BAGI AKADEMISI

Falimu

Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai

Email: falimuimu77@gmail.com

Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 telah memberikan penekanan bahwa dosen bukan semata mengajar, namun juga harus mampu melakukan kerja penelitian dan salah satu luarannya adalah publikasi ilmiah. Dengan demikian, publikasi ilmiah di perguruan tinggi merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh tenaga pendidik untuk mampu terlibat dan melibatkan diri secara aktif dan partisipatif. Jalan untuk memperkenalkan diri dan kapasitas diri bagi seorang dosen di hadapan publik adalah dengan menulis dan berbagi pengetahuannya melalui tulisan.

Literasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari penguatan sumber daya manusia (SDM) di perguruan tinggi. Sehingga, hal ini menjadi penting untuk dilakukan. Literasi pada umumnya identik dengan aktivitas membaca dan menulis. Berdasarkan Deklarasi Praha di tahun 2003, literasi juga mencakup kemampuan seseorang berkomunikasi dalam masyarakat yang bermakna praksis untuk interaksi sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya (UNESCO, 2003).

Dengan demikian, literasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan penguatan dalam hal apapun. Semakin banyak pengetahuan yang diperoleh, diakses dan dijadikan modal dalam pengembangan diri, dapat mendorong seorang akademisi sebagai sebuah gerakan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Literasi merupakan modal utama dalam pembangunan manusia dalam konteks perguruan tinggi. Kemampuan literasi para dosen menjadi modal tersendiri bagi mereka untuk menghidupkan aktivitas dan budaya



ilmiah yang salah satu wujud programnya adalah kompetensi menulis yang disebutkan dalam publikasi ilmiah. Dalam konteks publikasi ilmiah inilah, para dosen dituntut untuk selalu memperkaya pengetahuan dalam berbagai bidang disiplin ilmu, terutama bidang disiplin ilmu yang ditekuninya.

Penyebaran budaya literasi pada hakikatnya meliputi budaya baca tulis dan publikasi. Budaya menulis dan publikasi sekarang ini menjadi tuntutan bagi seorang akademisi. Hal ini tidak bisa lepas dari budaya baca, tulis dan publikasi. Seseorang dapat dikatakan memiliki literat apabila dia mampu memahami dan membaca informasi yang tepat serta melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman terhadap isi dari bacaan yang dia baca tersebut. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi akan membuat para akademisi menjadi sadar betapa pentingnya publikasi sebagai upaya untuk diseminasi. Para dosen dan mahasiswa sebagai peneliti mulai terdorong untuk menerbitkan karyanya sehingga dapat dipahami oleh kalangan luas. Tempat untuk mempublikasikan semakin beragam, tidak hanya berbasis fisik (cetak) namun juga berbasis elektronik yang dapat dinikmati secara daring (*online*). Selain itu, cara penerbitan sebuah karya yang dilakukan oleh seorang akademisi juga lebih beragam, sehingga bukan hal yang sulit untuk menerbitkan karya ilmiahnya.

Disinilah dituntut kemampuan seorang akademisi untuk mampu bersaing dengan dunia luar, apalagi berkaitan dengan literasi publikasi. Publikasi yang diharapkan adalah publikasi yang benar-benar memiliki nilai budaya serta mengangkat tema lokal dengan *frame* global dan membuat sesuatu yang semula dipandang sederhana menjadi jauh lebih menarik. Tema-tema lokal tersebut diharapkan mampu dikoneksikan dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang lain di dunia yang lain. Kemampuan seorang penulis dalam menyambungkan tema-tema lokal menjadi tema besar inilah yang seringkali membuat tulisan menjadi menarik. Hal yang biasa dilakukan pada suatu tempat baru dengan kemasan yang lebih baik dan menarik.

Seperti yang dikemukakan oleh Finn (1993, p. 210-212) bahwa inti literasi adalah kegiatan membaca-berpikir-menulis. Disinilah kita

dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Finn tentang membaca yakni bagaimana kita mampu membaca situasi yang ada sekarang ini dan isu yang akan kita tulis di dalam sebuah karya yang akan kita publikasikan. Sementara dalam kaitannya dengan berpikir perlu dieksplisitkan. Alasannya agar berpikir lebih ditonjolkan sehingga dalam praktiknya benar-benar merupakan kegiatan yang mendapat perhatian tinggi, bukan sekadar kegiatan tempelan dalam membaca dan menulis.

Selain itu, para ahli juga menonjolkan berpikir dalam konteks kegiatan membaca dan mendengarkan seperti kegiatan membaca dan berpikir (*phrase reading and thinking activity*); serta kegiatan mendengarkan dan berpikir (*listening and thinking activity*).

Sementara Gillet (1994, p. 44) menegaskan bahwa kegiatan yang merupakan perluasan literasi akan dibutuhkan hampir semua orang di abad ke-21 dalam masyarakat berbasis pengetahuan dan teknologi. Praktik membaca dan menulis dalam kaitan ini lebih mengarah kepada membaca dan menulis untuk belajar atau *reading and writing to learn*, atau *reading, writing, and critical thinking as tools for learning* (Pappas, 1990; Enanes, 1997).

Seorang akademisi (dosen) hendaknya memiliki daftar jurnal yang terkait dengan bidang keilmuannya. Hal ini penting bagi dosen yang bersangkutan tidak hanya untuk memberikan pilihan pada jurnal mana dia memilih atau menerbitkan artikelnya, tapi juga dipaksa untuk selalu *update* terhadap isu, tema dan ide-ide terbaru yang sedang dibahas di jurnal-jurnal yang dia miliki. Dengan daftar tersebut seorang dosen akan terhindar dari jurnal-jurnal predator atau jurnal abal-abal.

Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh seorang dosen maka semakin tinggi pula kemampuan yang harus diproses dalam konteks mengolah pengetahuannya untuk menjadi sesuatu yang bermakna dalam dunia akademik yang diwujudkan dalam publikasi ilmiah sebagai tujuan akhir yang tepat. Oleh sebab itu, literasi dengan publikasi ilmiah merupakan dua hal yang saling terkait. Hal ini dikarenakan seorang dosen tidak akan pernah menghasilkan publikasi ketika tidak ada pengetahuan yang dimilikinya. Literasi selalu menjadi

landasan penting untuk memperkuat kehadiran seorang dosen dalam berpikir serta menghasilkan pemikiran dan begitu seterusnya.

Literasi sudah seharusnya menjadi modal utama untuk menambah ilmu pengetahuan yang lebih banyak agar seorang akademisi mampu menghasilkan hasil tulisan yang baik dan bermutu. Literasi perlu diletakkan sebagai modal utama bagi dosen di perguruan tinggi untuk dapat menjalankan tugas Tri Dharma perguruan tingginya, dengan luaran publikasi ilmiah. Dosen dan publikasi ilmiah merupakan manifestasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menaikkan karir akademik dosen dan meningkatkan mutu perguruan tinggi baik secara nasional maupun internasional.

Literasi di perguruan tinggi dapat menjadi penggerak bagi pengembangan atmosfer publikasi ilmiah. Literasi sesungguhnya menjadi dasar dari sebuah kebijakan agar kegiatan ilmiah dosen dapat diorientasikan kepada produktivitas publikasi ilmiahnya. Dengan demikian, dosen yang ada di perguruan tinggi dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan kehidupan akademis melalui publikasi ilmiah. Perguruan tinggi sebagai corong pembangunan budaya ilmiah dalam konteks publikasi memerlukan dukungan kebijakan pimpinan perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pembangunan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat serta mampu mendorong para dosen untuk terlibat dalam kepentingan publikasi ilmiah.

Publikasi ilmiah lahir dengan adanya gagasan dan pemikiran yang dihasilkan oleh para dosen. Gagasan dan pemikiran tersebut dapat dituangkan dalam publikasi ilmiah sebagai upaya untuk mendokumentasikan gagasan dan pemikirannya yang telah dilakukan. Publikasi ilmiah merupakan produk berpikir dalam mencerminkan kiprah dan keterlibatan para dosen dalam membaca kenyataan hidup dan kehidupan dalam masyarakat. Persoalan bangsa dan rakyat coba dipikirkan, direnungkan, dikaji, dan diperdalam melalui disiplin dan multidisiplin ilmu yang dimiliki guna menghasilkan karya pemikiran berbentuk publikasi ilmiah.

Literasi merupakan sebuah kekuatan besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Literasi dapat dimaknai sebagai modal utama dalam mengembangkan dan membangun wacana keilmuan agar terjadi dinamika gagasan dan pemikiran. Karena terjadi dinamika pemikiran dan gagasan, untuk mengasah kemampuan menulis dan melakukan aktivitas ilmiah publikasi yang harus diawali dari modal literasi yang kuat.

Menulis dan publikasi karya ilmiah diawali melalui proses literasi yang kuat. Literasi yang selanjutnya dapat diterjemahkan ke dalam makna yang praksis yaitu membaca dan menulis serta perlu dikembangkan sebagai suatu upaya untuk merawat budaya menulis untuk membangun sebuah peradaban. Kegiatan membaca dengan kemampuan menulis perlu ditradisikan secara lebih bermakna oleh para dosen agar apa yang dibahas dapat memberikan makna perubahan. Bagi para tenaga pendidik, menulis sangat penting sebagai contoh mendidik dari segi literasi (Suragangga, 2017, p. 158).

Ini berarti bahwa kemampuan literasi memberikan tempat yang sangat baik bagi upaya pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di perguruan tinggi untuk dapat memiliki daya saing di bidang gagasan dan pemikiran yang dipublikasi. Kemampuan literasi memberikan dampak luar biasa bagi keberlanjutan literasi itu sendiri. Perguruan tinggi bisa juga dikatakan sebagai laboratorium lahirnya para sarjana pemikir wajib dipandang penting untuk menjadikan literasi sebagai jalan melatih mereka berpikir kritis dan ilmiah terhadap fenomena sekitar sebagai bahan untuk dipikirkan, diperbincangkan, didiskusikan, dan diurai dalam tulisan.

Dosen dan tenaga kependidikan harus mampu menguraikan gagasan dan pemikiran dalam sebuah tulisan yang dapat menghasilkan publikasi-publikasi yang mendukung kemajuan pendidikan tinggi, menaikkan dan meningkatkan daya tawar perguruan tinggi serta dosen di bidang disiplin yang ditekuninya, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Atas dasar inilah pentingnya literasi menjadi penting dalam rangka meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah di perguruan tinggi. Literasi dapat menjadi kata kunci untuk bisa menghidupkan dinamika pengetahuan dan pemikiran di perguruan tinggi sehingga kondisi ini

sesungguhnya membuka “kran” pemahaman dan kajian yang begitu kuat.

Boeriswati (2012) mengatakan bahwa kemampuan literasi memperlihatkan kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Kemampuan literasi seseorang dalam mengakses informasi dan menggunakannya demi kepentingan tertentu menentukan arah berpikir seseorang atas pilihannya. Ini berarti bahwa kemampuan literasi memiliki hubungan sangat kuat dengan kapasitas dirinya untuk bisa menjadi orang yang berdaya dan menggunakan dayanya untuk kepentingan yang lebih baik dan untuk kepentingan publik.

Bagi mereka yang memiliki kemampuan literasi, segala hal apapun akan menjadi ladang untuk didiskusikan, dijadikan sebuah kajian, dan diharapkan bisa memberikan asas kebermanfaatan bagi semua. Berikut di bawah cara kerja literasi yang ditawarkan Boeriswati dalam memahami literasi.

1. *Identify*

Kerja mengidentifikasi adalah langkah awal seseorang untuk dapat menjumpai informasi. Mereka yang memiliki pengetahuan dan berpendidikan akan mencoba melakukan identifikasi informasi secara arif dan bijaksana. Setiap informasi yang ada akan diidentifikasi secara holistik dan komprehensif dari mana asal informasi itu.

2. *Investigate*

Kerja investigasi adalah mempertanyakan, apakah informasi yang ada itu benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kerja investigasi adalah kerja untuk menelusuri segala hal terkait informasi tersebut sehingga bisa dihubungkan antara satu hal dengan hal lain terkait informasi yang ada. Setiap orang diminta untuk mempertanyakan kebenaran informasi sebelum menjadi penting untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan dan begitu seterusnya.

3. *Choose*

Memilih informasi dari sekian banyak informasi setelah dilakukan investigasi adalah penting untuk dilakukan. Memilih informasi berarti mana yang perlu diteruskan untuk dibahas, untuk mendapatkan prioritas pembahasan, dan begitu seterusnya. Walaupun semua isu dari

informasi itu menarik untuk dibahas, ini bukan berarti bahwa itu memiliki dampak bagi kepentingan publik, memberikan efek perubahan bagi kepentingan publik, dan begitu seterusnya. Memilih isu dari sekian banyak informasi sesungguhnya merupakan kerja untuk mencermati yang dikaitkan dengan isu terkini yang masih memiliki relevansi sehingga kematangan untuk mengambil sikap terhadap sebuah keputusan tertentu menjadi penting untuk dilakukan.

4. *Set*

Mengatur jumlah informasi yang masuk demi kepentingan seleksi yang lebih ketat menjadi penting untuk diperhatikan agar tidak semua informasi masuk dalam kotak untuk dibahas.

5. *Make*

Membuat seluruh isu dari informasi dalam kotak tersebut menjadi tersusun rapi juga penting untuk dilakukan agar bisa terlihat urutan informasi yang perlu diletakkan pertama, kedua, dan begitu seterusnya. Ini mempermudah ketika masuk dalam kajian dan pembahasan.

6. *Attend*

Menghadirkan isu dari seluruh informasi yang sudah terseleksi dalam sebuah forum. Kemudian menguraikannya satu per satu agar mendapat pembahasan secara seimbang agar semua memiliki ruang yang sama dalam setiap pembahasan dan kajian.

7. *Assess*

Menilai isu dari seluruh informasi yang ada untuk diambil sejumlah isu utama sudah seharusnya menjadi penentu kemana arah kajian dan pembahasan akan dilakukan. Ini menjadi bagian dari upaya untuk meneruskan dalam pembahasan penting sebagai core isu yang perlu diangkat.

8. *Apply*

Melaksanakan adalah langkah terakhir di mana ini perlu dimaknai bahwa setelah mendapatkan isu yang sesuai kebutuhan dan kepentingan, isu tersebut perlu dibahas secara mendalam, menjadi sebuah kajian utuh dan komprehensif sehingga bisa memberikan dampak kebermanfaatan bagi semua.

Kemampuan dan budaya literasi bagi para dosen sangat dituntut untuk dapat menjalankan tugas akademiknya di bidang publikasi. Kemampuan dan budaya literasi yang baik menjadi modal dasar bagi penguatan dosen dalam bidang publikasi. Tidak akan pernah terjadi publikasi yang bermutu ketika tidak ada kemampuan dan budaya literasi yang baik.

Menulis sebagai salah satu kerja dalam berpikir yang sesungguhnya dimulai dari kemampuannya dalam mengakses informasi sampai pada kemampuan menuangkan ide tulisan. Menulis merupakan kerja ilmiah yang bisa muncul kapan saja dan dapat dijawab dengan menjadi sebuah publikasi ilmiah ketika diperkuat dan ditopang oleh kemampuan dan budaya literasi yang baik.

Semakin banyak informasi, pengetahuan dan lain sejenisnya yang memiliki korelasi dengan disiplin ilmu yang dikuasai dan dipelajarinya, akan menambah perbendaharaan informasi untuk dituangkan dalam sebuah publikasi. Literasi bukan hanya kemampuan membaca, namun juga kemampuan menulis dalam menuangkan idenya. Ketika kita berbicara budaya literasi, ini berarti bahwa dosen dituntut untuk mampu membaca dan mengetahui banyak informasi agar mereka bisa terlibat dalam penguatan pengetahuan keilmuan yang dimilikinya.

Menjadi akademisi seutuhnya adalah ketika ilmu yang diperoleh dari disiplin ilmunya selalu menjadi kontekstual dengan kehidupan nyata. Ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmunya membumi dengan kehidupan nyata dalam rangka menjawab persoalan yang nyata dan kontekstual. Ulum (2017: 21) menyebutkan bahwa membangun budaya menulis di kalangan civitas akademika memerlukan kemauan kuat dari civitas dan motivasi serta peluang dari pimpinan perguruan tinggi. Dosen yang memiliki karya ilmiah dapat difasilitasi untuk diterbitkan pada penerbit yang ber-ISBN atau pada jurnal nasional, sesuai dengan tema tulisan.

Mereka yang sudah memiliki publikasi perlu untuk terus didorong menulis dalam rangka menghidupkan publikasi ilmiah. Mereka yang sudah memiliki suasana akademis untuk publikasi perlu mendapat apresiasi demi mendorong peningkatan publikasi ilmiannya. Atmosfer

budaya literasi dosen yang mendukung terhadap publikasi ilmiah perlu diciptakan. Baiknya, atmosfer literasi membuka suasana publikasi ilmiah menjadi semakin baik.

Ariyani (2017: 168-185) menyatakan bahwa menulis merupakan sebuah keharusan baik yang diterbitkan di jurnal, laporan penelitian, maupun buku-buku ilmiah. Pendapat ini selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 17 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa kenaikan jenjang jabatan akademik dosen mewajibkan untuk publikasi pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi di bidangnya.

Menulis juga merupakan upaya dan kerja mulia demi kepentingan transformasi dan penyebaran ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam temuan Ariyani, ada lima faktor utama yang menyebabkan dosen tidak aktif dan produktif menulis.

1. Rendahnya motivasi dosen dalam menulis.
2. Ketidaktahuan cara menulis karya ilmiah dengan baik.
3. Honorium/insentif yang diterima sangat kecil sehingga ini menyebabkan dosen lebih tertarik mengajar atau mengerjakan kegiatan lain yang tidak memiliki hubungan dengan peningkatan akademik dan penguatan kapasitas diri seorang dosen dengan tiga pokoknya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Tidak adanya waktu menulis karena beban mengajar yang padat.
5. Tidak adanya perhatian dari lembaga perguruan tinggi dalam konteks pemberian apresiasi.

Kelima temuan permasalahan tersebut perlu diselesaikan. Jalannya adalah melalui adanya budaya literasi yang mendukung terhadap karir dosen di bidang publikasi ilmiah.

Daftar Pustaka

Boeriswati. (2012). The Implementing Model of Empowering Eight for Information Literacy. *US-China Education Review*, 7: 650-661.



Diakses dari <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED535495.pdf>, pada 3 Juli 2019.

Kebijakan Literasi Untuk Meningkatkan Produktivitas Publikasi di Perguruan Tinggi Moh. Yamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Brigjen H. Hasan Basry Kayu Tangi, Banjarmasin.

Pengembangan Model Pusat Kajian Literasi guna Meningkatkan Budaya Membaca Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. The 1 st International Conference on Language, Literature and Teaching (ICoLLiT). 898-906. Diakses dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/8944>.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.

Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. Rika Ariyani (2017).

Siroj, M.B. (2017). Membangun Budaya Menulis untuk Mewujudkan Dosen Profesional. *Prosiding Seminar Nasional Budaya Literasi*. 168-189. Diakses dari <https://staimaarif-jambi.ac.id/2018/01/25/proceeding-seminar-nasionalbudaya-literasi/>.

Suragangga, M.N. (2017). Mendidik Lewat Literasi untuk Pendidikan Berkualitas. *Jurnal Penjaminan Mutu*, (3)2: 154-163.

Surat Edaran No. 152 /E/T/2012 tentang Kewajiban Publikasi Ilmiah bagi S1, S2, dan S3 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Ulum, B. (2017). Membudayakan Menulis Sebagai Kebutuhan Civitas Akademika. *Proceeding Seminar Nasional Budaya Literasi, Jambi 24 September 2017* (pp. 12-21). Diakses dari <https://staimaarif-jambi.ac.id/2018/01/25/proceeding-seminar-nasional-budayaliterasi/>.

Wibowo, E.D.E. (2011). Kebijakan Mutu Akademik Pendidikan Tinggi. *Dinamika Sains*, (9): 20. Diakses dari <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/view/8>.



LITERASI DIGITAL DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI ERA DISRUPSI DAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Ade Tutty R Rosa

Universitas Islam Nusantara Bandung
rosaatrxdov@gmail.com

Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini, penguasaan teknologi menjadi *prestise* dan indikator kemajuan suatu negara. Negara dikatakan maju jika memiliki tingkat penguasaan teknologi tinggi (*high technology*). Sedangkan negara-negara yang tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi sering disebut sebagai negara gagal (*failed country*). Perkembangan yang ditandai dinamisnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak dampak, diantaranya revolusi industri, revolusi Meiji.

Keberhasilan dunia yang berubah sangat pesat sangat ditentukan oleh kemampuan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sepanjang hidup. Sistem pendidikan perlu meletakkan landasan yang kuat untuk memenuhi semua itu dengan cara memacu pengetahuan dan keterampilan serta memperkuat kapasitas dan motivasi generasi muda (*young generation*) untuk terus belajar setelah lulus.

Banyak negara memantau pembelajaran siswanya agar mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan tersebut. Asesmen dan evaluasi disertai dengan insentif yang tepat dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih baik, memotivasi guru untuk mengajar secara lebih efektif, dan memotivasi sekolah menjadi lingkungan lebih mendukung dan lebih produktif menjadi tugas manajemen pendidikan ke depan.

Sumaatmadja mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan multidisiplin, interdisiplin serta *cross dicipline* pengetahuan (Syamsuar dan Reflianto, 2012). Hal ini berarti bahwa pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas. Untuk itulah sampai saat ini kajian tentang manajemen pendidikan masih terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informatika yang sangat pesat di era teknologi industri ke-4 ini.

Secara sosiologis, teknologi memiliki makna yang lebih mendalam daripada peralatan. Teknologi menetapkan suatu kerangka bagi kebudayaan non material suatu kelompok. Jika teknologi suatu kelompok mengalami perubahan, maka cara berpikir manusia juga akan mengalami perubahan. Hal ini juga berdampak pada cara mereka berhubungan dengan yang lain. Dalam pandangan materialisme historis, teknologi hanya menunjuk pada sejumlah alat yang dapat dipakai manusia untuk mencapai kesejahteraan. Perindustrian dan manufaktur dunia bersiap menghadapi revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan integrasi yang kuat terjadi antara dunia digital dengan produksi industri. Revolusi industri 4.0 merupakan era digital ketika semua mesin terhubung melalui sistem internet atau *cyber system*.

Perkembangan Teknologi dalam Dunia Pendidikan

Perkembangan teknologi berkembang pesat. Dunia kini memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang mendorong perkembangan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan lainnya, yang dikenal sebagai *disruptive innovation*. Mengutip hasil penelitian dari McKinsey (2016) bahwa dampak dari *digital technology* menuju revolusi industri 4.0 dalam lima tahun kedepan akan ada 52,6 juta jenis pekerjaan akan mengalami pergeseran atau hilang dari muka bumi. Hasil penelitian ini memberikan pesan bahwa setiap diri yang masih ingin mempunyai eksistensi diri dalam kompetisi global harus mempersiapkan mental dan *skill* yang mempunyai keunggulan persaingan (*competitive advantage*) dari orang lain. Jalan utama dalam mempersiapkan *skill* yang paling mudah ditempuh adalah mempunyai perilaku yang baik (*behavioral attitude*), menaikkan kompetensi diri dan memiliki semangat literasi. Bekal persiapan diri tersebut dapat dilalui

dengan jalur pendidikan (*long life education*) dan konsep diri melalui pengalaman bekerjasama lintas generasi/ lintas disiplin ilmu (*experience is the best teacher*).

Revolusi industri ini dicirikan oleh perpaduan teknologi yang menggabungkan garis antara bidang fisik, digital, dan biologis. Ada tiga alasan mengapa transformasi Revolusi Industri 4.0 berbeda, yakni kecepatan, cakupan, dampak sistem. Kecepatan terobosan saat ini tidak memiliki preseden historis, berkembang pada kecepatan yang eksponensial daripada linear. Perubahan ini menandai transformasi seluruh sistem produksi, manajemen, dan tata kelola. Revolusi Industri 4.0 memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat pendapatan global dan meningkatkan kualitas hidup populasi di seluruh dunia.

Pada era revolusi industri 4.0 semua mesin dihubungkan dengan yang lain, bertumpu pada *cyber physical system* yang akan mengubah secara radikal cara manusia berkehidupan, bekerja, dan berkomunikasi. Inovasi yang dihasilkan untuk membuat kehidupan lebih nyaman tidak terbatas, tetapi tantangan yang harus dipecahkan juga sangat kompleks.

Pekerjaan yang ada saat ini perlahan akan hilang pada 10 tahun ke depan. Diperkirakan 35% keterampilan dasar akan berubah pada tahun 2020 dan hampir 2 miliar pekerja berisiko kehilangan pekerjaan mereka. Bagi Indonesia, tantangan ini perlu diubah menjadi peluang. Untuk itu, menurut Trilling dan Fadel pembelajaran pada pendidikan harus mengembangkan keterampilan Abad XXI agar menghasilkan lulusan yang “*innovative, inventive, self-motivated and self-directed, creative problem solvers to confront increasingly complex global problem*” (Kemendikbud, 2016).

DIGITAL LITERASI

Era Digital dan Inovasi Pembelajaran Berbasis Teknologi

Revolusi industri jilid empat memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat pendapatan global dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat dunia. Era digital merupakan terminologi bagi masa yang segala sesuatunya dihidupkan dengan teknologi. Penggunaan internet yang masif menjadi energi terbesar dari kehidupan di era ini.

Internet membuat semua informasi di dunia ini menjadi sangat mudah didapatkan, bahkan dalam hitungan detik.

Bila ingin bersaing di era digital ini, Indonesia perlu segera meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui pendidikan. Hal ini agar manusia Indonesia mampu menjadi menjadi operator dan analis handal sebagai pendorong industri mencapai daya saing produktivitas tinggi melalui pemanfaatan implementasi teknologi digital dan komputasi kedalam industri. Hal yang mendasari revolusi digital adalah perkembangan komputer elektronik digital, yaitu komputer pribadi, khususnya mikroprosesor dengan kinerjanya yang terus meningkat. Ini memungkinkan teknologi komputer untuk tertanam ke berbagai objek besar dari kamera ke pemutar musik pribadi. Hal yang sama pentingnya adalah pengembangan teknologi transmisi termasuk jaringan komputer, internet dan penyiaran digital.

Freud Pervical dan Henry Ellington menyatakan inovasi pembelajaran yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan sarana teknologi informasi yang berkembang pesat di era revolusi industri 4.0 ini untuk meningkatkan mutu pembelajaran (Syamsuar dan Reflianto, 2016). Selanjutnya Reigeluth (2011) mengartikan bahwa inovasi pendidikan dalam metode pembelajaran mencakup rumusan tentang pengorganisasian bahan ajar, strategi penyampaian dan pengelolaan kegiatan dengan memperhatikan tujuan, hambatan, dan karakteristik peserta didik sehingga diperoleh hasil yang efektif, efisien, dan menimbulkan daya tarik pembelajaran.

Berbagai pendapat di atas, menunjukkan bahwa inovasi pembelajaran memungkinkan peserta didik memperoleh kemudahan dalam rangka mempelajari bahan ajar yang disampaikan oleh guru, tentunya dengan memanfaatkan media teknologi informasi. Ketepatan dalam melakukan inovasi pendidikan sangatlah berpeluang bagi terciptanya kondisi pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan sehingga kegiatan pembelajaran (*instructional activities*) dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dalam konteks kondisi pembelajaran yang menyenangkan Davies (2011) menegaskan bahwa

suatu kegiatan pembelajaran tidak selalu menjamin peserta didik akan dapat belajar. Hal ini menunjukkan bahwa sebaik apapun seorang guru dalam merancang, mendesain suatu program pembelajaran, tidak akan dapat secara optimal mewujudkan ketercapaian kompetensi yang diharapkan apabila tidak didukung oleh pemilihan sekaligus penggunaan metode secara tepat. Untuk itu peranan sekaligus tantangan bagi masyarakat digital di era revolusi industri 4.0 adalah membangun pendidikan berbasis teknologi informasi yang mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat era revolusi industri 4.0 ini.

Perangkat Digital dan Internet dalam Perspektif Budaya Masyarakat

Teknologi memperlihatkan fenomenanya dalam masyarakat sebagai hal impersonal memiliki otonomi mengubah setiap bidang kehidupan manusia menjadi lingkup teknis. Sastrapratedja (Dwiningrum, 2012, p.154) menjelaskan bahwa “fenomena teknik pada masyarakat kini, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. (1) Rasionalitas, artinya tindakan spontan oleh teknik diubah menjadi tindakan yang direncanakan dengan perhitungan rasional. (2) *Artifisialitas*, artinya selalu membuat sesuatu yang buatan tidak alamiah. (3) *Otomatisme*, artinya dalam hal metode, organisasi, dan rumusan dilaksanakan serba otomatis. Demikian pula dengan teknik mampu mengeliminasi kegiatan non-teknis menjadi kegiatan teknis. (4) Teknik berkembang pada suatu kebudayaan Monisme, artinya semua teknik bersatu, saling berinteraksi dan saling bergantung. (5) Universalisme, artinya teknik melampaui batas-batas kebudayaan dan ideologi, bahkan dapat menguasai kebudayaan. (6) Otonomi, artinya teknik berkembang menurut prinsip-prinsip sendiri.

Teknologi merupakan hasil olah pikir manusia yang pada akhirnya digunakan manusia untuk mewujudkan berbagai tujuan hidupnya, teknologi menjadi sebuah instrumen untuk mencapai tujuan. Teknologi juga merupakan hasil perkembangan budaya rasionalitas manusia. Ketika keberadaan teknologi dikembangkan dalam struktur tindakan manusia, maka keberadaan teknologi juga dapat ditempatkan dalam

kerangka perkembangan rasionalitas manusia tersebut. Ketika manusia masih berada pada tahap *irasional* (bersifat tradisional dan afektif), manusia telah mampu menghasilkan berbagai teknologi yang masih sederhana. Seiring dengan perkembangan rasionalitasnya, manusia telah menghasilkan berbagai teknologi yang cukup rumit, namun pada akhirnya keberadaan teknologi tersebut dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup manusia. Teknologi telah mempengaruhi pola pikir manusia itu sendiri dan akibatnya secara tidak langsung teknologi juga sangat mempengaruhi tindakan dan pola hidup manusia. Teknologi juga dimaknai sebagai alat yang memperlebar perbedaan kelas dalam masyarakat. Teknologi menjadi simbol status bagi si kaya dan si miskin. Siapa yang mampu menguasai teknologi, maka ia akan mampu menguasai manusia yang lain. Manusia menggunakan konsep teknologi baru untuk menunjuk pada timbulnya suatu teknologi yang membawa dampak penting pada kehidupan sosial.

Teori Perubahan Sosial Budaya di Masyarakat Digital

Menurut Soekanto (1990, p. 332-337) para sosiolog dan antropolog mempunyai pendapat yang berbeda mengenai perubahan sosial diantaranya sebagai berikut..

1. Gillin dan Gillin, mengartikan perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, dan ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.
2. Larson dan Rogers, mengemukakan pengertian tentang perubahan sosial yang dikaitkan dengan adopsi teknologi yaitu suatu proses yang berkesinambungan dalam suatu bentangan waktu tertentu. Penggunaan teknologi tertentu oleh suatu warga masyarakat akan membawa suatu perubahan sosial yang dapat diobservasi melalui perilaku anggota masyarakat yang bersangkutan.
3. Soerjono Soekanto mendefinisikan perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi oleh sistem sosialnya. Menurut

Martono (2012, p.13) Gejala-gejala yang dapat mengakibatkan perubahan sosial memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. (1) Setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan baik lambat maupun cepat. (2) Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. (3) Perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang bersifat sementara sebagai proses penyesuaian diri. (4) Perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual karena keduanya memiliki hubungan timbal balik yang kuat.

Dari definisi perubahan di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial budaya merupakan suatu perubahan yang menyangkut banyak aspek dalam kehidupan seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, aturan-aturan hidup berorganisasi, filsafat. Jadi, teknologi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya perubahan sosial budaya. Perubahan sosial mempunyai tiga dimensi, yaitu struktural, kultural, dan interaksional.

Pertama, dimensi struktural mengacu pada perubahan-perubahan dalam bentuk struktur masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial dan perubahan dalam lembaga sosial.

Kedua, dimensi kultural mengacu pada perubahan kebudayaan dalam masyarakat. Perubahan ini meliputi beberapa hal berikut. (1) *Inovasi kebudayaan*, merupakan komponen internal dalam suatu masyarakat. Inovasi kebudayaan yang paling mudah ditemukan adalah munculnya teknologi baru. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks memaksa individu untuk berpikir kreatif dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. (2) *Difusi*, merupakan komponen eksternal yang mampu menggerakkan terjadinya perubahan sosial. Sebuah kebudayaan mendapatkan pengaruh dari budaya lain, kemudian memicu perubahan kebudayaan dalam masyarakat yang “menerima” unsur-unsur budaya tersebut. (3) *Integrasi*, merupakan perubahan budaya yang “relatif lebih halus”. Hal ini disebabkan dalam proses ini terjadi penyatuan unsur-unsur kebudayaan saling bertemu untuk

kemudian memunculkan kebudayaan baru sebagai hasil penyatuan berbagai unsur-unsur budaya tersebut (Martono, 2012, p.6).

Ketiga, dimensi interaksional mengacu pada adanya perubahan hubungan sosial dalam masyarakat. Dimensi ini meliputi hal-hal berikut. (1) Perubahan dalam frekuensi. Perkembangan teknologi telah menyebabkan berkurangnya frekuensi individu untuk saling bertatap muka. Semua kebutuhan untuk berinteraksi dapat dipenuhi dengan memanfaatkan teknologi. (2) Perubahan dalam jarak sosial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menggeser fungsi “tatap muka” dalam proses interaksi. (3) Perubahan perantara. Mekanisme kerja individu dalam masyarakat modern banyak bersifat serba “online”, menyebabkan individu tidak banyak membutuhkan “orang lain” dalam proses pengiriman informasi. (4) Perubahan dari aturan atau pola-pola. Banyak aturan serta pola-pola hubungan yang mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat. (5) Perubahan dalam bentuk interaksi. Perubahan sosial terbagi atas dua wujud, yakni perubahan dalam arti kemajuan (*progress*) atau menguntungkan dan perubahan dalam arti kemunduran (*regress*) yaitu membawa pengaruh kurang menguntungkan bagi masyarakat. Jika perubahan sosial dapat bergerak ke arah suatu kemajuan, masyarakat akan berkembang. Sebaliknya, perubahan sosial juga dapat menyebabkan kehidupan masyarakat mengalami kemunduran. Kemajuan teknologi di satu sisi merupakan contoh perubahan sosial bersifat kemajuan karena mempermudah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, di sisi lain kemajuan teknologi juga merupakan contoh perubahan sosial bersifat kemunduran karena manusia menjadi tergantung dengan teknologi (budak teknologi). Bukan manusia menguasai teknologi tetapi teknologi menguasai manusia.

Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi di Era Revolusi Industri 4.0

Pendidikan umum berupaya secara bermakna dan berkesinambungan menghasilkan SDM yang bermoral bagi semua



konteks kehidupan dalam suasana dan kondisi apapun (Sumatmadja, 2002).

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini bukan lagi menjadi kelanjutan untuk revolusi industri ketiga, melainkan menjadi gerbang untuk datangnya revolusi industri 4.0. Davis (World Economic Forum, 2016) mengartikan industri 4.0 ini sebagai *cyberphysical systems* yang berarti teknologi bukan lagi menjadi ‘alat’ melainkan tertanam pada kehidupan masyarakat. *Artificial Intelligence*, *nanotechnology*, *biotechnology*, *autonomous vehicles* dan 3D printing merupakan contoh semakin luasnya perkembangan teknologi saat ini. Kecepatan, jangkauan/cakupan, dan dampak merupakan tiga alasan yang menjelaskan bahwa transformasi teknologi saat ini bukan perpanjangan dari revolusi industri ketiga, melainkan kedatangan Revolusi Industri 4.0.

Tantangan dunia pendidikan dalam menghadapi industri 4.0 adalah penanaman nilai-nilai pendidikan yang perlu dikembangkan. Menurut Guilford (1985) penerapan dari pendidikan nilai yang dikembangkan adalah sebagai berikut. (1) Anak didik dan dilatih dengan cara bekerja sambil belajar. Kecerdasan berfikir anak dikembangkan dengan seluas-luasnya. (2) memupuk kepribadian anak dengan kepribadian Indonesia sehingga menjadi pribadi yang dinamis, percaya diri, berani, bertanggung jawab dan mandiri. (3) Pelajaran tidak hanya diberikan pada jam pelajaran saja, tetapi juga dalam setiap kesempatan di luar jam sekolah; dan (4) Contoh perbuatan baik diterapkan karena lebih berhasil dalam membina watak yang baik, hal inilah yang membedakan manusia dengan mesin di era globalisasi industri 4.0.

Pendidikan nilai pada dasarnya lebih ditujukan untuk memperbaiki moral bangsa. Pendidikan nilai mengajarkan generasi muda tentang *value* dan moral yang seharusnya dimiliki. Melalui pembelajaran berbasis nilai diharapkan siswa dapat menentukan nilai baik dan buruk dalam kehidupan sehingga dapat memilih nilai yang baik untuk peningkatan kualitas hidupnya di dalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya, semakin pesatnya arus teknologi justru para siswa

semakin terlena dan memiliki sikap yang enggan bertanggung jawab, degradasi moral dan banyak melakukan tindak kejahatan. Dengan adanya aplikasi media sosial yang mempermudah dalam mengakses informasi dan komunikasi mengakibatkan menjamurnya kejahatan di media *online*. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan nilai dan tantangan bagi pendidik untuk menguatkan karakter moral siswa agar tidak terjerumus dan terlena dengan pesatnya teknologi industri 4.0. Kohlberg (2005) menyatakan bahwa pendidikan moral merupakan suatu upaya membantu peserta didik dalam menuju satu tahap perkembangan sesuai dengan kesiapan mereka. Peranan guru adalah memperkenalkan peserta didiknya dengan berbagai masalah konflik moral yang realistik. Dilema-dilema moral sudah cukup untuk menggerakkan perkembangan moral untuk membantu peserta didik menyikapi isi nilai. Untuk meningkatkan keberhasilan program pendidikan moral, maka upaya pendidikan tersebut haruslah dilakukan dalam satu *just school environment*. Nilai-nilai yang mulai tergerus akibat transformasi industri 4.0 adalah sebagai berikut.

1. Nilai kultural. Nilai kultural adalah nilai yang berhubungan dengan budaya, karakteristik lingkungan sosial dan masyarakat (Djahiri, 2002). Pendidikan dapat menolong siswa untuk melihat nilai-nilai kultural sosial secara sistematis dengan cara mengembangkan keseimbangan yang sehat antara sikap terbuka (*openness*) dan tidak mudah percaya (*skepticism*).
2. Nilai yuridis formal. Nilai yuridis formal adalah nilai yang berkaitan dengan aspek politik, hukum dan ideologi (Djahiri, 2002). Nilai sosial politik suatu bahan ajar merupakan kandungan nilai yang dapat memberikan petunjuk kepada manusia untuk bersikap dan berperilaku sosial yang baik ataupun berpolitik yang baik dalam kehidupannya.
3. Nilai religius. Mempertahankan nilai-nilai tersebut merupakan tantangan terberat dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Perkembangan zaman menuntut manusia lebih kreatif karena pada dasarnya zaman tidak bisa dilawan. Revolusi Industri 4.0 banyak menggunakan jasa mesin

dibandingkan manusia. Tetapi ada hal penting yang membedakan mesin dengan manusia yaitu dari segi nilai kemanusiaan yang tidak dimiliki oleh mesin. Penanaman nilai inilah yang perlu diperkuat untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa, khususnya di dunia pendidikan.

Dalam merespon perkembangan teknologi, kendala utama yang dihadapi pendidikan Indonesia, khususnya daerah terisolir terluar dan terpinggir, adalah ketidakmerataan pendidikan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pada perguruan tinggi yang mencetak generasi inovatif dan produktif adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya sistem pembelajaran yang inovatif di perguruan tinggi, seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal *Information Technology* (IT), *Operational Technology* (OT), *Internet of Things* (IoT), dan *Big Data Analitic*, mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan terampil terutama dalam aspek data *literacy*, *technological literacy* dan *human literacy*.
2. Belum adanya rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap Revolusi Industri 4.0 dalam mengembangkan transdisiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan. Selain itu, mulai diupayakannya program *Cyber University*, seperti sistem perkuliahan *distance learning*, sehingga mengurangi intensitas pertemuan dosen dan mahasiswa. *Cyber university* ini nantinya diharapkan menjadi solusi bagi anak bangsa di pelosok daerah untuk menjangkau pendidikan tinggi yang berkualitas.
3. Masih kurangnya terobosan dalam riset dan pengembangan yang mendukung Revolusi Industri 4.0 serta ekosistem riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset pengembangan di perguruan tinggi, Lembaga Litbang, LPNK, industri dan masyarakat.

4. Masih kurangnya terobosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan pemula berbasis teknologi.

Menjawab Tantangan Pendidikan di Era Disrupsi dan Revolusi Industri 4.0

Adanya tantangan dalam bentuk sebuah permasalahan sebisa mungkin diiringi dengan solusi mengatasi permasalahan yang ada. Dunia pendidikan saat ini mulai disibukkan untuk menyiapkan generasi yang mampu bertahan dalam kompetisi di era industri 4.0.

Menristekdikti (2018) menyatakan bahwa “dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0 beberapa hal yang harus dipersiapkan diantaranya sebagai berikut. (1) Persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan terampil terutama dalam aspek data *literacy*, *technological literacy* dan *human literacy*. (2) Rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap Revolusi Industri 4.0 dalam mengembangkan transdisiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan. (3) Persiapan sumber daya manusia yang responsif, adaptif dan handal untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0. (4) Peremajaan sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur pendidikan, riset, dan inovasi juga perlu dilakukan untuk menopang kualitas pendidikan, riset, dan inovasi”.

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam pembahasan ini solusi dari tantangan pendidikan di era Revolusi Industri 4.0 sebagai berikut.

1. Kesesuaian kurikulum dan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Kesesuaian kurikulum dan kebijakan pendidikan dapat dilihat salah satunya melalui kompetensi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan. Menengok pendidikan di Indonesia saat ini masih diselimuti dengan berbagai macam problematika yang kurang mendukung siswa untuk dapat bertahan di era Revolusi Industri 4.0 tentu menjadi kajian yang harus ditemukan solusinya. Musyaddad (2013) dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa relevansi pendidikan dalam hal substansi dengan kebutuhan masyarakat masih tergolong rendah. Selain itu, pendidikan

justru dijadikan sebagai kawasan politisasi dari pejabat. Hal itulah yang memperparah ketidakmampuan pendidikan di Indonesia dalam menjawab tantangan di era Revolusi Industri 4.0. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang dapat dilakukan agar kurikulum dan kebijakan pendidikan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Adapun tawaran solusi sekaligus saran pada beberapa pihak terkait dengan dunia pendidikan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut. (1) Tidak menjadikan kurikulum hanya sebagai dokumen tertulis yang tidak diterapkan dengan baik. Hal ini sering kali terjadi, ketika kurikulum sudah tersusun sedemikian baik, namun dalam pelaksanaan justru tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum. (2) Mewujudkan pendidikan menengah atau tinggi yang lebih fokus melatih siswa terampil pada suatu bidang keahlian. (3) Melakukan evaluasi kebijakan dan atau kurikulum pendidikan di Indonesia yang berdasarkan pada orientasi kebutuhan pendidikan, bukan politisasi.

2. Kesiapan SDM dalam pemanfaatan ICT.

Saat ini, menyiapkan semua sistem pendidikan yang ditujukan untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki generasi milenial tentunya tidak bisa lepas dengan peralatan teknologi terkini. Oleh karena itu solusi dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan tantangan di era Revolusi Industri 4.0 akan selalu berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia serta sarana prasarana sebagai pengguna ICT. Begitu pula dalam pembelajaran, untuk mendidik siswa millennial secara efektif, sistem sekolah harus dilengkapi dengan prasyarat sumber daya manusia yang memiliki kemampuan penggunaan peralatan teknologi. Kemampuan yang dimaksud yaitu kemampuan dalam menggunakan ICT sehingga mampu mendampingi dan mengajarkan siswa dengan memanfaatkan ICT. Memiliki keterampilan ICT juga harus diiringi dengan pemahaman bahwa ICT untuk dimanfaatkan dalam memperoleh hasil belajar yang positif. *International Education Advisory Board* (2017) mengungkapkan bahwa setiap guru yang ada, tidak dikecualikan dari kebutuhan akan keterampilan tersebut. Pengembangan untuk semua pendidikan sangat penting untuk

memastikan teknologi digunakan dengan mudah di dalam pembelajaran mampu mempermudah penyelenggaraan pendidikan.

Peralatan yang memadai tidak akan berguna jika tidak diiringi dengan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkannya. Chai dan Chain (2016) dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa beberapa negara di ASIA (Hongkong, Singapura, dan Taiwan) telah menyiapkan tenaga pendidik profesional yaitu pendidik yang mampu menggunakan *e-learning*. Dalam penelitian tersebut juga memaparkan bahwa kemampuan pendidik dalam menggunakan ICT merupakan salah satu solusi untuk menyiapkan generasi milenial yang kompeten. Hal tersebut tentu senada dengan pendapat Menristedikti tentang persiapan sumber daya manusia yang responsif, adaptif dan handal untuk menghadapi revolusi industri.

Faktanya di Indonesia saat ini, tidak semua pendidik mampu dalam memanfaatkan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan 62,15% guru jarang menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pembelajaran; 34,95% guru kurang menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi, sedangkan 10,03% (Nurhaidah, 2017; Syukur, 2014). Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pendidik, faktor usia, dan masih terikat dengan penggunaan media konvensional.

Pemahaman pendidik tentang pentingnya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran juga masih rendah. Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan harapan yang tertuang sebagai solusi dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Ditinjau dari permasalahan pendidikan di Indonesia yang memiliki daerah-daerah terpencil dan terisolir, maka minimnya keterampilan pendidik dalam menggunakan ICT justru akan memperburuk permasalahan. Pendidik yang diharapkan memiliki kemampuan dalam ICT sangat dibutuhkan mulai dari pendidik anak usia dini, hingga pendidik di perguruan tinggi. Oleh karena itu, kemampuan dalam memanfaatkan ICT bukan hanya didukung dari kesiapan pendidik, melainkan juga kesiapan orang tua ataupun orang terdekat anak.

3. Kesiapan SDM dalam mengoptimalkan kemampuan karakter siswa.



Solusi lain untuk menjawab tantangan pendidikan di era Revolusi Industri 4.0 yaitu dari segi kemampuan dan pembentukan karakter siswa. Hal ini tentu tak lepas dari tujuan pendidikan era Revolusi Industri 4.0 yakni untuk memperoleh lulusan pendidikan yang kompeten, bukan hanya mampu memanfaatkan ICT tetapi juga mampu dalam kemampuan literasi, berpikir kritis, memecahkan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan memiliki kualitas karakter yang baik. Mengoptimalkan seluruh kemampuan siswa dapat dilakukan dengan berbagai macam metode pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak.

Pada era Revolusi Industri 4.0, pembelajaran diharapkan lebih banyak memberikan kesempatan pada siswa untuk kreatif, memecahkan masalah, mengoptimalkan kemampuan literasi dan numerasi, kolaborasi, dan berpikir kritis (Chai dan Chain, 2014; McGuire dan Alismail, 2015). Berdasarkan paparan tersebut, berbagai macam pendekatan, strategi, dan metode yang digunakan pendidik harus dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan kemampuan yang diharapkan. Setiap pendidik memiliki pilihan masing-masing yang tentu disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Selain kemampuan kognitif siswa, karakter atau pengembangan nilai pada diri siswa sangat dibutuhkan. Hal itulah yang membedakan antara manusia dengan robot atau mesin. Oleh karena itu, pendidikan di era Revolusi Industri 4.0 harus mampu mencetak siswa berkarakter sehingga tidak hanya bertahan pada zamannya tetapi mampu mengkritisi zaman.

Beberapa langkah untuk mewujudkan siswa yang berkarakter, diantaranya sebagai berikut. (1) Mengenalkan siswa dengan nilai-nilai yang dimiliki bangsanya melalui pendidikan kewarganegaraan (Chai dan Chain, 2014). (2) Pendidikan nilai di lingkungan terdekat anak, khususnya keluarga (Wening, 2015). (3) Anak dididik dan dilatih dengan cara bekerja sambil belajar. Kecerdasan berpikir anak dikembangkan dengan seluas-luasnya. (4) Memupuk kepribadian anak dengan kepribadian Indonesia sehingga menjadi pribadi yang dinamis, percaya diri, berani, bertanggung jawab

dan mandiri. (5) Pelajaran tidak hanya diberikan pada jam pelajaran saja, tetapi juga dalam setiap kesempatan di luar jam sekolah. (6) Contoh perbuatan baik diterapkan karena lebih berhasil dalam membina watak yang baik.

Berdasarkan paparan tersebut, solusi dalam segi kesiapan sumber daya manusia dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia untuk menjawab tantangan pendidikan di era Revolusi Industri 4.0, dapat diperinci sebagai berikut.

1. Memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada seluruh pendidik untuk mampu memanfaatkan ICT dalam pembelajaran, membimbing siswa dalam menggunakan ICT dan mempermudah pelaksanaan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Memberikan pelatihan, pendampingan, dan evaluasi secara kontinyu pada pendidik untuk mewujudkan pendidik responsif, handal, dan adaptif.
3. Menyiapkan pendidik untuk dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif sehingga dapat memberikan kesempatan pada anak untuk untuk kreatif, memecahkan masalah, mengoptimalkan kemampuan literasi dan numerasi, kolaborasi, dan berpikir kritis.
4. Memberikan pendidikan kewarganegaraan yang bermakna bagi siswa, sebagai bagian dari pendidikan nilai untuk mewujudkan manusia yang berakarakter.
5. Menjalin kerjasama yang baik antara pendidik dan orang terdekat siswa sehingga terjalin pendidikan yang berkesinambungan dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Kesimpulan

Di Indonesia, kesiapan menghadapi tantangan pendidikan era Revolusi Industri 4.0 adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM Indonesia melalui pendidikan. Hal ini dilakukan dengan melahirkan operator dan analis handal bidang manajemen pendidikan sebagai pendorong kemajuan pendidikan berbasis teknologi informasi di Indonesia menjawab tantangan Industri 4.0 yang terus melaju pesat. Kebijakan manajemen pendidikan di Indonesia saat ini



mendorong seluruh level pendidikan, terutama pendidikan tinggi untuk memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan komputasi pendidikan era Revolusi Industri 4.0.

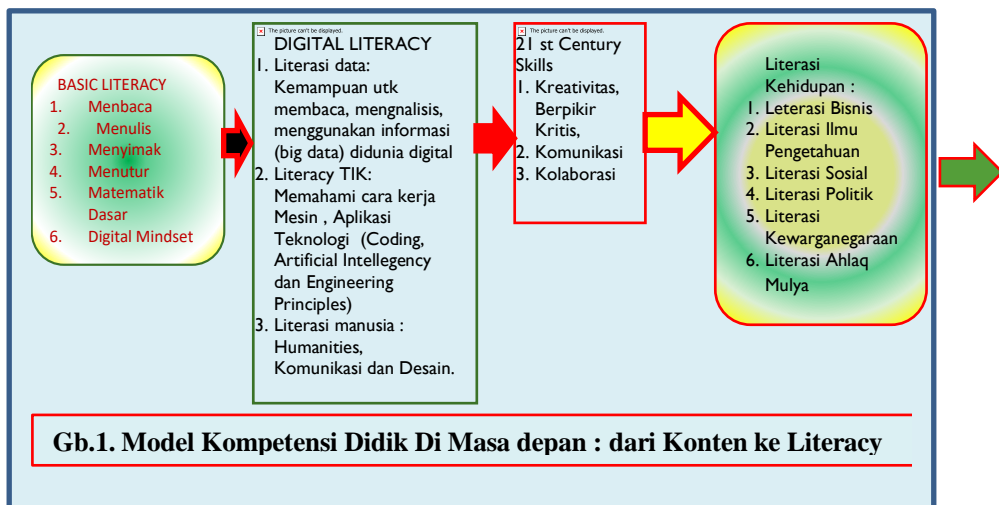
Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut.

(1) Melakukan penyesuaian kurikulum dan kebijakan dalam pendidikan. (2) Kesiapan SDM dalam memanfaatkan ICT, mengoptimalkan kemampuan peserta didik, mengembangkan nilai-nilai (karakter) peserta didik. (3) Kesiapan sarana dan prasarana pendidikan. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan sebagai solusi untuk menanggulangi dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah dengan menanamkan kesadaran kepada setiap individu tentang pentingnya memahami dampak negatif kemajuan teknologi.

Dengan analisa SWOT secara sederhana kita dapat menjadikan tantangan dan dampak negatif dari teknologi menjadi peluang untuk memajukan suatu masyarakat dan negara. Untuk itulah diperlukan peran serta aktif dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara dalam mencegah, mengurangi, dan menanggulangi dampak negatif dari kemajuan teknologi. Sebagai manusia modern, sangat tidak bijaksana serta tidak mungkin jika kita mengatakan *say no to technology*. Hal yang harus kita lakukan yaitu mempertimbangkan kebutuhan kita terhadap teknologi, mempertimbangkan baik buruknya teknologi tersebut dan tetap menggunakan etika, serta tidak terlalu berlebihan agar kita tidak kecanduan dan menjadi budak teknologi. Kita harus menyadari bahwa teknologi bukan merupakan aspek kehidupan umat manusia yang tertinggi. Tidak juga merupakan puncak kebudayaan dan peradaban umat manusia di dalam evolusinya mencapai kesempurnaan hidup (*perfection of existence*). Namun teknologi merupakan suatu alat yang digunakan manusia untuk mempermudah dalam melakukan sesuatu dalam aktivitas kehidupannya. Perluasan dari model kompetensi ke model pengembangan kapabilitas ini merupakan perubahan mendasar orientasi dan fokus pendidikan dalam dasawarsa kedua Abad XXI ini, yakni apa yang kita kenal dengan pergeseran dari paradigma “pengajaran” ke paradigma “belajar”, atau dari orientasi “job” diperluas ke orientasi “kehidupan”, yang memberi peluang tumbuhnya

kemandirian. Pendekatan pendidikan yang lekat dengan *expert-centered learning* dan *work-based learning*, di Abad XXI bergerak atau memperluas orientasi belajarnya dari *expert-centered learning* ke *life-based learning* (Staron, 2006). Model pendidikannya mengalami perluasan dari model pelatihan (*training model*) dan model pengembangan profesional (*professional development model*) ke model pengembangan kapabilitas (*capability development model*).

Model inilah yang seharusnya:



Daftar Pustaka

- Chai dan Chain. (2016). Professional Learning For 21st Century Education. *Journal Computer Education*, 4(1): 1.
- Davies, Ivor I.K. (2011). *Instructional Technique*. New York: McGraw Hill Book Company.
- Djahiri. (2002). *Strategi Pengajaran Afektif, Nilai Moral dan Games dalam Pembelajaran*. VCT Bandung.



Guilford, J. P. (1985). *The Structure-of-Intellect Model*. In B. B. Wolman (Ed.), *Handbook of Intelligence: Theories, Measurements, and Applications*. (pp. 225–266). New York: Wiley.

International Education Advisory Board. (2017). *Learning in the 21st Century: Teaching Today's Students on Their Terms*. USA: Certipor.

Kirschenbaum, D.S. & Tomarken O.A. J. (1982). *On Facing the Generalization Problem the study of Self-Regulatory Failure*. In E. C. Kendall (Ed.), *Advances in cognitive-behavioral research and therapy* (Vol. 1). New York: Academic Press.

Kohlberg, L. (2005). *Tahap-Tahap Perkembangan Moral* (Cetakan Pertama). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

McGuire dan Alismail. (2015). 21st Century Standards and Curriculum: Current Research and Practice. *Journal of Education and Practice*, 6(5) 150 -154.

Menristekdikti. (2018). Pengembangan Iptek dan Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0. Online. Diakses dari <https://ristekdikti.go.id/pengembangan-ip-teknologi-dan-pendidikan-tinggi-di-era-revolusi-industri-4-0-2/>, pada 6 Februari 2018.

Mulyana, D & Rakhmat. (2008). *Komunikasi Antar Budaya*. Bandung: Rosdakarya.

Musyaddad, Kholid. (2013). Problematika Pendidikan di Indonesia. *Education and Biology Journal*, 4 (1): 51 – 57.

Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya SMP Negeri 2 Sukoharjo Wonosobo, *Jurnal Pembangunan Pendidikan, Fondasi dan Aplikasi*, Volume 2, Nomor 12(1).

Nurhaidah. (2017). Kompetensi Guru dalam Memanfaatkan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di SD Negeri 16 Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(2): 126-134.

Semiawan, C. (1997). *Perspektif Pendidikan Anak Berbakat*. Jakarta: Grasindo.

Syamsuar &, Reflianto. (2016). *Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi di Era Revolusi Industri 4.0*. UNP dan UNM.



MANAJEMEN MUTU TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI ERA INDUSTRI 4.0

Prof. Dr. Hj. Siti Patimah., S.Ag., M.Pd

UIN Raden Intan Lampung

sitipatimah@radenintan.ac.id

Safriadi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

safriadi@gmail.com

Pendahuluan

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memegang peran penting dalam pembangunan bangsa. Perguruan tinggi telah melahirkan kaum terdidik dan intelektual yang menata kehidupan bangsa menuju arah yang lebih baik.

Bangsa maju adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kemampuan melahirkan, menemukan dan mengembangkan tiga dimensi ini, hanya dapat dilakukan di perguruan tinggi (Abbas, 2011, p. xi). Oleh karena itu, fungsi perguruan tinggi sangat strategis dalam meningkatkan daya saing, baik daya saing SDM maupun daya saing bangsa.

Inti penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pendidikan dan pengajaran secara realistis dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan dosen dengan mahasiswa. Kegiatan penelitian menjadi unsur kedua yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran melalui metode dan kaidah ilmiah. Penelitian dilakukan tidak sebatas untuk melengkapi syarat administrasi, namun hasil penelitian idealnya bermanfaat untuk keperluan pengambilan kebijakan (*policy research*).

Tri Dharma yang ketiga pengabdian kepada masyarakat adalah wujud nyata dari kiprah civitas akademika di setiap perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan, pelatihan dan pelayanan serta menerapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditujukan kepada masyarakat.

Agar pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat terealisasi secara berkualitas, maka diperlukan manajemen mutu tridharma perguruan tinggi baik dari aspek perencanaan, kebijakan, anggaran, pengawasan, maupun evaluasi.

Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 pasal 1 ayat (2) tentang pendidikan tinggi menjelaskan bahwa “pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sedangkan perguruan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 1 ayat 8 tentang pendidikan tinggi menjelaskan bahwa adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Perguruan tinggi merupakan organisasi berbasis dan bergumul dengan ilmu pengetahuan (*knowledge based organization*), penyampaian ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge; learning; education*), pengembangan ilmu pengetahuan (*transform knowledge/ penelitian*), dan penerjemahannya (*translate knowledge/ pengabdian*) untuk kepentingan membantu masyarakat agar semakin berkembang. Sehingga perguruan tinggi dapat dipandang sebagai organisasi yang punya peran dan tugas berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau organisasi berbasis pengetahuan (Suharsaputra, 2015, p. 18).

Perguruan tinggi di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu akademik, politektik, pendidikan tinggi, institut, dan universitas. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat (swasta) haruslah berbentuk yayasan atau badan yang

bersifat sosial. Sedangkan perguruan tinggi negeri sudah merupakan Badan Hukum Milik Negara yang bersifat nirlaba, sejajar dengan Badan Usaha Milik Negara (Indrajit & Djokopranoto, 2006, p. 6).

Peraturan tentang Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 1999 tentang penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum. Perguruan tinggi milik negara adalah badan hukum milik negara yang nirlaba. Maksudnya ialah perguruan tinggi milik negara adalah badan hukum yang mandiri dan berhak melakukan semua perbuatan hukum sebagaimana layaknya suatu badan hukum pada umumnya. Walaupun bersifat nirlaba, perguruan tinggi milik negara dapat menyelenggarakan kegiatan lain dan mendirikan unit usaha yang hasilnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi utama perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang sudah diubah menjadi BHMN adalah Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Pertanian Bogor, sedangkan PTN-PTN lain akan menyusun kemudian (Indrajit dan Djokopranoto, 2006, p. 8).

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi wajib dijalankan oleh dosen secara profesional. Dosen yang profesional merupakan dosen yang melaksanakan tugas-tugasnya sebagai berikut (Uwes, 2003, p. 147).

1. Membuat silabus, SAP dan perangkat pembelajaran yang mengandung tahapan konsep, teori serta aplikasi ilmu pengetahuan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan disiplin akademiknya. Kandungan tersebut teruraikan, baik dalam formulasi tujuan, bahan ajar, bahan bacaan, metodologi maupun evaluasi.
2. Dosen hadir di kelas sesuai dengan jadwal perkuliahan. Kedisiplinan merupakan contoh yang harus diberikan oleh seorang dosen kepada mahasiswa.
3. Mengatakan efektifitas mengajar, mencari data-data baru dalam menyampaikan materi kuliah.

4. Memberikan latihan dan responsi serta nilai mata pelajaran secara objektif, sesuai tugas pengajaran yang menjadi tugasnya, baik yang berhubungan dengan hasil ujian, makalah, skripsi, praktek laboratorium, praktek profesi, praktek bengkel dan praktek lapangan.
5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dipercayakan institusi seperti memimpin, mengelola laboratorium, memimpin dan membimbing praktek di bengkel kerja (*workshop*) dan praktek di lapangan serta membuat laporan kerja praktikum.

Standar mutu penelitian dosen yang menjadi tolak ukur penilaian ada tiga aspek utama, yaitu penyusunan rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan hasil penelitian. Indikator kemampuan menyusun rancangan penelitian adalah kemampuan memilih judul, uraian latar belakang, masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis atau pertanyaan penelitian, populasi dan sampel, serta metode dan teknik penelitian.

Indikator pelaksanaan penelitian adalah pelaksanaan pengumpulan data, pengorganisasian data dan pengolahan data, menyimpulkan dan membuat saran. Sedangkan aspek penyusunan laporan hasil penelitian, meliputi kemampuan membuat kelengkapan laporan proses dan hasil penelitian, serta pemaparan laporan dengan bahasa yang baik dan benar.

Ada lima aspek yang menjadi tolak ukur mutu dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kelima aspek tersebut adalah: (1) latar belakang masalah; (2) tujuan dan manfaat; (3) kerangka berpikir; (4) evaluasi; dan (5) fasilitas pengabdian kepada masyarakat.

Menurut Uwes (2003, p. 147) penilaian terhadap masalah meliputi hal-hal berikut. (1) Judul, sejauh mana mencerminkan pengabdian kepada masyarakat. (2) Analisis situasi berkenaan dengan kelengkapan dan kesesuaian data dengan masalah serta ketajaman analisisnya. (3) Kepustakaan, berkenaan dengan kelengkapan review literatur dan bacaan mengenai analisis situasi. (4) Perumusan yang menitikberatkan pada kekhususan dan kekonkretan masalah masyarakat.

Sementara tujuan dan manfaat pengabdian meliputi: (1) tujuan, yang berkenaan dengan kekhususannya, keterukuran dan perubahan masyarakat; (2) relevansi manfaat dengan tujuan dan khalayak sasaran. Sedangkan kerangka pemikiran meliputi beberapa hal sebagai berikut. (1) Pemecahan masalah yang berkenaan dengan kelengkapan alternatif, dasar pemilihan alternatif yang dihubungkan dengan kenyataan dan kondisi yang ada. (2) Kekhususan khalayak sasaran. (3) Keterkaitan dengan kelembagaan. (4) Relevansi metode dengan tujuan dan kondisi masyarakat.

Dalam hal evaluasi, mutu pengabdian masyarakat dilihat dari relevansi kriteria evaluasi dengan tujuan, proses kegiatan, kerincian dan tolak ukur evaluasi. Mutu fasilitas pengabdian kepada masyarakat dilihat dari kerincian dan relevansi jadwal kerja, kelengkapan komposisi personalia serta kesesuaiannya dengan bidang ilmu, relevansi jumlah biaya dan kerincian komponen pembiayaan.

Peran Pimpinan dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Membangun budaya institusi menjadi ekosistem yang kondusif untuk proses pemberdayaan dan pembudayaan diperlukan banyak faktor, diantaranya yang terpenting adalah kepemimpinan yang kuat. Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang mampu menggerakkan dan mengarahkan partisipasi total civitas akademika untuk bersama-sama secara sinergis dan berkelanjutan menghidupkan *cultural set* menjadi *behavioral set* sampai ke level filosofis. Ketika budaya institusi telah terbentuk sampai level filosofis, maka pengaturan-pengaturan kerja secara regulatif dan eksplisit tidak lagi menjadi hal yang penting karena seluruh anggota organisasi akan bekerja dengan *self control* (Susilo, 2018, p. 17).

Adapun ciri-ciri kepemimpinan pendidikan pada perguruan tinggi tampak pada sikap dan selalu berpikir kreatif, senantiasa melakukan eksperimen pengembangan mutu akademik secara ilmiah, terencana dan sistematis, responsif terhadap problem secara internal maupun eksternal, mampu mendorong lahirnya inisiatif bawahan,

mengedepankan kemandirian, kerjasama serta memutuskan suatu hal melalui pemikiran yang matang (Aziz, 2016, p. 79).

Kepemimpinan perguruan tinggi harus memiliki kemampuan manajerial yang baik, sehingga mampu membawa unsur-unsur lembaga secara sistemik ke arah yang diinginkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan lembaga yang dipimpinnya. Pemimpin lembaga juga harus mampu mewujudkan program yang berkelanjutan (*sustainability*) mengacu kepada standar mutu yang dipersyaratkan (Aziz, 2016, p. 80).

Kepemimpinan perguruan tinggi berbasis mutu hendaknya dilakukan secara strategis, sistemik, dinamis dan memerlukan kerja pikir serta kerja teknis yang seimbang. Semua itu dapat dilakukan apabila pejabat dan seluruh jajaran manajemennya bertekad bulat meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara total. Kebulatan tekad ini harus diawali pada pimpinan puncak yakni rektor, kemudian diikuti unsur jajaran pimpinan lainnya dan seterusnya diikuti semua tenaga pendidik dan kependidikan atau seluruh pegawai pada perguruan tinggi. Semua itu dilakukan melalui kepemimpinan yang visioner, pemersatu, pemberdaya, terbuka, dan delegatif pada semua satuan manajemen (Aziz, 2016, p. 94).

Manajemen Mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dalam pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Tri Dharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tri Dharma merupakan amanat undang-undang dan inti dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Berbagai problem yang menghambat pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi tampaknya sudah terlalu banyak untuk diinventarisir serta dicarikan solusi dan langkah pemecahannya. Dari sekian banyak problem, aspek teknis dan non teknis adalah bagian paling mendominasi serta seringkali muncul ke permukaan. Berbagai problem ini seperti: kurang memadainya sarana dan prasarana di perguruan tinggi, belum

optimalnya kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen perguruan tinggi yang belum tertata dengan baik, belum optimalnya kualitas lulusan perguruan tinggi yang disebabkan oleh aspek masukan (*input*) serta proses penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Yuliawati, 2012, p. 29-30). Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa setiap perguruan tinggi tentunya tidak harus memiliki problem serta solusi yang sama. Antara perguruan tinggi kecil dan besar, perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi Islam (PTKIN), atau bahkan perguruan tinggi teknik dengan kesehatan mereka memiliki problem Tridharma perguruan tinggi yang berbeda-beda. Meskipun demikian, di antara sekian banyak problem yang sering ditemukan, secara umum tidak terlepas dari problematika anggaran, pelaporan dan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yang tidak tepat sasaran, serta sistem kolusi dan nepotisme yang mengakar kuat pada sebagian perguruan tinggi.

Selanjutnya, agar pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berkualitas dan berjalan sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, tentunya diperlukan manajemen Tri Dharma perguruan tinggi secara rapi dan profesional. Sehingga kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi dapat terealisasi secara tepat sesuai dengan standar mutu, sasaran dan kebutuhan masyarakat akademik maupun masyarakat umum. Beberapa unsur manajemen mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang perlu diperhatikan antara lain.

1. Perencanaan

Kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi hendaknya dilakukan melalui proses perencanaan yang matang baik dari ruang lingkup jenis kegiatan, teknis pelaksanaan, seleksi, anggaran, hingga pelaporan. Seluruh unsur tersebut hendaknya direncanakan serta dilaksanakan secara kredibel, akuntabel, realistis serta berbasis peningkatan mutu perguruan tinggi.

Agar kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai prosedur, tentunya diperlukan pedoman pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang mencakup

pedoman pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, pedoman penelitian serta pedoman pengabdian kepada masyarakat.

Pedoman pendidikan dan pengajaran mencakup ruang lingkup peraturan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan di perguruan tinggi. Pedoman penelitian berisi tentang ruang lingkup penelitian, peraturan dan persyaratan penelitian, anggaran serta pelaporan penelitian. Sedangkan pedoman pengabdian kepada masyarakat memuat berbagai peraturan, kebijakan, anggaran dan ruang lingkup lainnya yang dapat dilaksanakan oleh civitas akademika dalam memberikan pengetahuan, pelatihan, pemberdayaan, pendampingan guna meningkatkan kualitas ekonomi dan pengetahuan masyarakat.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dipastikan memerlukan sumber daya manusia yang unggul, dinamis, serta progresif agar sebuah program dapat terealisasi secara optimal dan tepat sasaran. Peningkatan SDM tentunya diperlukan bagi seluruh civitas akademika dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa melalui pelatihan, pembekalan, *workshop* serta berbagai kegiatan lainnya.

Peningkatan SDM melalui kursus juga dapat dilakukan sebagai bekal para pengelola melakukan program Tri Dharma perguruan tinggi. Sebagai contoh: kursus menyusun kurikulum berbasis KKNl, menyusun RPS, menyusun silabus dan sebagainya. Peningkatan SDM hendaknya dilakukan secara berkesinambungan melalui program pelatihan, *workshop*, kursus, pembekalan dengan berbagai materi yang kompleks dan variatif. Sehingga pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi dapat terealisasi secara baik sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi setempat.

Kurikulum yang bagus tidak akan ada artinya bila pada gilirannya dosen dan tenaga kependidikan tidak mampu menjalankan kurikulum secara efektif. Pada kenyataannya, dunia pendidikan tinggi di tanah air bukan saja kekurangan dosen, tetapi lebih serius lagi adalah kekurangan dosen yang berkualitas, bukan saja dalam arti kesenjangan linieritas, melainkan kekurangan kompetensi dan idealisme (Susilo, 2018, p. 24).

Oleh karena itu, institusi pendidikan tinggi harus memiliki pusat pengembangan SDM yang lebih bagus dan berkualitas.

3. Dana

Permasalahan dana dalam pengelolaan perguruan tinggi nampaknya menjadi bagian problem yang sama antara perguruan tinggi satu dengan lainnya. Apalagi perguruan tinggi swasta, anggaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagian besar dibebankan kepada pihak yayasan. Problem anggaran pada perguruan tinggi swasta harus dicari solusi dan terobosan baru yakni institusi atau fakultas dapat menjalin kerja sama penelitian dengan perusahaan asing maupun non asing dalam cakupan dalam ataupun luar negeri.

4. Sistem Kontrol

Tujuan utama institusi pendidikan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang bermutu dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pada umumnya perguruan tinggi menerapkan lebih dari satu sistem program, misalnya SPMI, ISO 9001, Balanced Scorecard, Program Tata Graha, dan sebagainya. Bila masing-masing sistem dijalankan sendiri-sendiri secara terpisah-pisah, selain lebih sulit, tidak efisien, juga berpotensi menimbulkan kontra produksi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka membangun sistem terintegrasi membentuk sebuah sistem terpadu yang sinergis (Susilo, 2018, p. 173).

Pengelolaan perguruan tinggi idealnya dilaksanakan melalui sistem kontrol yang akurat. Artinya, realisasi kegiatan dengan anggaran benar-benar terpantau sehingga berbagai kegiatan dapat terlaksana secara optimal dan hasilnya bermanfaat sekaligus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

5. Evaluasi

Evaluasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi harus dilakukan pasca pelaksanaan kegiatan. Beberapa problem dan kegiatan yang belum maksimal terlaksana menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang di tahun kegiatan berikutnya. Evaluasi yang baik harus menghadirkan semua pihak yang bersangkutan. Misalnya rektor, wakil rektor, pejabat struktural, dekan, wakil dekan, ketua lembaga dan sebagainya wajib hadir dalam kegiatan evaluasi tersebut. Sehingga kegiatan Tri Dharma

Perguruan Tinggi benar-benar dilakukan secara terbuka dan transparan baik ruang lingkup kegiatannya maupun aspek penganggarannya.

Kesimpulan

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sedangkan perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi merupakan organisasi berbasis dan bergumul dengan ilmu pengetahuan (*knowledge based oragnization*), penyampaian ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge; learning; education*), pengembangan ilmu pengetahuan (*transform knowledge/penelitian*), dan penerjemahannya (*translate knowledge/pengabdian*) untuk kepentingan membantu masyarakat.

Inti penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pendidikan dan pengajaran secara realistis dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan dosen dengan mahasiswa. Kegiatan penelitian menjadi unsur kedua yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran melalui metode dan kaidah ilmiah. Penelitian dilakukan tidak sebatas untuk melengkapi syarat administrasi, namun hasil penelitian idealnya bermanfaat untuk keperluan pengambilan kebijakan (*policy research*). Tri Dharma yang ketiga pengabdian kepada masyarakat adalah wujud nyata dari kiprah civitas akademika di setiap perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan, pelatihan dan pelayanan serta menerapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditujukan kepada masyarakat.

Kepemimpinan perguruan tinggi dilakukan secara strategis, sistemik, dinamis dan memerlukan kerja pikir serta kerja teknis yang seimbang. Semua itu dapat dilakukan apabila pejabat dan seluruh jajaran manajemennya bertekad bulat meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara total. Kebulatan tekad ini harus diawali pada pimpinan

puncak yakni rektor, kemudian diikuti unsur jajaran pimpinan lainnya dan seterusnya diikuti semua tenaga pendidik dan kependidikan atau seluruh pegawai pada perguruan tinggi. Semua itu dilakukan melalui kepemimpinan yang visioner, pemersatu, pemberdaya, terbuka, dan delegatif pada semua satuan manajemen.

Pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berkualitas dan berjalan sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi tentunya diperlukan manajemen Tri Dharma Perguruan Tinggi secara rapi dan profesional. Sehingga kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat terealisasi secara tepat sesuai dengan standar mutu, sasaran dan kebutuhan masyarakat akademik maupun masyarakat umum. Beberapa unsur manajemen mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang perlu diperhatikan, yaitu perencanaan, sumber daya manusia, dana, sistem kontrol dan evaluasi.

Daftar Pustaka

- Abbas, S. (2014). *Manajemen Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana.
- Aziz, S. (2016). *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Koreksi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. (2003). *Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Dikti.
- Hedwing, R. (2007). *Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi Monitoring dan Evaluasi Internal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indrajit, R.E & Djokopranoto, R. (2006). *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mansur, A dkk. (2004). *Paradigma Baru Reformasi Pendidikan Tinggi Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Nawawi, H. (2003). *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Rivai, V dkk. (2014). *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudiyono. (2004). *Manajemen Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsaputra, U. (2015). *Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi, Strategi Menghadapi Perubahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Susilo, W. (2018). *Strategi Menegakkan Mutu Pendidikan Tinggi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Thoha, M. (2004). *Kepemimpinan dalam Manajemen* (edisi 10). Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Tilaar, H.A.R (2002). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R. (2012). *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Uwes, S. (2003). *Manajemen Pengembangan Mutu Dosen*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Yuliawati, S. Kajian Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Sebagai Fenomena Pendidikan Tinggi. *Widya*, No. 313, Maret 2012

REVOLUSI PENDIDIKAN BIDANG GIZI DI ERA 4.0

Novian Swasono Hadi

Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo

novianswasonohadi@gmail.com

Pendahuluan

Kemerdekaan memberikan janji kepada seluruh anak bangsa lintas generasi. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Selain itu juga memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Upaya melunasi janji kemerdekaan dan kesungguhan melaksanakan amanat konstitusi terkait dengan pendidikan semakin didukung oleh perundang-undangan (Renstra Kemendikbud, 2015).

Ilmu membantu manusia mendapatkan pengetahuan dan mencari kebenaran duniawi, melalui sistem yang terorganisasi dari observasi dan eksperimen, melalui berbagai fenomena alam termasuk tubuh manusia. Ilmu mempengaruhi kehidupan manusia dan juga sebaliknya. Demikian juga perkembangan teknologi dan seni. Dengan bantuan teknologi, ilmu

semakin mudah untuk dikembangkan dan diterapkan (Hazelkorn, et al., 2015). Sejarah perkembangan suatu ilmu merupakan suatu tahap dari yang kurang sempurna menjadi lebih sempurna dan memberikan nilai guna bagi kehidupan manusia.

Paradigma pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia meliputi, pendidikan untuk semua, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan sebagai suatu gerakan, pendidikan menghasilkan pembelajar, pendidikan membentuk karakter, sekolah yang menyenangkan, dan pendidikan membangun kebudayaan (Renstra Kemendikbud, 2015). Dari paradigma tersebut diharapkan masyarakat di Indonesia mendapatkan pendidikan secara berkelanjutan untuk membentuk karakter dan melestarikan budaya. Berbagai terobosan dan capaian pembangunan pendidikan seperti implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen, standar nasional pendidikan, sertifikasi guru, penyediaan tunjangan profesi, serta komitmen dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun sampai tingkat kabupaten dan kota tetap menjadi agenda prioritas dalam pembangunan pendidikan. Di samping itu, Kemendikbud menginisiasi berbagai terobosan baru untuk meningkatkan layanan pendidikan di Indonesia.

Meningkatnya penggunaan internet oleh berbagai kalangan mempengaruhi semua sektor. Memasuki era *disruptive technology* dan revolusi teknologi informasi dan komunikasi maka berdampak pada bidang pendidikan, yaitu kemudahan konektivitas layanan internet dan terciptanya perangkat gawai pintar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran.

Dalam era digital seperti ini, istilah gizi bukan merupakan barang langka. Hampir seluruh lapisan masyarakat mengenal sebutan gizi, dengan berbagai macam definisi sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan, yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

Memandang gizi dalam arti sempit hanya terbatas pada makanan yang berhubungan dengan kesehatan tubuh. Namun, dalam arti luas, gizi bukan hanya berhubungan dengan makanan dan kesehatan, tetapi dengan berbagai aspek kehidupan (Hardinsyah dkk, 2016). Bangsa maju adalah bangsa yang memiliki penduduk dengan tingkat kesehatan, tingkat kecerdasan, dan produktivitas kerja yang tinggi. Ketiga hal ini dipengaruhi oleh keadaan gizi.

Perkembangan Pendidikan dan Ilmu Gizi

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Level selanjutnya dari negara berkembang adalah negara maju. Tentunya Indonesia juga bercita-cita untuk menjadi negara maju. Ada beberapa faktor yang sangat dibutuhkan untuk menjadi negara maju, diantaranya adalah sumber kekayaan alam dan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia adalah dengan peningkatan pengetahuan dan pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal.

Dunia pendidikan di Indonesia dulunya diawali dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan dilanjutkan dengan Perguruan Tinggi. Namun sekarang sekolah sudah dimulai sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK) sebelum dilanjutkan masuk ke Sekolah Dasar (SD). Selain dari pendidikan formal juga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan keterampilan di luar akademik.

Di level perguruan tinggi baik itu universitas, sekolah tinggi, institut juga terus berkembang di Indonesia. Pilihan jurusan, program studi dan peminatan juga semakin berkembang. Prodi-prodi baru dari berbagai disiplin ilmu semakin spesifik dan mendetail. Prodi yang dulunya hanya secara umum dari satu disiplin ilmu, sekarang banyak yang pecah menjadi beberapa prodi yang menawarkan keilmuan yang lebih spesifik. Di bidang kesehatan sendiri ada beberapa cabang ilmu yang akhirnya berdiri menjadi prodi sendiri, diantaranya adalah

kedokteran, kesehatan masyarakat, keperawatan, farmasi, gizi, kesehatan lingkungan, sanitasi dan sebagainya.

Salah satu indikator kemajuan suatu negara juga diukur dari lingkup kesehatan penduduknya. Peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), peningkatan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan) serta penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk hidup layak) adalah indikator keberhasilan pembangunan manusia yang diukur dengan menggunakan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam Rakerkesnas 2018 dengan tema Sinergisme Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), melalui Percepatan Eliminasi Tuberculosis, Penurunan Stunting dan Peningkatan Cakupan serta Mutu Imunisasi, juga disinggung salah satunya adalah program dari bidang gizi, yaitu penurunan stunting.

Masalah Gizi di Indonesia pada masa lalu hanyalah kekurangan gizi yang meliputi 4 masalah utama yaitu Gizi Buruk, Kekurangan Vitamin A (KVA), Anemia dan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Namun seiring perkembangan zaman, maka masalah itu menjadi semakin kompleks. Masalah gizi tidak hanya pada kekurangan gizi, tetapi juga pada kelebihan gizi yang menyebabkan berbagai penyakit, khususnya penyakit tidak menular seperti dislipidemia, obesitas, hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus dan sebagainya.

Penyebab masalah gizi ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Secara langsung penyebab masalah gizi adalah kurangnya asupan makanan dan penyakit infeksi. Mekanisme patofisiologis yang terjadi adalah penurunan asupan gizi akibat kurangnya nafsu makan, menurunnya absorpsi, kebiasaan mengurangi makan pada saat sakit sehingga menyebabkan penurunan status gizi. Secara tidak langsung, masalah gizi bisa disebabkan karena ketahanan pangan keluarga yang kurang memadai, pola asuh anak yang salah, kurangnya pengetahuan gizi, serta pelayanan kesehatan dan lingkungan yang kurang memadai.

Peningkatan pengetahuan gizi adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia. Pengetahuan gizi yang rendah

membuat masyarakat tidak mengerti dan memahami akan pentingnya gizi. Konsumsi makanan di masyarakat merupakan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang mengonsumsi makanan untuk mengenyangkan perutnya saja, tidak untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam tubuhnya. Porsi karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral juga tidak seimbang bila dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Porsi makanan yang tidak mencukupi akan menyebabkan turunnya status gizi, sedangkan porsi makanan yang melebihi dari yang dianjurkan dapat menyebabkan obesitas dan komplikasi penyakit tidak menular.

Ilmu gizi mulai diperkenalkan sejak pendidikan usia dini pada anak-anak, berupa anjuran untuk minum susu dan makan sayur. Peran tenaga pendidik pada anak usia dini sangat dibutuhkan untuk peningkatan pengetahuan gizi pada anak-anak. Pada level pendidikan perguruan tinggi, ilmu gizi biasanya adalah bagian dari kedokteran atau ilmu kesehatan masyarakat. Sejarah pendidikan gizi di Indonesia terus mengalami perkembangan positif dari tahun ke tahun. Perkembangan pendidikan gizi dimulai dengan berdirinya Sekolah Ahli Makanan pada tahun 1950. Pada tahun 1952 berdiri Sekolah Ahli Diet sebagai kelanjutan dari Sekolah Ahli Makanan, yang kemudian menjadi Akademi Gizi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga kebutuhan tenaga gizi, maka lahir pendidikan Diploma III Gizi dan Sarjana Gizi. Perkembangan profesi juga melahirkan pendidikan profesi dietisien dan pasca sarjana gizi baik dibawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maupun Kementerian Pendidikan (Kemenristekdikti).

Gizi, Pangan, dan Kesehatan di Era Digital

Istilah gizi berasal dari bahasa Arab *gidza* yang berarti zat makanan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *nutrition* yang berarti bahan makanan atau zat gizi atau sering diartikan sebagai ilmu gizi. Suparisa dkk (2002), menyatakan bahwa gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi. Penyimpanan,

metabolisme dan pengeluaran zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi.

Pangan menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan adalah suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental, dan sosial serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit. Salah satu cara menjaga agar tubuh tetap dalam keadaan sehat adalah dengan gaya hidup yang bersih dan sehat. Perubahan gaya hidup saat ini menyebabkan meningkatnya jumlah penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung, stroke, dislipidemia. Selain itu juga meningkatkan jumlah penderita obesitas dan juga Diabetes Mellitus.

Perkembangan teknologi yang memudahkan kegiatan manusia, membuat perubahan gaya hidup menjadi tidak sehat. Aktivitas fisik menjadi berkurang karena teknologi, dulu dilakukan secara manual, sekarang menjadi serba otomatis. Berpindah menuju suatu tempat yang dulunya berjalan kaki, sekarang menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi. Bahkan untuk tempat parkir kendaraan, mencari yang terdekat dengan tempat tujuan dengan alasan malas berjalan jauh dari tempat parkir ke tempat tujuan.

Perkembangan teknologi juga menyebabkan perubahan pola makan. Sekarang orang lebih memilih makanan yang praktis dan instan dibandingkan makanan sehat dan bergizi. Makanan instan biasanya lebih bersifat *junk food*, karena nilai gizi di dalamnya tidak lengkap. Makanan seperti ini biasanya tinggi lemak dan tinggi gula. Efek dari konsumsi tinggi lemak dan gula adalah obesitas, diabetes mellitus dan penyakit tidak menular lainnya.



Peran Pendidikan Gizi dalam Peningkatan Derajat Kesehatan

Pendidikan adalah segala usaha dan tindakan untuk merubah pikiran dan sikap seseorang sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Pendidikan Gizi merupakan suatu usaha dan tindakan yang mengajak seseorang untuk memahami dan meningkatkan pengetahuan tentang gizi. Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan hasil tersebut akan diperoleh setelah seseorang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, yakni indra penglihatan, indra penciuman, indra pendengaran, indra perabaan dan indra pengecapan.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yaitu SDM yang memiliki fisik tangguh, mental kuat, kesehatan prima, serta tingkat prestasi baik. Pembangunan dan pembinaan SDM yang berkualitas sangat baik dimulai sejak dini, yaitu saat anak mulai sekolah. Peran tenaga pendidik untuk memberikan pendidikan tentang gizi sangatlah penting, selain berhubungan dengan prestasi belajar, masa anak-anak adalah masa pertumbuhan yang membutuhkan asupan gizi yang berkualitas sehingga derajat kesehatan yang diharapkan dapat tercapai.

Sistem pendidikan juga mulai berubah seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Dahulu peran tenaga pendidik lebih aktif dibandingkan dengan peran murid atau mahasiswa yang menerima pendidikan. Tetapi untuk sekarang, dengan pesatnya perkembangan informasi digital, maka proses edukasi tidak hanya diberikan oleh tenaga pendidik. Edukasi bisa saja didapatkan dari informasi yang tersebar luas di internet, termasuk pengetahuan tentang gizi dan kesehatan.

Masyarakat juga tidak harus menjalani pendidikan di sekolah, informasi telah tersedia di konten-konten dunia maya yang dapat diunduh dan dipelajari tanpa mengenal batas waktu dan tempat belajar. Hal ini juga terjadi di bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga masalah baru mulai bermunculan. Dengan masuknya era digital, orang juga lebih mudah untuk mengunggah suatu informasi atau berita, tetapi

isi dari konten tersebut belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Disinilah peran dari tenaga pendidik, khususnya di bidang kesehatan dan gizi. Bagi tenaga pendidik sebaiknya bisa bekerjasama dengan praktisi, peneliti dan pakar ahli untuk memfasilitasi informasi dan berita yang benar terkait dengan kesehatan dan gizi, sehingga tidak terjadi salah informasi tentang gizi dan kesehatan. Bagi masyarakat sebaiknya mencari informasi dan berita dari konten yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya dari jurnal yang terakreditasi, prosiding, hasil pertemuan ilmiah dan lain-lain.

Pendidikan gizi baik secara konvensional, yaitu berupa penyuluhan, ceramah, dan konseling, maupun pendidikan gizi secara digital sangat erat kaitannya dengan peningkatan derajat kesehatan. Indikator derajat kesehatan salah satunya adalah perbaikan gizi masyarakat, semakin baik perbaikan gizi yang terjadi di masyarakat, maka semakin meningkat derajat kesehatan di suatu bangsa. Perbaikan gizi dapat dilakukan dengan cara peningkatan pengetahuan tentang gizi di masyarakat, perbaikan pola makan, dan juga perbaikan *lifestyle*.

PRINSIP KETERBUKAAN (*DISCLOSURE*) PADA PERUSAHAAN *GO PUBLIC* DI INDONESIA TERKAIT PRAKTIK *INSIDER TRADING*

Hari Sapto Adji
Universitas Tompotika Luwuk
hari.sapto@ymail.com

Pendahuluan

Kegiatan pembangunan di negara kita semakin giat-giatnya dilaksanakan dan akan terus ditingkatkan. Rakyat Indonesia paham dan sadar bahwa pembangunan merupakan hak dan kewajiban serta tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai sumber dana pembangunan yang selama ini diperoleh dan dihimpun dari dalam negeri memang mengalami peningkatan. Di sisi lain, pembangunan juga berkembang sangat pesat. Akibatnya, kita memerlukan dana pembangunan yang lebih besar dari luar negeri meski tidak selalu mengandalkan bantuan dari lembaga-lembaga keuangan luar negeri.

Guna mencapai target investasi yang diharapkan, pemerintah hendaknya mendorong iklim investasi yang baik dengan menciptakan berbagai kondisi yang mendukung dunia usaha agar lebih solid dalam menghimpun sumber-sumber dana potensial, mengarahkan dan memanfaatkan dana masyarakat dalam bidang-bidang usaha sektor-sektor yang produktif. Di samping lembaga keuangan perbankan, modal ventura di dalam negeri Penanaman Modal Asing (PMA), sumber lain yang dapat diandalkan adalah pasar modal.

Adanya pasar modal, merupakan alternatif yang baik, sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional jangka menengah dan jangka panjang. Sedangkan bagi investor yang membeli saham,

lembaga ini dapat digunakan sebagai wahana untuk memperoleh keuntungan berupa *devident* dan *capital gain*.

Penjualan saham melalui pasar modal merupakan upaya mendapatkan dana masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan produktifitas nasional. Bila perusahaan yang memperoleh dana dari pasar modal bisa efisien dan produktif, maka diharapkan kondisi tersebut akan meningkat, yang selanjutnya akan meningkatkan pula sektor pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri.

Dapat dilihat bahwa pasar modal dalam upaya untuk menggali dana masyarakat, masih belum menampakkan hasil yang maksimal. Padahal dengan mendapatkan dana melalui pasar modal, perusahaan akan termotivasi secara alami menjadi transparan sehingga dunia usaha lebih sehat.

Pada hakikatnya istilah *go public*, jika dikaitkan dengan perusahaan memiliki arti bahwa perusahaan itu memasyarakatkan dirinya dengan jalan memberikan sarana kepada masyarakat masuk ke dalam usahanya, baik dalam hal kepemilikan maupun penetapan kebijaksanaan pengelolaan perusahaan. Menurut Bataona (1994, p. 71), proses *go public* dilakukan dengan tahap berikut.

1. Konsultasi kepada Bapepam.
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Mengajukan *Letter Of Intent*.
4. Penunjukan lembaga-lembaga penunjang emisi efek.
5. Mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek kepada Ketua Bapepam oleh calon emiten.
6. Evaluasi dan penilaian terhadap kemampuan calon perusahaan *go public*/ emiten.
7. Mendengar pendapat akhir.
8. Dikeluarkannya Surat Izin Emisi Efek.

Bagi Indonesia penonjolan pengertian *go public* merupakan proses edukasi mungkin diperlukan, karena tingkat pendidikan, pengetahuan dan kesadaran tentang pasar modal masih rendah (Sumantoro, 1990, p. 64).



Sebagai bahan perbandingan, di negara maju, terlihat justru *go public* merupakan proses timbal balik. Perusahaan membutuhkan modal guna melakukan peningkatan kegiatan usahanya. Sedangkan bagi pemodal, *go public* merupakan kesempatan guna menanamkan modalnya dengan prospek hasil dan ikut menentukan kebijaksanaan pengelolaan perusahaan tersebut, bila ia memiliki saham dengan suara yang cukup.

Pada tingkat yang lebih maju lagi bahkan *go public* tersebut dikaitkan dengan proses usaha, persaingan pasar, penanaman modal asing dan politik ekonomi moneter nasional dan internasional. Terdapat berbagai alasan, mengapa suatu perusahaan ingin melakukan *go public*, seperti yang dikatakan oleh Sjarir (1995, p. 22). Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kebutuhan dana untuk melunasi hutang, baik jangka panjang maupun pendek, sehingga mengurangi beban bunga.
2. Meningkatkan modal kerja.
3. Membiayai perluasan perusahaan.
4. Memperluas jaringan pemasaran.
5. Meningkatkan teknologi industri.
6. Membayar sarana penunjang (pabrik, perawatan kantor, dan lainnya).

Selanjutnya dalam kegiatan pasar modal akan memberikan manfaat bagi investor yakni sebagai berikut.

1. Adanya nilai investasi yang berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi.
2. Adanya perolehan *dividen* dari saham yang mereka miliki.
3. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam berbagai *instrument* yang bertujuan untuk mengurangi resiko.

Meskipun begitu, keinginan para investor yang memanfaatkan pasar modal sebagai penyaluran dana, juga telah diantisipasi pemerintah dengan mengusahakan agar investasi di pasar modal aman dan menarik. Sedangkan kedudukan calon investor *relative* lemah, apalagi jika

kurangnya pengetahuan mereka tentang mekanisme pasar modal itu sendiri.

Hal tersebut di atas, seperti yang dikatakan oleh Posner (1992, p. 444) bahwa penulisan tentang pendapat hukum dan keuangan yang tidak jelas misalnya prospektus, tidak berpengaruh secara langsung bagi investor yang tidak memahami sepenuhnya tentang pasar modal.

Di antara seluruh pelaku di dunia pasar modal, maka tanggung jawab terbesar ada pada emiten. Praktek di negara-negara lain juga menunjukkan bahwa emitenlah yang lebih sering diajukan ke pengadilan. Hal ini adalah wajar mengingat emitenlah sebagai pemilik kegiatan dan banyak memungut hasil dari suatu listing (Fuady, 1994, p. 88). Oleh karena itu, dapat kita katakan bahwa ketentuan perundang-undangan dalam hubungan dengan suatu perusahaan yang *go public* bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada investor dalam perdagangan saham dari tindakan penipuan maupun penyelewengan dalam jual beli saham.

Semua fakta berkenan dengan perusahaan yang *go public* dicantumkan dalam prospektus. Oleh karenanya, prospektus tersebut berisi antara lain mengenai saham, modal, identitas komisaris, direktur bahkan manajer perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan yang berkaitan dengan perusahaan sendiri adalah mengenai bidang usaha, prospek di masa mendatang, pendapat hukum (*legal opinion*), yang disusun oleh Konsultan Hukum. Selain itu juga laporan keuangan dan neraca rugi laba yang dibuat oleh Akuntan Publik.

Sebagai kunci dalam memenuhi prospektur seperti di atas, diperlukan pelaksanaan prinsip keterbukaan (*disclosure*), karena terdapat kemungkinan adanya perusahaan *go public* atau emiten melakukan penerbitan prospektus yang fiktif.

Nampaknya, peran emiten amat penting dalam usaha melindungi kepentingan para investor yang menginvestasikan dananya pada perusahaan *go public* tersebut. Peran emiten yang cukup penting adalah menyemarakkan dunia pasar modal kita dengan bertindak transparan.

Seyogianya dalam Undang-Undang Pasar Modal menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak turut campur terlalu jauh dalam pengambilan

keputusan suatu investasi. Peran pemerintah hanya semata-mata pada pemberian jaminan bahwa calon investor akan memperoleh informasi mengenai fakta-fakta yang bersifat material untuk mengambil keputusan investasi. Prinsip dasar ini sering disebut *Disclosure* atau Prinsip Keterbukaan.

Peran Bapapem (Badan Pengawas Pasar Modal) wajib senantiasa menjalankan kewajibannya dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang mewajibkan pihak-pihak yang aktif dalam dunia pasar modal untuk tidak melanggar ketentuan yang ada dalam rangka mendukung prinsip keterbukaan. Dengan kata lain, fungsi Bapapem sebagai badan pengawas pasar modal ialah melindungi kepentingan investor atau masyarakat, serta memantau dan mengatur pasar sehingga saham dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur, wajar dan efisien. Oleh karenanya untuk mendukung semua itu, Bapapem mengambil pendekatan bahwa keterbukaan informasi yang penting dan relevan tentang saham yang diperdagangkan, merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan. Dengan keterbukaan informasi, investor atau masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh dan menggunakan informasi yang ada sebagai bahan pengambilan keputusan yang mereka lakukan di pasar modal.

Prinsip keterbukaan hanya dapat dipenuhi apabila informasi yang disampaikan oleh emiten di pasar modal, merupakan informasi yang benar dan bersifat publik sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambil keputusan. Dengan demikian, investor dapat mengevaluasi jadi tidaknya membeli saham suatu perusahaan atau melepaskan saham yang dimilikinya.

Dalam hubungan dengan prospektus, bursa mengusahakan agar segala data yang disajikan oleh perusahaan dapat diandalkan oleh masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan mengambil keputusan (Koetin, 1992, p. 72).

Jadi, prinsip keterbukaan pada setiap tahapan suatu perusahaan yang terjun ke pasar modal merupakan suatu unsur yang penting. Sebab jika tidak terbuka, maka kepercayaan masyarakat menjadi luntur dan

khawatir akan adanya penipuan. Di samping bertentangan dengan hukum, dunia pasar modal juga tidak akan hidup dan berkembang.

Selanjutnya, berkaitan dengan prinsip keterbukaan, yang perlu diutamakan dalam transaksi pasar modal, maka dalam penyalahgunaan informasi yang dapat mempengaruhi harga saham tersebut, tidak tertutup kemungkinan dapat melibatkan orang dalam perusahaan sendiri (*insider trading*). Peristiwa *insider trading* telah berulang kali ditengarai terjadi dalam transaksi saham di lantai bursa, namun sangat sulit peristiwa *insider trading* secara jelas dapat dibuktikan.

Insider trading merupakan istilah yang dipinjam dari praktik di Amerika yang banyak dikaitkan dengan upaya penggunaan informasi-informasi yang disebut *confidential* (rahasia) oleh pejabat-pejabat perusahaan yang *go public*, yang karena jabatannya, ia dapat mengambil keuntungan.

Keuntungan yang diperoleh, karena informasi yang *confidential* tersebut tidak diumumkan pada masyarakat luas. Berdasarkan informasi orang dalam itu, ia membeli atau menjual saham perusahaan yang dimilikinya, dalam usaha mendapatkan keuntungan pribadi.

Prinsip Keterbukaan (*Disclosure*) yang diterapkan Sebelum Perusahaan Melakukan *Go Public* dan Setelah Saham didaftarkan pada Pasar Modal.

I. Prinsip Keterbukaan pada Masa Pra-Registrasi (*Pre-Filing Period*)

Pernyataan pendaftaran yang terdiri dari prospektus dan dokumen pendukung didaftarkan kepada Bapepam sebagai syarat utama Penawaran Umum. Syarat tersebut, berkaitan dengan tugas Bapepam sebagai pembina, pengatur dan pengawas sehari-hari kegiatan pasar modal. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 butir 19 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Arti penting dari dokumen tersebut yang wajib diajukan kepada Bapepam, agar dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan, dapat tercipta kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal atau masyarakat. Hal ini tercantum dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.



Penting bagi kita untuk mengetahui tujuan registrasi sehubungan dengan prinsip keterbukaan. Dengan registrasi/pendaftaran diharapkan terciptanya keterbukaan yang memadai dan tepat bagi investor mengenai fakta-fakta material yang berhubungan dengan perusahaan dan saham yang ditawarkan. Dengan demikian, para investor dapat membuat penafsiran yang realistis dan selanjutnya dapat melakukan keputusan apakah investor tersebut akan membeli atau tidak membeli saham yang bersangkutan.

Meskipun telah ada prospektus, namun hal itu tidak menjamin kebenaran material dari fakta-fakta yang digambarkan dalam prospektus tersebut. Investor yang telah membeli saham dan menderita kerugian sebagai akibat adanya pernyataan yang salah atau *misleading*, dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas adanya *misleading* tersebut.

Selanjutnya, dalam hal pengajuan gugatan *misleading*, pada prinsipnya kita perlu untuk memperhatikan secara kasus per kasus. Hal itu dikarenakan, di samping emiten sebagai tanggung gugat pertama atas kesalahan yang diperbuatnya, juga tidak tertutup kemungkinan tanggung gugat dapat ditujukan terhadap lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal.

Adapun pihak investor dalam mengajukan gugatan *misleading*, dapat menggunakan pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melanggar Hukum sebagai dasar utama. Di Indonesia, pengajuan gugatan oleh pihak investor dilakukan secara sendiri-sendiri, sehingga bisa cukup banyak kasus yang sama masuk dalam pengadilan. Kelemahan hukum kita adalah tidak memasyarakatnya apa yang disebut dengan *class action*, seperti yang terdapat di negara lain. Oleh karenanya, perlu dicarikan jalan keluar guna pengaturan *class action*, agar para investor tersebut yang mempunyai wadah seperti *investor club*, mempunyai kedudukan yang diakui oleh pengadilan dan dapat mengajukan hanya satu gugatan atas nama seluruh investor mengenai satu kasus yang sama.

Dengan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pihak Bapepam dapat melakukan upaya-upaya yang bersifat antisipatif atas kebenaran material tentang fakta-fakta yang digambarkan

dalam prospektus. Hal ini penting, karena terkesan selama ini pihak Bapapem cuci tangan atas kebenaran isi prospektus melalui klausul yang bertuliskan “Bapapem tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus ini, setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.”

Oleh karenanya, Bapapem memiliki staf ahli dalam menilai ketentuan pasar modal dan tindakan pelaku pasar modal (emiten), dapat sesegera mungkin menjatuhkan sanksi yang bersifat administratif terhadap emiten, jika pengajuan gugatan ganti kerugian terhadap investor atas pernyataan menyesatkan (*misleading*). Secara umum penyediaan fakta yang esensial, di samping bermanfaat bagi investor, secara tidak langsung berguna juga bagi emiten sendiri. Bagi emiten, ia dapat meminimalkan beban dan biaya dengan mencegah gugatan yang mungkin akan timbul dikemudian hari.

Di Amerika Serikat, pernyataan pendaftaran terdiri 2 bagian yang prinsipil. Bagian pertama dari pernyataan pendaftaran adalah prospektus. Sedangkan bagian kedua dari pernyataan pendaftaran adalah dokumen pendukung yang terbuka untuk umum dan tersedia pada Bapapem (Ratner dan Hazen, 1991, p. 32)

Prospektus adalah dokumen yang berisi keterangan dan informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk dapat menilai, baik tidaknya perusahaan yang bersangkutan, wajar tidaknya harga yang ditawarkan, bagaimana prospek perusahaan di hari mendatang (Koetin, 1992, p. 72). Dengan kata lain, prospektus berisikan informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak investor memperoleh kejelasan sebelum membeli efek/saham. Hal ini tertuang juga pada pasal 1 angka 26 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Prospektus tersedia untuk umum, menguraikan bidang perusahaan, modal, identifikasi para komisaris dan direksi serta manajer, prospek usaha di masa mendatang. Juga tidak ketinggalan laporan keuangan, neraca laba/ rugi dan pendapat hukum (*legal opinion*). Pada lembar pertama dari suatu prospektus wajib untuk dicantumkan

dalam huruf bercetak besar mengenai adanya suatu resiko, khusus yang dihadapi perusahaan, dan/atau adanya ketentuan atau kondisi khusus dari efek yang bersangkutan. Juga dimungkinkan dimuat adanya kesulitan dalam melakukan transaksi jual beli efek yang bersangkutan.

Sebagai contoh paling mudah adalah perusahaan *garment*/tekstil yang akan *go public*. Perusahaan tersebut tidak hanya perlu menyampaikan prospek bahwa ekspor di bidang usaha *garment* akan meningkat, namun wajib juga untuk mencantumkan bahwa ekspor di bidang usaha *garment* bisa saja mengalami penurunan, yang disebabkan dengan adanya pembatasan (*quota*) yang diterapkan oleh negara tertentu.

Hal lain, yang terdapat dalam suatu prospektus adalah pendapat hukum (*legal opinion*). *Legal opinion* adalah suatu pernyataan mengenai aspek hukum tentang emisi atau emiten, yang dibuat berdasarkan tinjauan dan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh konsultan hukum.

Pendapat hukum ini mempunyai fungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada investor, Adapun isi dari pendapat hukum adalah sebagai berikut (Radjagukguk, 1994, p. 4).

1. Berwenangnya direksi dan komisaris menjelaskan fungsinya masing-masing.
2. Izin-izin yang diperlukan perusahaan dalam melakukan aktivitas telah dipenuhi dan masih berlaku.
3. Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.
4. Perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga.
5. Menerangkan perusahaan yang bersangkutan tidak dalam sengketa di depan pengadilan dengan pihak lain.
6. Menerangkan tentang sahnya kepemilikan atas aset-aset perusahaan.

Pendapat hukum tersebut mempunyai arti sangat penting karena menyangkut tentang aspek hukum perusahaan yang akan *go public*. Berwenangnya pengurus perusahaan dalam melakukan tindakan-tindakan atas nama perusahaan, hal ini menjadi penting, berkaitan dengan putusan *go public*. Contoh lain dengan status hukum aset

perusahaan bisa diketahui dalam pendapat hukum tersebut. Dengan kata lain, pendapat hukum ini diharapkan akan memberikan suatu kepastian dan perlindungan bagi anggota masyarakat yang membeli saham perusahaan tersebut.

Bagian kedua dari pernyataan pendaftaran adalah dokumen pendukung yang terbuka untuk umum dan tersedia pada Bapepam. Dokumen pendukung juga berupa suplemen tentang laporan keuangan. Meskipun informasi pada bagian kedua ini, secara formal tidak dibagikan kepada investor perseorangan, namun orang yang berpengalaman dalam analisa keuangan akan memakainya untuk membuat daftar tentang penggunaan keuangan secara luas dan menyeluruh sesuai dengan peruntukannya. Contoh kasus di Amerika, Carl M. Loeb, Rhodes & Co. 38 SEC 843 (1959), yaitu perihal kasus yang berkaitan dengan penawaran saham Arvida Stock Case, di mana Arvida dalam penyediaan pembiayaan dan perluasan suatu *real estate*, yang sebelumnya pihak Arvida dalam pembiayaan properti Davis akan mendapat kuncuran dana melalui penawaran umum sebesar 25-30 juta dollar. Namun dalam *press release* selanjutnya dikatakan bahwa Arvida wajib menanggung program perluasan dengan pembangunan yang teratur. Hal ini menimbulkan kecemasan pada pihak Arvida (Ratner dan Hazeen, 1991, p. 51). Kasus tersebut menunjukkan tidak terdapatnya upaya keterbukaan atas asal modal yang digunakan untuk pembiayaan perluasan usaha.

2. Prinsip Keterbukaan (*Disclosure*) pada Masa Tunggu (*Waiting Period*)

Pada proses *go public* pada periode antara penyampaian pernyataan pendaftaran dan pernyataan pendaftaran menjadi efektif, melakukan penawaran untuk menjual efek masih bisa diperkenankan, namun tidak dalam bentuk tertulis.

Dealer hanya diperbolehkan menyampaikan keinginannya secara lisan guna membeli saham yang bersangkutan dengan mendiskusikan bersama investor langganannya, mengenai apakah efek tersebut baik untuk dibeli. Dalam kaitannya dengan itu, *dealer* harus mendapatkan *preliminary prospectus* (prospektus pendahuluan) guna mendapatkan

informasi yang dapat dipercaya. Untuk keperluan tersebut, prospektus harus disediakan oleh emiten atau penjamin (*underwriter*).

Adapun kegunaan yang utama dari prospektus pendahuluan tersebut dalam masa tunggu adalah untuk memberikan suatu kemungkinan bagi para *dealer* dan melalui mereka, para investor mendapat informasi yang ada dalam pernyataan pendaftaran, agar dalam mengambil keputusan tidak tergesa-gesa dalam melakukan penilaian efek.

Bila pernyataan pendaftaran menjadi efektif, penawaran efek secara lisan dapat diteruskan dan penjualan boleh dilakukan. Salinan prospektus yang terkahir harus pula disertakan dalam hubungannya dengan penawaran tertulis atau konfirmasi atau penyampaian efek.

Guna melindungi kepentingan semua pihak, khususnya para investor, jika di dalam pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material yang sesuai yang telah diwajibkan, sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka atas kerugian yang timbul akibat perbuatan itu, pasal 80 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas semua hal itu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran.
2. Direktur atau komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif.
3. Penjamin pelaksanaan emisi efek.
4. Profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran.

Namun, bila prospektus yang seharusnya diberikan kepada investor yang ingin membeli saham tidak terpenuhi, maka secara khusus menjadi suatu hal yang mendasar dalam penawaran umum, di mana prospektus merupakan dokumen yang mempunyai nilai yang unik. Setiap investor yang berminat dalam penawaran sebagai pelaku yang

utama, seharusnya mereka mendapatkan salinan prospektus pendahuluan (*preliminary prospectus*). Artinya, dengan adanya prospektus bertujuan untuk membuat jera tindakan-tindakan penipuan dalam rangka penjualan saham. Namun dalam praktek, seorang *dealer* saham yang melakukan penjualan selama masa tunggu tidak pernah memperlihatkan adanya prospektus pendahuluan (*preliminary prospectus*), terlebih lagi ia kadang-kadang tidak memiliki persediaan salinan prospektus untuk kepentingan investor.

Namun, dalam kasus *Diskin v. Lomas*, 452 F. 2d 871, pengadilan berpendapat penjualan saham tidak melanggar hukum sebab pembeli memiliki kesempatan untuk membaca prospektus akhir sebelum membayar harga saham tersebut (Ratner dan Hazeen, 1991, p. 69). Pendapat pengadilan tersebut menolak gugatan atas *broker/pialang* yang dianggap lalai tidak melampirkan prospektus pendahuluannya.

Prinsip Keterbukaan (*Disclosure*) yang Tetap diterapkan Setelah Saham didaftarkan di Pasar Modal

I. Kewajiban Emiten Melakukan Pelaporan dalam Kaitan Dengan Prinsip Keterbukaan

Setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif, emiten tetap mempunyai kewajiban untuk senantiasa menyampaikan informasi dan fakta-fakta yang bersifat material secara terus menerus sejauh hal tersebut menyangkut kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Prinsip keterbukaan semacam diatas harus diumumkan kepada public dan disampaikan kepada Bapepam.

Untuk maksud tersebut, sesuai dengan pasal 86 ayat 1 huruf a UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, bahwa perusahaan publik atau emiten wajib menyampaikan lampiran secara berkala kepada Bapepam tiap 3 bulan sekali, dan emiten juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan tersebut, kepada masyarakat.

Informasi yang perlu diungkapkan kepada investor pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu informasi keuangan tahunan dan tengah tahunan serta informasi non keuangan yang berupa

informasi mengenai kejadian penting yang dapat mempengaruhi keputusan investasi (Ruru, 1995, p. 4)

Sejalan dengan keinginan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya perlindungan investor, pemerintah menyadari terdapat permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian, diantaranya, akses terhadap informasi dan *financial resources*. Keberadaan posisi dewan komisaris dan direksi di perusahaan yang telah *go public* masih didominasi oleh para *founder* yang secara otomatis mempunyai akses informasi dan keuangan yang lebih luas dibandingkan dengan pemegang saham public.

Kesenjangan perihal di atas perlu diminimalisasi dengan adanya peraturan yang mengharuskan perusahaan publik dalam mengumumkan atau melaporkan hal-hal penting yang terjadi pada perusahaan. Di samping itu, kepentingan bisnis atau keuangan dewan komisaris dan direksi harus diketahui oleh para pemegang saham secara keseluruhan.

Pasar modal di Indonesia, harus terus berusaha untuk meningkatkan persyaratan keterbukaan (*disclosure*). Misalnya menerapkan prinsip *International Accounting* yang membawa manfaat dalam mengundang investor asing.

Penulis berpendapat bahwa sebenarnya dalam perbandingan laporan keuangan hampir di semua negara, tidak terdapat perbedaan yang berarti, tak terkecuali laporan keuangan pada lingkungan pasar modal. Hal tersebut disebabkan, hampir di semua negara termasuk Indonesia, pasar modal telah melakukan adaptasi tentang laporan keuangan yang berpedoman pada IAS (*International Accounting Standart*). Hal ini lebih memungkinkan, guna upaya perbandingan laporan keuangan antar sektor usaha yang satu dengan sektor usaha yang lainnya. Atau upaya perbandingan laporan keuangan, yang berkaitan dengan perusahaan *go public* yang mempunyai perbedaan skala yang bergerak pada satu bidang usaha sejenis. Dengan demikian, laporan keuangan yang dianut suatu negara dan lainnya adalah terletak pada cara pengungkapan kepada publik dan tidak menyangkut pada materi pengungkapan. Arti penting laporan keuangan pada dunia pasar modal,

berkaitan dengan prinsip keterbukaan adalah dalam upaya melindungi investor, relatif sama hampir di semua negara.

Untuk itu, emiten bertanggung jawab menciptakan hal-hal yang membantu dihasilkannya laporan keuangan yang tepat, seperti penetapan kebijaksanaan keuangan yang tepat, penyelenggaraan sistem perkiraan yang lengkap dan efektif, serta penyelenggaraan pengendalian intern.

Larangan *Insider Trading* dalam Pasar Modal

Sebenarnya, perdagangan dalam bursa bergantung pada suatu keadaan di mana perdagangan transaksi jual beli secara tatap muka dilakukan secara terbuka. Perdagangan melalui pasar yang impersonal mungkin saja baik, namun sekaligus juga bertentangan dengan peraturan hukum. Oleh karena itu, undang-undang memberikan pedoman tentang transaksi bursa. Pasal 1 butir 28 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan transaksi bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek mengenai jual beli efek, pinjam meminjam efek atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek.

Informasi merupakan hak istimewa yang memungkinkan pedagang mendapat untung secara benar dalam operasi pasar baik dan tertib. (Bergmans, 1991, p. 17). Orang-orang dalam (*insider*) menurut kasus-kasus yang ada, dapat melakukan transaksi dengan orang lain yang tidak mempunyai kaitan sama sekali dengan perusahaan dengan melanggar hukum. Hal tersebut tentu bertentangan dengan kewajiban seorang direksi atau manajer perusahaan.

Pandangan di atas, sedikit banyak membenarkan pernyataan Hemphill Jr dan Long (1994, p. 350) bahwa direktur dalam suatu perusahaan adalah merupakan wakil perusahaan bukan wakil pemegang saham, meskipun direktur tersebut, dipilih oleh para pemegang saham. Meski begitu, setiap direktur sebenarnya berhutang budi karena pada suatu hubungan baik dari kepercayaan yang diberikan oleh para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Direktur perusahaan diperkenankan dalam posisinya membelanjakan uang perusahaan untuk keperluan lain tanpa sepengetahuan pemegang saham. Dalam berbagai

kepentingan, seorang direktur hanya dimungkinkan melakukan kontrak dengan perusahaan lain secara terbuka.

Larangan perdagangan dengan mempergunakan informasi dari orang dalam adalah salah satu praktek transaksi yang dilarang dalam dunia pasar modal. Larangan *insider trading* ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penyimpangan penggunaan informasi material yang rahasia atau *confidential*.

Contoh perbuatan penyelewengan tersebut, seperti pembelian atau penjualan saham guna memperoleh keuntungan pribadi atau menghindari kerugian didasarkan pada adanya informasi yang *non public*. Berdasarkan informasi tersebut, mereka membeli atau menjual saham sebelum informasi itu diungkapkan secara umum.

Penjelasan pasal 95 UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal merinci siapa saja yang dimaksud dengan orang dalam (*insider*) suatu perusahaan publik, yaitu sebagai berikut.

1. Komisaris, direktur, pegawai emiten atau perusahaan publik.
2. Pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
3. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik yang memungkinkan orang tersebut mengetahui informasi orang dalam.
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a, huruf b dan huruf c di atas.

Mereka semua di atas, sesungguhnya merupakan *insider* murni. Merekalah yang biasanya mempunyai potensi untuk mengetahui *unpublished inside information* mendahului pihak lainnya termasuk calon investor. Mereka ini mengemban kepercayaan secara langsung ataupun tidak langsung dalam perusahaan publik yang efeknya rentan terhadap *unpublished inside information*. Atau dengan kata lain mereka ini disebut sebagai pihak yang berada pada posisi yang dipercaya (*fiduciary position*), untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang tidak atau belum terbuka untuk umum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 95 huruf a dan b UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, bahwa orang dalam

dari perusahaan publik atau emiten, yang mempunyai informasi orang dalam, dilarang melakukan pembelian atau penjualan efek perusahaan publik yang dimaksud.

Pada pasal 96 UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal juga menentukan orang dalam pun dilarang mempengaruhi pihak lain yang bertujuan untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek perusahaan publik. Selanjutnya, bagi orang dalam dilarang memberikan *unpublished inside information* kepada pihak manapun juga yang sepantasnya dapat diduga yang dapat mempergunakan informasi yang dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

Ada kalanya tidak semua pihak mempunyai informasi orang dalam. Umumnya disebut dengan *asymmetrical information*, yaitu ketidakmerataan informasi karena adanya pihak-pihak tertentu yang karena kedudukan mereka dapat memperoleh informasi terlebih dahulu daripada pihak lainnya. Hal tersebutlah yang menyebabkan lahirnya ketentuan mengenai kewajiban melakukan keterbukaan atau *disclosure*. Disamping itu, sebenarnya masih terdapat pihak lain yang dapat dikatakan sebagai pelaku dalam praktek *insider trading*. Mereka adalah pihak yang menerima informasi dari para *fiduciary position*, yang diistilahkan dengan *Tippes*. Sebagaimana diketahui bila larangan *insider trading* hanya dikenakan terhadap mereka yang berada pada posisi *fiduciary*, maka larangan tersebut akan dengan mudah untuk diselewengkan dan pada gilirannya prinsip keterbukaan tidak mampu untuk diterapkan secara optimal untuk pihak lain yang tidak berada pada posisi tersebut.

Larangan *insider trading*, berkembang berdasarkan teori yang berasal dari Inggris yang biasanya disebut dengan istilah *Constructive Trust* dan juga di Amerika Serikat disebut dengan istilah *Misappropriation*. Setidaknya teori *Constructive Trust*, tidak terlepas dari adanya teori *Business Property* yaitu suatu teori yang menganggap bahwa informasi perusahaan non publik adalah merupakan milik perusahaan, maka konsep *Trust* adalah dasar dari hubungan yang lahir karena suatu kepercayaan. Konsep tersebut diperluas menjadi konsep

Contructive Trust yang berkembang pesat di negara-negara penganut *Common Law System*.

Konsep *Contructive Trust* itu sendiri dapat dikenakan kepada mereka yang secara sadar mengetahui bahwa mereka menerima atau telah melakukan kegiatan dengan mempergunakan sesuatu informasi yang diperoleh berdasarkan hubungan kepercayaan. Sedangkan *unpublished inside information* itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu *trust property*.

Adapun istilah teori *Misappropriation*, yang telah lama berkembang di Amerika Serikat, dapat dikatakan tidak jauh beda dengan teori *Constructive Trust* di Inggris. Untuk konsep *Misappropriation* ini memang ditujukan guna menjaring mereka yang tidak mempunyai hubungan istimewa secara langsung dengan perusahaan publik atau emiten yang efeknya rentan terhadap adanya praktek *insider trading*.

Sesuai dengan konsep *Misappropriation*, suatu pihak yang memperoleh *unpublished inside information* berdasarkan hubungan kepercayaan dari pihak lain, juga tidak berhak untuk menggunakan informasi ini. Pelanggaran terhadap hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang atas informasi sebagai suatu benda yang berada ditangannya berdasarkan hubungan kepercayaan tersebut.

Guna keperluan tersebut, pada dunia Pasar Modal di Indonesia, telah ditentukan larangan praktek *insider trading* khusus menyangkut *Tippes*. Orang dalam dilarang menggunakan *inside information* dengan pemberian tip kepada orang lain yang diketahui atau layak diketahui bahwa dengan pemberian informasi tersebut, akan digunakan untuk keperluan melakukan kegiatan atas efek.

Hal tersebut tertuang dalam pasal 97 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu bagi setiap pihak yang mengusahakan untuk memperoleh informasi dari orang dalam secara melawan hukum akan dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam (*insider*) dalam kedudukannya sebagai *Fiduciary Position*.

Informasi itu sendiri dapat merupakan berita baik maupun sebaliknya. Informasi orang dalam pada penjelasan pasal 1 angka 7 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah informasi materiel yang

belum tersedia untuk umum. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi materiel adalah informasi atas fakta penting dan relevan mengenai suatu peristiwa, kejadian yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Adapun contoh informasi materiel tersebut, misalnya: penggabungan usaha (*merger*), pengambilalihan (*acquisition*), peleburan usaha (*consolidation*) atau pembentukan usaha patungan, pemecahan saham atau pembagian deviden saham, pendapatan dan deviden luar biasa sifatnya perolehannya atau kehilangan atau lepasnya kontrak penting, bisa juga informasi tentang produk atau penemuan baru yang berarti.

Seringkali dikatakan bahwa *insider trading* terjadi di dunia pasar modal yaitu adanya usaha yang bertentangan dengan peraturan perdagangan saham yang melibatkan orang dalam, yang memiliki informasi non publik. Tentunya, pada gilirannya akan mempengaruhi transaksi saham. Oleh karena itu, *insider trading* dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip keterbukaan (*disclosure*).

Kesimpulan

Prinsip keterbukaan (*disclosure*) mempunyai arti penting dalam upaya melindungi kepentingan investor. Pada penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal, emiten harus bertanggung jawab penuh terhadap akurasi dan kelengkapan informasi yang disajikan. Oleh karena itu, emiten perlu memahami sepenuhnya periode/ tahapan penyajian informasi. Pada perusahaan, dalam proses *go public*, penerapan prinsip keterbukaan, mulai saat calon emiten menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam, pada periode masa tunggu, bahkan setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif atau setelah saham didaftarkan di pasar modal. Praktek *insider trading*, dapat membawa akibat buruk bagi perkembangan pasar modal sebagai sarana investasi.

Untuk itu pihak investor perlu memperhatikan resiko bisnis yang berkaitan dengan investasi mereka. Selain itu juga perlu profesi penunjang pasar modal untuk selalu meningkatkan kualitas, integritas

dan menaati kode etik profesi masing-masing, guna mengoptimalkan pasar modal sebagai sarana investasi yang tertib dan aman.

Daftar Pustaka

Bataona, P.T. (1994). *Mengenal Pasar Modal dan Tata Aturan Perdagangan Efek Serta Bentuk Perusahaan di Indonesia*. Flores: Nusa Indah.

Bergmans, B. (1991). *Inside Information and Securities Trading (A Legal and Economic Analysis of The Foundations Liability in The USA dan European Community*. London: Graham & Trotman Limited.

Fuady, M. (1994). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Hemphill Jr, C.F & Long, J.A. (1994). *Basic Business Law*. Regent New Jersey, USA: Prantice Hall.

Koetin, E.A. (1992). *Analisis Pasar Modal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Posner, R.A. (1992). *Economic Analysis of Law*. Canada: Little Brown and Company.

Radjagukguk, E. (1994). *Mekanisme Pasar Modal dan Persoalan-Persoalan Hukum yang Timbul*. Jakarta: Mitra Management Center.

Ratner, D.L & Hazeen, T.L. (1991). *Securities Regulation (Cases and Material)*. St. Paul Min, USA: West Publishing Co.

Ruru, B. (1995). *Perlindungan Investor dan Permasalahannya*. Jakarta: JCC.

Sjahrir. (1995). *Tinjauan Pasar Modal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sumantoro. (1995). *Pengantar tentang Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.



GENDER, PENDIDIKAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Yurni Rahman

Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Email: yurnirahman@umgo.ac.id

Konsep Gender

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan peran laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Studi gender lebih menekankan perkembangan aspek maskulinitas dan feminitas seseorang. Perbedaan ini seringkali menjadi *gap* dalam penempatan peran antara laki-laki dan perempuan di tengah-tengah masyarakat. Penelitian dari Ivan Nye tentang “*Rule Structure and Analysis*” tahun 1976, membagi opini masyarakat terhadap fungsi dan peran laki-laki dan perempuan (suami istri) ke dalam lima pokok persoalan, yaitu: (1) segalanya pada suami; (2) suami melebihi peran istri; (3) suami dan istri mempunyai peran yang sama; (4) peran istri melebihi suami; (5) segalanya pada istri.

Dalam era globalisasi yang penuh dengan berbagai persaingan, peran seseorang tidak lagi banyak mengacu pada norma-norma kebiasaan yang lebih banyak mempertimbangkan faktor-faktor jenis kelamin, akan tetapi ditentukan oleh daya saing dan keterampilan. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpeluang untuk memperoleh kesempatan dalam persaingan. Dominasi laki-laki dalam masyarakat menurut Johnson (1987, p. 37), bukan hanya karena mereka “jantan” namun lebih dari itu, karena mereka mempunyai banyak akses kepada kekuasaan untuk memperoleh status. Misalnya, mereka mengontrol lembaga-lembaga legislatif, dominan di lembaga-lembaga hukum dan peradilan, pemilik sumber-sumber produksi, menguasai organisasi keagamaan, organisasi profesi, lembaga-lembaga pendidikan tinggi.

Sementara perempuan ditempatkan pada posisi inferior. Peran mereka terbatas, sehingga akses untuk memperoleh kekuasaan juga terbatas. Demikian juga dalam akses ekonomi, walaupun perempuan memberikan kontribusi terhadap kehidupan keluarga, namun pengakuan yang diperoleh sangat rendah, sehingga mereka memperoleh kesempatan yang terbatas untuk berkarya di luar rumah. Perempuan dengan kondisi mencari nafkah tetap diposisikan sebagai fungsi tambahan dan perempuan tetap dibebani mengerjakan tugas domestik, seperti memasak dan mengasuh anak, serta pekerjaan-pekerjaan kerumahtanggaan lainnya.

Beriringan dengan globalisasi dan reformasi serta pertumbuhan penduduk yang mengisyaratkan meningkatnya pemenuhan kebutuhan, mau tidak mau, senang atau tidak senang menuntut kita harus menyesuaikan diri terhadap perkembangan nilai tersebut yakni persaingan yang ketat. Hal tersebut menuntut, baik laki-laki maupun perempuan untuk bekerja keras dalam peran publik dengan semakin ekonomis.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999 di bidang sosial dan budaya mengamanatkan bahwa arahan kebijakan pemberdayaan perempuan dilaksanakan, yakni dengan “meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender”. Arahan ini mengisyaratkan bahwa penekanan konsep kesetaraan dan keadilan gender adalah keseimbangan (*equilibrium*) yang senantiasa menjaga kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Implementasi arahan GBHN 1999 tersebut telah dijabarkan ke dalam Misi Pemberdayaan Perempuan, yang diantaranya adalah: peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang strategi atas dasar kemampuan dan kecakapan intelektual, kreativitas, emosional, dan psikomotoriknya.

Peran-peran perempuan sebagaimana diuraikan tersebut, tidak sepenuhnya dapat diterima oleh setiap perempuan yang disebabkan telah terbentuknya wawasan, persepsi dan sikap dari nilai-nilai sosial

budaya yang berakar dalam masyarakat, bahwa perempuan apapun alasannya tetap berfungsi penuh dalam urusan rumah tangga. Kalaupun sang perempuan menempuh pendidikan hingga pendidikan tinggi, namun akses mereka terbatas pada tugas-tugas perkuliahan. Aktualisasi potensi dan kemampuan mereka untuk menduduki posisi-posisi tertentu sangat terbatas dalam organisasi dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, pada umumnya didominasi oleh laki-laki. Kondisi tersebut dijumpai juga pada situasi kehidupan mahasiswa dalam kampus sehari-hari di IKIP Negeri Gorontalo. Hal ini sering menimbulkan konflik dan ketegangan dalam kehidupan kemahasiswaan di kampus. Perempuan tetap memiliki keinginan untuk bergerak secara leluasa guna meningkatkan status dan rasa percaya diri, tetapi budaya dan pengakuan terhadap kaum perempuan membatasi terutama mereka yang telah kawin dan telah mempunyai anak.

Peran gender tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, implementasi peran gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berbagai faktor tersebut diantaranya: pengaruh sosio-kultural, persepsi dan interpretasi masyarakat (terutama perempuan) terhadap posisi perempuan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender, serta sikap masyarakat terhadap kesetaraan dan keadilan gender (Fakih, 1999, p.9).

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks dan konsep gender. Pemahaman tersebut penting, karena merupakan faktor yang mendasar dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan antara istilah gender dengan istilah seks (jenis kelamin).

Pengertian seks (jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang menentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Dengan ciri-ciri biologis

tertentu, seperti: laki-laki memiliki seperangkat alat reproduksi yang berfungsi membuahi sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi yang berfungsi dalam hal menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Artinya alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis laki-laki dengan alat biologis perempuan, karena secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. Konsep gender menurut Fakih (1999, p. 8), merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan berbagai ketidakadilan bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan melalui pelbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Hal tersebut dalam kenyataannya dapat dilihat antara lain: marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (dianggap tidak penting dalam keputusan politik), pembentukan stereotipe, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi nilai peran gender. Segala bentuk manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena saling berkaitan dan saling mempengaruhi secara dialektis. Tidak ada satupun manifestasi ketidakadilan gender lebih penting dari yang lain. Misalnya: marginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi karena stereotip tertentu atas kaum perempuan dan itu menyumbang kepada subordinasi, kekerasan terhadap perempuan, yang akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan, ideologi dan visi kaum perempuan sendiri.

Selanjutnya ditegaskan secara lebih jelas oleh Sadli dan Patmonodewo (Ihromi, 1995, p. 65), bahwa konsep gender merupakan konsep sosial yang membedakannya dengan konsep seks atau jenis kelamin yang menunjuk pada kategori biologis yakni perempuan dan laki-laki. Pandangan antara seks dan gender mencerminkan kontroversi antara faktor “*nature dan nurture*”, atau perdebatan antara determinisme biologis dan determinisme sosial.

Determinisme biologis merupakan “*dominance-submission*” yakni karakteristik biologis yang menentukan ciri agresivitas untuk laki-laki dan pasivitas untuk perempuan. Pandangan ini tidak didukung oleh variasi perilaku yang dapat diamati pada perempuan atau laki-laki, dan melemahkan anggapan adanya hubungan antara seks dan gender.

Gender merupakan sejumlah karakteristik psikologis yang ditentukan secara sosial dan berkaitan dengan adanya seks lain. Lebih jauh Sadli dan Patmonodewo (1995, p. 76) menjelaskan tentang identitas gender, sebagai pelabelan (pemberian arti) seseorang tentang dirinya, khususnya dirinya sebagai perempuan atau laki-laki, yang merupakan interaksi kompleks antara kondisi biologisnya sebagai perempuan atau laki-laki, dan berbagai karakteristik perilakunya yang ia kembangkan sebagai hasil proses sosialisasinya. Identitas gender merupakan bagian yang esensial dari persepsi diri dan konsep diri seseorang. Yang bisa berlangsung secara sadar dan tidak sadar, dalam arti apa yang tidak disadari sepenuhnya tidak selalu konsisten dengan apa yang disadari.

Dari deskripsi pendapat dan teori di atas dapat disimpulkan bahwa konsep kesetaraan dan keadilan gender adalah ide-ide, harapan-harapan, dan kebijakan yang diperuntukkan kepada laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi satu sama lain, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik dari segi politik, pendidikan, ekonomi, kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuan intelektualnya, kecakapan-kecakapan dan keterampilan-keterampilan fisik dan psikologisnya.

Pendidikan Perempuan

Pendidikan dalam arti kata sehari-hari adalah pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah, yang tersusun secara sistematis, penyampaian dilakukan secara teratur sampai pada taraf tertentu.

Pendidikan menurut Teori Struktural Fungsional atau *Equilibrium Theory*, adalah lembaga yang berperan aktif dalam proses perubahan suatu masyarakat. Sementara sekolah merupakan masyarakat kecil sebagai agen sosialisasi nilai-nilai moral yang dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kesadaran diri dan kesadaran sosial menjadi paduan yang stabil, disiplin dan utuh secara bermakna (Ballantine, 1993, p. 7-9). Komisi Mandiri Kependudukan dan Kualitas Hidup menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci menuju pembangunan sosial yang meliputi semua aspek kualitas hidup, karena pendidikan dapat mengembangkan dan menjawab rasa ingin tahu intelektual dari manusia. Pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan manusia dalam mengatasi semua masalah sosial dan lingkungan, dapat mengembangkan keterampilan dan sikap dalam menganalisis masalah guna mendapatkan cara untuk mengatasinya (Komisi Mandiri Kependudukan dan Kualitas Hidup, 1996, p. 144-145).

Pendidikan adalah subsistem dari sistem sosial, suatu kegiatan bangsa yang secara terorganisasi mengurus usaha mengembangkan kemampuan (intelektual, artistik dan etika) dan sikap menuju terbinanya warga negara yang dewasa, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan, baik pembangunan dirinya sendiri maupun pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu juga untuk menumbuhkan dan mengembangkan berbagai potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat manusia dan kebudayaan (Soedijarto, 1998, p. 64).

Pendidikan dapat dibagi ke dalam kategori berikut. (1) Pendidikan formal, yakni pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. (2) Pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah. (3) Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan keluarga. Pendidikan yang diperoleh di sekolah secara kasar digunakan

untuk mengukur tingkat pendidikan seseorang (Segall et al., 1995, p. 79-80).

Pendidikan di sekolah, selain memberikan kemampuan membaca, menulis, berhitung, keterampilan memecahkan masalah dan mempersiapkan pelajar untuk tujuan-tujuan pekerjaan, lebih jauh dari itu adalah sebagai fungsi sosial yakni berkenaan dengan pengembangan *self realization* atau realisasi diri (Scotter, et al., 1985, p. 108).

Pendidikan sekolah disepakati sebagai pendorong terjadinya perubahan melalui ilmu dan teknologi, yang perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup setiap pesertanya (Kammars, 1989, p. 6). Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki fungsi mengajarkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan anak didik dikemudian hari, menanamkan dan mendorong penyesuaian nilai-nilai budaya dalam masyarakat, menanamkan disiplin dan kepatuhan agar anak didik menjadi warga negara yang baik (Calhoun, et al., 1994, p. 344). Dengan demikian, pendidikan di sekolah memiliki empat peranan penting bagi kehidupan manusia, yaitu: (1) cara memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan nilai tertentu; (2) secara intelektual diperlukan untuk memecahkan masalah; (3) pendorong adanya perubahan; dan (4) jalan untuk melakukan mobilitas sosial.

Fungsi pendidikan yang dikemukakan di atas sesuai dengan *Theory of Educational Effect*, bahwa pendidikan formal yang berlangsung di sekolah tidak saja mengajarkan murid dengan membaca dan menulis, tetapi lebih jauh dari itu merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi nilai-nilai, sikap dan perilaku yang relevan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, seseorang yang lebih lama mengalami pendidikan di sekolah lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan pengalaman baru, lebih menghargai ilmu dan siap menerima perubahan (Inkeles dan Smith, 1976, p. 139-143). Hopkins dan Stanley (1981, p. 457) menjelaskan pula bahwa, dengan rata-rata tingkat pendidikan yang tinggi dapat digunakan untuk menginterpretasi profil seseorang, bahwa seseorang cenderung lebih bersifat terbuka terhadap informasi, dan cepat menerima inovasi daripada individu dengan tingkat pendidikan

rendah. Lebih jauh Inkeles dan Smith (1976, p. 133) menjelaskan bahwa pada masyarakat yang kompleks, tidak ada prediktor sikap, nilai dan perilaku bagi seseorang yang lebih konsisten dan kuat selain jumlah tahun sekolah atau lamanya seseorang bersekolah.

Tingkat pendidikan berkaitan dengan jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh seseorang, yang berkesinambungan antara satu jenjang dengan jenjang lainnya, terdiri atas jenjang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (Soedijarto, 2000, p. 91-93). Sedangkan Surjadi mengemukakan bahwa jenjang pendidikan adalah tingkatan pendidikan persekolahan yang berkesinambungan antara satu jenjang dengan jenjang lainnya terdiri dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Surjadi, 1999, p. 155).

Pada jenjang pendidikan pra sekolah, usia peserta didik sekitar 0-6 tahun. Tujuan pendidikan pada jenjang ini adalah untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri baik dari segi intelektual, sosial dan emosional sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.

Pada jenjang pendidikan dasar, usia peserta didik sekitar 7-15 tahun. Pada jenjang ini peserta didik diberikan bekal pengetahuan dasar untuk memiliki kemampuan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk dapat hidup dalam masyarakat. Jenjang pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Jenjang pendidikan menengah adalah perluasan dari pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, yang berfungsi menyiapkan peserta didik memasuki dan mengembangkan diri di dunia kerja atau masuk di perguruan tinggi. Pada jenjang ini usia peserta didik berkisar antara 18-21 tahun.

Pendidikan Tinggi merupakan lembaga pendidikan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan tinggi sebagai kelanjutan pendidikan menengah diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki

kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki watak dan kepribadian. Selain itu juga memiliki semangat pengabdian kepada profesi, negara, bangsa dan masyarakat.

Shane melalui risetnya tentang arti pendidikan bagi masa depan menegaskan ada empat potensi signifikansi pendidikan bagi manusia terhadap masa depan, yakni sebagai berikut. (1) Pendidikan adalah suatu cara yang mapan untuk memperkenalkan si pelajar (*learners*) pada keputusan sosial yang timbul. (2) Pendidikan dapat dipakai untuk menanggulangi masalah sosial tertentu. (3) Pendidikan telah memperlihatkan kemampuan yang meningkat untuk menerima dan mengimplementasikan alternatif-alternatif baru. (4) Pendidikan juga merupakan cara terbaik yang dapat ditempuh masyarakat untuk membimbing perkembangan manusia sehingga pengamanan dari dalam berkembang pada setiap anak dan karena itu dia terdorong untuk memberikan kontribusi pada kebudayaan hari esok (Shane, 2002, p. 39).

Menganalisis beberapa pandangan dan teori tentang pendidikan di atas, berarti pendidikan formal yang berlangsung di sekolah berperan penting dalam proses perubahan suatu masyarakat, mensosialisasikan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur masa lalu, dan menanamkan disiplin dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan formal merupakan sarana utama dalam meneruskan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan merupakan wahana untuk mempersiapkan manusia yang mampu hidup dan berkehidupan pada zamannya. Karena itu, secara ekonomi seseorang dengan tingkat pendidikan formal tertentu dapat diprediksi memperoleh pekerjaan serta pendapatan yang sesuai. Tingkat pendidikan dapat diukur dari lamanya (jumlah tahun) seseorang mengalami proses pendidikan secara formal di sekolah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah merupakan proses sosialisasi nilai-nilai, sikap dan perilaku yang relevan dalam kehidupan masyarakat untuk masa kini dan untuk hari esok, yang dilaksanakan di sekolah, luar sekolah dan dalam lingkungan keluarga.

Dan tingkat pendidikan adalah lamanya waktu yang dinyatakan dalam jumlah tahun yang digunakan oleh seorang petani mengikuti pendidikan formal di sekolah.

Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi diramalkan memiliki dasar-dasar pengetahuan yang cukup memadai untuk hidup bermasyarakat, memiliki kekayaan nilai-nilai etika, nilai estetika dan nilai manfaat tentang pemanfaatan lingkungan yang selanjutnya dapat membentuk kesadaran, sikap dan kepedulian terhadap perlindungan lingkungan. Dengan pendidikan yang tinggi akan berakibat pada kemampuan berpikir abstrak, cenderung bersifat terbuka terhadap berbagai pengalaman, ide-ide dan informasi baru, menghargai ilmu, serta siap menerima perubahan. Demikian sebaliknya bagi seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan merupakan kata kerja dari kata berdaya, yang berarti memiliki kemampuan secara mandiri untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Seseorang dikatakan berdaya apabila orang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya. Kemampuan tersebut berupa pengetahuan, keterampilan, kecakapan khusus, serta sikap positif dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapinya.

Pemberdayaan adalah upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang telah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Titik berat pemberdayaan adalah pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri (Setiana, 2005, p. 5). Pandangan ini mengandung arti bahwa pemberdayaan diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sebagai objek, tetapi justru sebagai subyek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum.

Pandangan lain yang senada mengartikan pemberdayaan merupakan suatu pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan kepentingan dan cita-citanya sendiri, yang

dikaitkan dengan latar belakang historis, letak geografis, dan potensi perkembangannya sehubungan dengan faktor-faktor penunjang yang dimilikinya (Usman, 2008, p. 12-13). Selanjutnya Usman (2008, p. 21) mengemukakan bahwa terdapat dua perspektif untuk mendekati persoalan pemberdayaan masyarakat (terutama kelompok miskin) agar dapat lebih memiliki akses pada pelayanan program pembangunan, yakni sebagai berikut. (1) Perspektif yang memfokuskan perhatian pada alokasi sumber daya (*resource allocation*). (2) perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada penampilan kelembagaan (*institutional performance*). Kedua perspektif tersebut memiliki prinsip yang berbeda, namun diharapkan melalui pemberdayaan masyarakat memiliki akses pada kedua sisi persoalan ini, baik pada alokasi sumber daya maupun pada sisi penampilan kelembagaan.

Pendapat di atas didukung oleh hasil-hasil kajian Cohen dan Uphoff (1988, p. 87), bahwa manusia tidak lagi harus diidentifikasi sebagai “kelompok sasaran”, melainkan sebagai “pemanfaat yang diharapkan” yaitu mereka yang akan diuntungkan dengan adanya program-program pembangunan, baik pembangunan biofisik, ekonomi maupun sosial.

Mengacu dan mengadopsi berbagai teori dan pendapat tentang pemberdayaan di atas, dapat dikemukakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang membimbing dan membina perempuan untuk memberikan kesempatan melakukan akses baik secara kelembagaan maupun alokasi sumber daya dalam bentuk memberikan berbagai pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu yang dapat dipilih sesuai kebutuhan, terlibat dalam pengambilan keputusan, penentuan strategi dan proses pelaksanaan program pembangunan, dan menilai keberhasilan dan dampak yang dirasakan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dalam usaha mereka.

Daftar Pustaka

- Ballantine, J.H. (1993). *The Sociology of Education: A Systematic Analysis* (3rd Edition). New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Calhoun, C et al. (1994). *Sociology*. Sixth Edition. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Fakih, M. (2000). *Kekerasan Gender dalam Pembangunan*”, dalam Ahmad Suaedy (ed.), *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*. Jakarta: Grashindo.
- Good, T.L & Brophy, J.E. (2003). *Looking in Classrooms*. USA: Allyn and Bacon.
- Hopkins, K.D & Stanley, J.C. (1981). *Educational and Psychological Measurement and Evaluation*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Inkeles, A & Smith, D.H. (1976). *Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Kammars, H.M. (1989). *Sistem Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi: Suatu Studi Perbandingan Antar Beberapa Negara*. Jakarta: Depdikbud, P2LPTK.
- Sadli & Patmonodewo. (1995). *Pendidikan Sebagai Sarana Reformasi Mental dan Upaya Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Segall, M.H et al. (1999). *Human Behavior in Global Perspective: An Introduction to Cross-Cultural Psychology*. USA: Allyn and Bacon.
- Shane, H.G. (2002). *The Educational Significance of the Future*. Diterjemahkan oleh M. Ansyar, Penyunting Yusufhadi Miarso, *Arti Pendidikan Bagi Masa Depan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soedijarto. (2000). *Pendidikan Nasional Sebagai Wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Jakarta: Cinaps.

Soeryani, M. (2000). *Kepedulian Masa Depan Laporan Komisi Mandiri Kependudukan dan Kualitas Hidup*. Jakarta: Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan.

Surjadi, A. (1999). *Investasi Sumber Daya Manusia dan Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Van Scotter, R.D et al. (1985). *Social Foundation of Education*. New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice Hall.



BAHASA SELALU TERJADI DALAM KONTEKS

Suharyanto H. Soro

Universitas Islam Nusantara Bandung

suharyanto@gmail.com

Secara umum, bahasa didefinisikan sebagai sistem bunyi yang diartikulasikan dan dihasilkan dengan alat bicara atau sistem kata-kata yang tertulis sebagai lambang dari kata-kata yang diucapkan (Mehra, 1963). Kata-kata yang diucapkan dan dituliskan itu kedua-duanya dipergunakan sebagai alat berpikir dan sebagai tanda untuk menyatakan pikiran itu.

Fungsi bahasa adalah untuk menyampaikan dan menyatakan pikiran. Bahasa membantu kita dalam menganalisis kenyataan-kenyataan yang kompleks menjadi bagian-bagian yang sederhana. Selain itu juga membantu dalam pembentukan konsep atau gagasan umum serta memperpendek proses berpikir. Di sinilah berlakunya nilai universalitas bahasa, apakah itu bahasa daerah, bahasa nasional, atau bahasa internasional.

Bahasa selalu terjadi dalam konteks kultural, sosial, dan kognitif. Konteks kultural berkaitan dengan kesamaan arti dan pandangan tentang dunia. Konteks sosial adalah berkenaan dengan identifikasi diri seseorang yang dikaitkan dengan orang lain yang menciptakan aturan serta cara mengerti situasi dan tingkah laku. Konteks kognitif adalah tempat mengaitkan pernyataan dengan pengalaman lampau. Mengerti bagaimana bahasa digunakan dan disusun, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh pandangan tentang bagaimana bahasa itu dikaitkan dengan berbagai konteks tersebut.

Para ahli sosiolinguistik dan psikolinguistik percaya bahwa setiap pernyataan selalu dalam kaitan dengan konteks, sekurang-kurangnya

dengan konteks kognitif. Mereka meyakini bahwa setiap tuturan dipersepsi dengan melibatkan unsur konteks, baik konteks lokal maupun nonlokal, yaitu konteks kognitif.

Di samping konteks di atas, ada juga bahasa dalam konteks sensitif. Arti sensitif yang dimaksud di sini bukan hanya berarti peka atau mudah dipengaruhi, melainkan juga berarti bahwa dapat dicatat dan diukur. Karena bahasa selalu terjadi dalam konteks, maka pola-polanya pun adalah sensitif terhadap karakteristik konteks tersebut, baik dalam hal bentuk dan fungsi maupun dalam tingkatannya.

Analisis dari berbagai sudut pandang telah mencatat hubungan yang sistematis antara bahasa dan konteks yang tersebar ke berbagai tingkat bahasa. Hal ini dapat dilihat, misalnya dalam analisis sosiolinguistik yang berfokus pada pengamatan adanya pengaruh pembatas-pembatas yang ada dalam kawasan budaya, sosial, psikologi, dan tekstual terhadap variasi fonologi, morfologi, dan sintaksis.

Bahasa selalu terjadi dalam sebuah dunia yang dihuni bersama-sama. Konsekuensi dari itu, maka manusia ditandai oleh kata, dunianya merupakan dunia bahasa. Dengan demikian ia terangkum oleh harapan dan putus asa, kebenaran dan dusta, rahmat dan dosa yang memberikan arah dalam hidupnya.

Masyarakat pemakai bahasa daerah menguasai bahasa daerahnya melalui proses asimilasi (*acquisition*) dan bersifat turun temurun dari generasi ke generasi. Proses pemerolehan bahasa Ibu (*mother tongue*) terjadi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Seorang anak tidak perlu harus menulis kosa kata (*vocabulary*) untuk tiap kali melakukan komunikasi dengan mitra tuturnya.

Rumah adalah lingkungan kebahasaan yang memiliki nilai kognitif tinggi dalam pemerolehan bahasa. Transaksi sosial yang terjadi di rumah pada umumnya dilakukan dengan bahasa, apakah itu bahasa lisan maupun bahasa tubuh/isyarat.

Setiap anak yang normal, pada umur lima tahun telah dapat berkomunikasi dalam bahasa yang digunakan di lingkungannya, walaupun tanpa pengajaran formal (Krashen, 1982). Dalam usia ini, pada umumnya seorang anak telah menguasai sistem fonologi, sintaksis, dan

semantik dengan cara mengoceh. Komunikasi dengan anggota keluarga yang tidak pernah bosan dan tidak memberikan hukuman menambah suasana terasa cair.

Begitulah kejadian yang terjadi dalam proses pemerolehan bahasa daerah. Sangat jauh perbandingannya dengan sistem belajar secara formal. Jarak antara guru dengan siswa sangat dirasakan. Sebaliknya dalam proses pemerolehan bahasa Ibu jarak (*gap*) antara penutur dengan mitra tutur seakan-akan tidak dirasakan. Nilai-nilai seperti ini mestinya dijaga dan dikembangkan, bukannya bahasa Indonesia dan asing (*English*) yang diagung-agungkan.

Dalam teori psikolinguistik terdapat ungkapan “Bahasa adalah cerminan jiwa”. Agar komunikasi berjalan lancar, dibutuhkan jiwa yang sehat dan mengikuti/menaati norma-norma bertindak tutur. Kedua unsur tersebut merupakan syarat minimal untuk dipedomani oleh pelaku tutur.

Bagi masyarakat Indonesia yang memiliki nilai dan budaya kesopanan, bukan saja tuturan yang dilibatkan, melainkan gerak anggota tubuh pun ikut terlibat (mengikuti etika berkomunikasi). Seperti, orang yang lebih tua menjadi penutur pertama. Dengan perkataan lain, dalam berkomunikasi, orang yang lebih tua yang menjadi pembicara pertama.

Pendekatan komunikatif mempunyai pandangan yang bersifat fungsionalistik tentang bahasa. Paham fungsionalistik melihat bahasa bukan sekadar kode seperti halnya pandangan formalistik, melainkan lebih jauh daripada itu. Pendekatan tersebut mencoba melihat untuk apa bahasa itu dan bagaimana digunakannya dalam komunikasi.

Kedua pendekatan di atas berbeda dalam memandang bahasa, seperti dikemukakan oleh Dik (1978) sebagai berikut.

1. Formalistik

- a. Formalistik cenderung menganggap bahasa merupakan fenomena mental.
- b. Formalistik cenderung menerangkan kesemestaan bahasa sebagai penjelmaan warisan kekerabatan linguistik secara umum yang dimiliki manusia.

- c. Formalistik lebih tertarik untuk menerangkan pemerolehan (*acquisition*) bahasa anak-anak dalam kaitan dengan kemampuan kodrati manusia dalam belajar bahasa.
 - d. Formalistik meneliti bahasa sebagai sistem yang otonom.
2. Fungsionalistik
- a. Fungsionalistik cenderung melihat bahasa sebagai fenomena sosial.
 - b. Fungsionalistik cenderung menerangkan hal tersebut sebagai penjelmaan kesemestaan penggunaan bahasa dalam masyarakat manusia.
 - c. Fungsionalistik lebih tertarik untuk menerangkan hal tersebut dalam rangka pengembangan kebutuhan dan kemampuan komunikatif anak-anak dalam masyarakat.
 - d. Fungsionalistik meneliti bahasa dalam hubungan dengan fungsi sosialnya.

Teori gramatika formal dengan tokoh-tokohnya, misalnya Chomsky (1965) mendefinisikan bahasa sebagai seperangkat kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat ini mempunyai makna dan ucapan. Sebagai akibatnya, tata bahasa harus menetapkan perangkat penggambaran yang memperlihatkan keterkaitan makna pada ucapan.

Aliran Tata Bahasa Generatif Transformasional (TGT) menganggap bahasa merupakan fenomena mental dan kreatif. Fenomena mental merefleksikan kemampuan penutur terhadap bahasanya. Kemampuan diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki penutur terhadap bahasanya. Kemampuan inilah sebagai suatu nilai untuk mengontrol perbuatan bahasa, yaitu pemakaian bahasa dalam keadaan sebenarnya.

Bahasa adalah fenomena kreatif. Batasan ini mempunyai maksud bahwa manusia tidak dibatasi oleh peniruan terhadap tuturan yang pernah didengar sebelumnya (secara kebetulan). Seorang penutur mempunyai kesanggupan menggunakan sejumlah kombinasi kata dan frase untuk membentuk kalimat yang sama sekali baru, tidak berdasarkan pada tuturan yang sudah muncul sebelumnya.

Bahasa selalu komunikatif ditujukan atau diarahkan kepada seseorang yang diharapkan menerima pesan. Selanjutnya, penerima pesan dapat berupa penerima nyata (*actual*) maupun penerima yang dimaksudkan (*intended*). Tuturan yang keluar dari mulut dua orang yang terlibat silang tutur, seperti pemberian khotbah nikah mempunyai penerima nyata.

Tuturan yang dihasilkan oleh seseorang di luar peristiwa bahasa, seperti tulisan pada pesta pernikahan “Mohon doa restu” memiliki penerima juga. Penerima pada tulisan tersebut bukan penerima nyata melainkan penerima yang dimaksudkan. Contoh lain pada kata “Awat” yang ditulis di jalan raya. Kata ini mempunyai penerima dimaksudkan yang terdiri atas orang-orang berkendara motor atau mobil yang terbiasa dengan kecepatan tinggi.

Berbeda dengan komunikasi binatang, penelitian terhadap komunikasi linguistik agak kompleks sifatnya. Letak kesulitannya adalah penerima harus tanggap memproses secara mental kalimat-kalimat yang memantulkan berbagai karakteristik struktural yang muskil dari bahasa manusia (seperti makna ganda). Model pesan yang dipakai untuk menjelaskan komunikasi pada umumnya dianggap mempunyai kelemahan untuk menerangkan komunikasi *verbal* manusia karena tidak dapat menjelaskan hal-hal: penggunaan ekspresi yang bermakna ganda, referensi dunia nyata, maksud komunikatif kalimat, komunikasi yang nonliteral, komunikasi hal tidak langsung, dan penggunaan yang tidak komunikatif bahasa.

Berikut ini akan dijelaskan kekurangan model pesan tersebut satu persatu. Pertama, banyak ungkapan yang bermakna ganda yang mengharuskan pendengar menetapkan mana di antara kemungkinan itu yang dimaksud pembicara. Sebagai contoh, “Istri sopir yang muda itu”. Ini dapat berarti sopir muda yang mempunyai istri. Selain itu, juga dapat berarti istri muda milik sopir. Untuk mengatasi masalah ini pendengar mencoba menduga ketetapan tuturan pembicara secara kontekstual.

Kedua, referensi dunia nyata. Sering suatu pesan memiliki informasi yang susah diterka karena tidak sesuai dengan arti ekspresinya, seperti bintang lapangan dalam kalimat “Bintang lapangan

dikerumuni oleh penggemarnya”. Kalimat seperti itu dapat digunakan dalam kesempatan yang berbeda dan terhadap orang yang berbeda, dapat dikenakan kepada bintang sepak bola Zidane atau bintang tinju Hopkind, atau bintang olah raga lainnya. Pendengar yang mengarahkan pikiran ke Zidane ketika pembicara bermaksud menginformasikan Hopkind tidak akan mengerti pesan itu dengan benar. Oleh karena itu, model pesan tersebut harus dilengkapi oleh mekanisme pengenalan tentang maksud yang dituju.

Ketiga, maksud komunikatif kalimat. Suara kakatua yang meniru ucapan tuannya, pita rekaman, dan pembicaraan orang sedang tidur/mimpi adalah termasuk model pesan tetapi tidak dapat dianggap komunikasi linguistik. Apa yang kurang dalam ucapan seperti itu adalah maksud komunikatif pembicara. Di samping itu, maksud komunikatif pembicara tidak selamanya ditetapkan oleh arti ekspresi yang diucapkan. Kalimat “Insya Allah, saya akan menemuimu besok” tidak selamanya mempunyai maksud komunikatif seperti ekspresinya, janji. Ia dapat mempunyai maksud komunikatif berupa ancaman atau ramalan. Komunikasi dapat berjalan lancar jika pendengar mengetahui maksud komunikatif pembicara.

Keempat, komunikasi yang nonliteral. Orang sering berbicara secara nonliteral, artinya ia mempunyai maksud yang berbeda dengan kata-kata yang terucapkan. Hal seperti ini umum dalam sindiran, sarkasme, dan dalam penggunaan figuratif. Pembicara yang berkata: “Bagus sekali, ya!” dalam situasi tertentu kadang-kadang mempunyai maksud yang bertentangan dengan kata-kata yang terucap tadi atau arti literalnya.

Kelima, komunikasi tidak langsung (*indirect communication*). Model pesan tidak dapat menjelaskan kenyataan bahwa sering orang mengomunikasikan hal yang melampaui maksud suatu kalimat. Dengan perkataan lain, orang biasa berbicara secara tidak langsung. Tidak jarang orang melakukan suatu tindak komunikatif dengan maksud suatu tindak komunikatif lain. Seorang suami berkata kepada istrinya yang sedang sibuk mengurus pernikahan di halaman pada hari senja: “Belum ada apa-apa di meja makan, Ma” dengan maksud agar isterinya menghidangkan

makanan; pendengar diharapkan berhenti sebentar dari pekerjaan mengurus pernikahan dan melakukan hal lain. Pembicara melaporkan secara langsung keadaan meja makan yang masih kosong pada saat jam makan masuk dan secara tidak langsung meminta istrinya berbuat sesuatu, yaitu menyiapkan makanan. Agar komunikasi ini bersambung, pendengar harus mampu membedakan tuturan yang langsung dan tidak langsung. Hal yang menjadi kunci keberhasilan komunikasi di sini adalah ketepatan konteks.

Keenam, penggunaan nonkomunikatif bahasa. Mengomunikasikan suatu pesan sering tidak “match” tentang apa yang menjadi maksud pernyataan. Misalnya membuat pernyataan yang sudah melembaga: pemecatan, pelantikan, pernikahan yang bertujuan mengubah status seseorang. Dalam hal ini orang tidak perlu mengetahui maksud komunikatif tindakan tersebut. Pernyataan: “Saya nikahkan Anda dengan si A...” dari penghulu atau imam tidak sekedar menginformasikan peristiwa itu melainkan mengubah status pendengarnya menjadi suami. Oleh karena itu, model pesan dalam komunikasi linguistik perlu ditunjang oleh model inferensial. Model inferensial merupakan model yang dapat menghubungkan antara pesan dengan arti pernyataan yang diucapkannya dengan serangkaian inferensial (cara memahami). Model ini mencakup beberapa strategi inferensial, dan jika diikuti maka pendengar dapat memahami hubungan ucapan yang didengarnya.

Model inferensial komunikasi mempunyai prinsip bahwa dalam proses belajar menggunakan bahasa, seseorang harus memahami juga bagaimana mengomunikasikan dalam bahasa tersebut. Selanjutnya, belajar berkomunikasi dalam suatu bahasa mencakup juga pemerolehan berbagai kesamaan pendapat atau praduga yang dimiliki bersama serta strategi inferensial.

Praduga membuat orang berpandangan optimis tentang pendengar yang potensial (atau pembicara yang potensial). Jenis-jenis praduga di sini adalah: pendengar adalah orang yang mengerti pembicaraan (praduga linguistik), pembicara akan berbicara dengan suatu tujuan komunikasi (praduga komunikasi), pembicara akan

berbicara literal (praduga literal). Strategi inferensial mengacu pada komunikasi yang bersifat ringkas dari hal yang diucapkan ke hal yang coba dikomunikasikan.

Bahasa dirancang untuk tujuan komunikasi, dibuktikan oleh kenyataan bahwa berbagai ciri bahasa dirancang dan diubah dari waktu ke waktu, serta bervariasi dari satu tempat ke tempat lain untuk memudahkan komunikasi. Ada beberapa ciri bahasa yang dirancang untuk mendapatkan kemudahan, seperti bentuk-bentuk hiperkorek.

Bentuk “sapa” misalnya, adalah salah satu ciri yang mementingkan pendengar dengan tujuan mencapai kemudahan dalam komunikasi. Keperluan komunikasi menyebabkan timbulnya berbagai struktur kalimat, seperti kalimat deklaratif, interogatif, dan negatif. Oleh karena itu, terdapat anggapan yang mengatakan bahwa tidak sedikit hal-hal dalam struktur bahasa yang hanya dapat dijelaskan dengan melihat perkembangannya dalam memenuhi fungsi komunikatif dalam interaksi langsung. Huruf melambangkan bunyi, kata melambangkan arti, kalimat melambangkan pesan, dan wacana melambangkan pokok pikiran.

Wacana dialog atau wacana percakapan dapat dibagi dua macam, yakni percakapan sesungguhnya (*real conversation*) dan percakapan berdasarkan teks. Percakapan melibatkan dua atau lebih pelaku. Kejadiannya dapat berbentuk secara sengaja dan spontanitas. Percakapan tercipta dari pola kesamaan penutur dengan mitra tutur. Kesamaan yang dimaksud yaitu: penggunaan bahasa, lokasi terjadinya percakapan, dan kerja sama kedua belah pihak.

Bentuk lain percakapan seperti pada teks drama, film, percakapan lewat telepon, dan bentuk percakapan yang ditulis menjadi teks yang kemudian dijadikan percakapan. Percakapan seperti yang disebutkan di atas merupakan aktivitas rutinitas kebahasaan. Dengan perkataan lain, manusia selalu menggunakan komunikasi dialog sebagai salah satu aplikasi bahasa yang merupakan bagian dari hidupnya.

Percakapan jenis pertama tidak merupakan percakapan imitasi atau penghafalan yang kemudian dijadikan percakapan, tetapi betul-betul memerlukan percakapan spontan dengan semua situasinya serta

memerlukan tatap muka sesungguhnya. Tatap muka sesungguhnya seperti ini dinamakan *interlocutor atau service encounter*.

Percakapan jenis kedua merupakan kebalikan dari jenis yang pertama. Percakapan jenis kedua ini yaitu suatu percakapan imitasi. Teks itu dilatihkan sebagai bahan percakapan. Aktivitas percakapan ini memiliki kesamaan. Persamaannya yaitu menghadirkan dua pelaku atau lebih sehingga terjadi tatap muka. Tetapi kalau teks itu tidak dipercakapkan maka tatap muka tidak diperlukan. Lingkungan terjadinya percakapan biasanya diatur, sehingga penonton terbawa seakan-akan itu terjadi sesungguhnya.

Dalam konteks lain, dialog tidak selalu diartikan dengan percakapan antara dua orang, tetapi diartikan dengan dua belah pihak yaitu pihak pembicara dan pendengar yang menurut kesempatannya dapat berganti fungsi secara bergiliran. Artinya, pada kesempatan pertama pihak A berperan selaku pembicara. Sedangkan pada kesempatan berikutnya pihak B yang berperan sebagai pembicara dalam percakapan tersebut. Demikian seterusnya mereka saling bercakap sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan pengertian dua belah pihak seperti ini, maka orang yang terlibat di dalam suatu percakapan mungkin hanya terdiri atas dua orang, mungkin juga lebih dari dua orang. Berbeda dengan percakapan melalui telepon seperti berikut ini:

Maha : Assalamu'alaikum.

Nilakanti : Walaikumussalam.

Maha : Santabe cou ake?

Nilakanti : Mada Nilakanti.

Maha : Iyo bune haba saraana weki?

Nilakanti : Haba taho mena. Santabe wara dua Hejo kombi?

Maha : Hejo re waura lao di uma dou ma nika. wara au kombi?

Nilakanti : Nee ngoa naise wara doa ara uma.

Maha : Nahu mpa ma ngoa peare.

Nilakanti : Santabe aina toi newa ta.

Maha : Insya Allah nahu mpa ma ngoana.

Nilakanti : Ede wau mpa. Assalamu'alaikum.

Maha : Walaikumussalam.

Bentuk percakapan di atas dalam bahasa Bima. Komunikasinya terasa cair karena didukung oleh penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks budaya Bima. Mereka melakukannya melalui serangkaian peristiwa. Diawali dengan penyapaan, kemudian saling tukar informasi, dan penutupan percakapan. Mereka menyempurnakan percakapan dengan menjawab pertanyaan secara bergiliran (*adjacency pair turn by turn*).

Tidak semua *setting* dalam percakapan sama. Seperti diungkapkan oleh Fillmore (1981) "*The language of face to face conversation is the basic and primary use of language, all others being best described in terms of their manner of deviation from that base.*" Penggunaan bahasa dalam percakapan ibarat musik, mengandung unsur tema dan variasi-variasinya. Begitu pula dalam percakapan tatap muka (*face-to-face*), tema, retorika, penyampaian, dan dinamikanya seperti apa. Percakapan tatap muka merupakan buaian pemakaian bahasa. Clark dan Brennan (1991) memberikan ciri-ciri percakapan tatap muka dengan menyebutkan *nonbasic settings*, seperti di bawah ini.

- | | |
|------------------------|--|
| <i>Copresence:</i> | Partisipan saling menunjukkan suasana lingkungan yang berindikasi untuk terjadinya percakapan. |
| <i>Visibility:</i> | Partisipan dapat melihat satu dengan yang lain. |
| <i>Audibility:</i> | Partisipan dapat mendengarkan/menyimak satu dengan yang lain. |
| <i>Instantaneity:</i> | Partisipan menerima tiap-tiap aksi yang mereka lakukan tanpa penundaan. |
| <i>Evanescessness:</i> | Tuturan dengan sendirinya hilang dan muncul dengan medium. |
| <i>Recordlessness:</i> | Tindakan/aksi partisipan meninggalkan tanpa jejak atau benda. |
| <i>Simultaneity:</i> | Partisipan dapat memproduksi dan menerima tuturan dalam waktu bersamaan atau keserempakan dan berkelanjutan. |

<i>Extemporaneity:</i>	Partisipan memformulasikan dan mengeksekusi aksinya tanpa persiapan secara nyata.
<i>Self-determination:</i>	Partisipan menentukan tindakan/aksi apa dan kapan tindakan itu dilakukan.
<i>Self-expression:</i>	Partisipan melakukan tindakan sebagaimana adanya.

Ciri 1 sampai 4 merefleksikan kesiapan dan kesegeraan dalam melakukan percakapan tatap muka. Pada *setting* ini, partisipan dapat melihat dan mendengar secara langsung satu dengan yang lain, termasuk lingkungan sekitar terjadinya percakapan tanpa ada intervensi. Pada prosesi akad nikah, penutur harus membatasi aksesnya kepada pendengar. Pembatasan yang dimaksud adalah bentuk tuturan harus jelas, tidak bertele-tele dan dapat diterima oleh pendengar tanpa keluhan yang berimplikasi terhadap hilangnya pesan yang disampaikan.

Ciri 5 sampai 7 merefleksikan medium. Khotbah nikah, bahasa isyarat, dan tatapan mata merupakan medium yang menimbulkan kesan pada pendengar. Khotbah nikah biasanya tidak direkam dengan alasan tertentu, misalnya pihak yang berhajat tidak memiliki biaya yang cukup untuk membeli atau menyewa alat tersebut. Apabila direkam, khotbah nikah itu hasilnya sangat berbeda, ketika pendengar dihadapkan pada suasana lain.

Ciri 8 sampai 10 harus dilakukan dengan kontrol. Penutur dan mitra tutur dalam melakukan aksi percakapan tatap muka, saling jaga dan memperhatikan etika percakapan. Siapa yang memulai dan bagaimana menyampaikannya kepada mitra tutur sehingga partisipan dapat menikmati interaksi mereka dengan sukses. Tidak saling menginterupsi, tuturan tidak berlebihan, dan jawaban dengan “uh huh”. Faktor tersebut dapat merugikan kedua belah pihak.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa percakapan tatap muka merupakan *basic setting* pemakaian bahasa. Proses terjadinya bersifat umum, tidak memerlukan latihan khusus (*special training*), dan penting dalam pemerolehan bahasa pertama bagi

seseorang. Dengan perkataan lain, percakapan tatap muka merupakan salah satu unsur penting bagi seseorang dalam mempelajari suatu bahasa.

Latar (*setting*) memerlukan teknik atau praktik khusus seperti yang terjadi dalam drama atau film. Hal ini dilakukan karena kurangnya kesiapan yang dimiliki oleh eksekutor. Begitu pula dalam mengontrol emosi ketika percakapan tatap muka sedang berlangsung. Dengan demikian, akan tercipta suasana percakapan yang nyata, meskipun itu adalah rekayasa yang sudah didesain sedemikian rupa oleh sutradara.

Richards (1982) mengemukakan hal-hal pokok yang menjadi perhatian analisis wacana percakapan, antara lain sebagai berikut.

1. Kerja sama partisipan percakapan.
2. Tindak tutur (*speech act*).
3. Penggalan pasangan percakapan (*adjacency pairs*).
4. Pembukaan dan penutupan percakapan.
5. Pokok pembicaraan (*topic*).
6. Giliran bicara (*turn talking*).
7. Percakapan lanjutan (*repairs*).
8. Sifat rangkaian percakapan.
9. Unsur tata bahasa percakapan.

Semua unsur tersebut akan dibicarakan berurutan berikut ini sebagai landasan kegiatan analisis yang sesungguhnya. Uraian akan dilakukan dengan cara penyajian contoh terlebih dahulu.

Dalam melakukan suatu aktivitas, manusia senantiasa berusaha menciptakan lingkungan komunikasi yang kondusif. Tiap–tiap pelaku harus menyadari dan melakukan sesuatu untuk mendapatkan kesan positif, baik penutur maupun mitra tutur. Koordinasi dan kerjasama partisipan merupakan kunci kesuksesan dalam berkomunikasi. Sikap tutur yang ditampilkan mencerminkan adanya indikasi saling menghargai antara penutur dengan mitra tutur.

Sebuah percakapan, terutama percakapan sesungguhnya (*real conversation*) akan terwujud apabila ada kerjasama semua orang yang terlibat di dalam percakapan tersebut. Kerja sama yang dimaksud di sini adalah keterlibatan membentuk suatu percakapan lengkap. Dengan

perkataan lain, fungsi kerja sama disini adalah dalam rangka membentuk peristiwa tutur (*speech event*) menurut istilah Hyme. Peristiwa tutur adalah seluruh kegiatan berbentuk bahasa atau pendukung bahasa yang membentuk percakapan.

Ada tidaknya kerja sama ini dapat diketahui secara langsung pada percakapan sesungguhnya, ketika percakapan itu sedang berlangsung. Sementara pada wacana dialog yang berbentuk teks dapat diketahui pada rangkaian tuturan yang terdapat di dalam penggalan pasangan percakapan pada teks tersebut.

Meremehkan kerja sama di dalam wacana percakapan berarti tidak mewujudkan percakapan. Hal ini berarti tidak terjadi peristiwa tutur. Oleh karena itu unsur ini menjadi salah satu sasaran pada kegiatan analisis wacana percakapan. Sebagai contoh sederhana dapat dilihat pada kedua penggalan pasangan percakapan berikut ini.

1. A: Di mana acara akad nikah itu?
B: (Dan saya tidak menghiraukan).
2. A: Jam berapa acara akad nikah itu?
B: Kamu naib? Saya mengikutinya di masjid.

Dari kedua contoh tersebut, ternyata contoh pertama tidak menunjukkan adanya kerja sama karena tuturan yang digunakan oleh B tidak ada hubungannya dengan yang diucapkan oleh A. Sementara contoh kedua menunjukkan adanya kerja sama karena tuturan B masih ada hubungan dengan ucapan A, sekalipun tidak menjawabnya secara langsung.

Unsur kerja sama dengan percakapan ini dinamakan maksim oleh Grice (1975). Ia membagi maksim tersebut atas empat sifat.

1. *Maksim kuantitas*. Kerja sama berbentuk jawaban yang informatif atau berupa jawaban yang belum pasti. Contoh:
A : Ke mana kakakmu?
B : Kalau tidak ke Bandung, ke Bogor.
2. *Maksim kualitas*. Kerja sama dengan bentuk jawaban yang sesuai. Contoh:
A : Mau ke mana Ali?
B : Saya mau ke tempat pernikahan.



3. *Maksim relasi.* Kerja sama dengan bentuk jawaban yang belum sesungguhnya, bergantung interpretasi penanya. Contoh:

A : Saya kehabisan bensin motor.

B : Di sudut jalan itu ada toko.

Apabila menafsirkan jawaban B sesuai dengan pertanyaannya, maka A akan pergi ke sudut jalan yang dimaksud. Ternyata toko itu sudah tutup dan bukan toko lagi. Karena itu B kembali kepada A dan berkata:

A : Kamu katakan bahwa saya dapat membeli bensin motor di toko itu.

B : Tidak. Saya hanya mengatakan bahwa di sudut jalan itu ada toko.

Saya juga tidak mengatakan jenis toko apakah di sudut jalan itu.

Kalau cara menjawab seperti B itu bersumber dari kebiasaannya, maka terjadilah maksim keempat.

4. *Maksim cara.* Kerja sama berbentuk jawaban yang tidak langsung menjawab pertanyaan karena kebiasaan. Contoh:

A : Bagaimana caramu menemukan pernikahan Azhar?

B : Jalanya lurus.

Penutur berusaha agar mitra tuturnya memahami apa yang dimaksudkannya. James (1957) menyebutnya "*How to do things with words*". Sementara Austin (1962) menyebutnya "*How to do things with utterances*". Keduanya mengusulkan teori umum tentang tindak tutur yang dilakukan orang dalam berkomunikasi. Tindakan khusus yang kita ambil, lanjut Austin, dirancang agar mitra tutur atau pendengar melakukan hal yang sesuai dengan keinginan penutur dan pemahaman pendengar.

Konteks di atas, dapat diilustrasikan dalam acara akad nikah seperti berikut ini, antara pengantin lelaki dengan pembawa acara (pambiwara).

1. Saya memintanya "Silakan memakai peci?" Pengantin lelaki menjawab "Ya" dan memakainya.
2. Saya bertanya kepadanya "Apa yang sedang Anda lakukan?" Pengantin lelaki menjawab "Sedang siap-siap untuk berangkat."

3. Saya mengatakan kepadanya “Ini adalah tulisan untuk dihafal ketika sedang dilangsungkan ijab Kabul” Pengantin lelaki percaya kepada saya dan mulai menghafalnya.
4. Saya peringatkannya “Pa naib datang” Pengantin laki percaya dan mulai degdegan.

Pengantin lelaki menjawab dan melakukan semua apa yang ditanyakan dan diperintahkan oleh pambiwara. Semua peristiwa berjalan dengan lancar disebabkan adanya pemahaman yang sama antara keduanya. Dalam istilah Austin menyebutnya pengaruh perlokusen.

Tindak tutur (*speech act*) merupakan bagian dari peristiwa tutur (*speech event*). Kalau peristiwa tutur itu dalam bentuk praktis adalah wacana itu sendiri, seperti sebuah percakapan, pidato, surat dan lain-lain, maka tindak tutur merupakan unsur pembentukannya sebagai “*the things we actually do when we speak*” artinya adalah sesuatu yang kita lakukan dalam rangka berbicara atau suatu unit bahasa yang berfungsi di dalam sebuah percakapan, dinamakan tindak tutur.

Tindak tutur ilokuse memiliki banyak jenis, antara lain: pernyataan, penekanan, permintaan, penyuruhan, bertanya, berjanji, memaafkan, berterima kasih, baiyat. Dalam bahasa Inggris ada lebih dari 150 ilokuse (Verschueren, 1980). Apakah ada bentuk suruhan selain yang disebutkan tadi? Tentu ada seperti diungkapkan oleh Searle (1975).

Tindak tutur ini jenisnya sangat banyak, ribuan menurut Austin, yang kemudian disederhanakan menjadi lima kelompok, seperti berikut.

1. Assertive

Tindakan ini berusaha agar pendengar memperhatikan dan percaya apa yang dituturkan dan didengarnya. Ketika pambiwara mengatakan “Kedua mempelai datang”, dia sedang berusaha untuk meyakinkan kepada hadirin yang datang dan melihatnya. Bentuk asli *assertive* adalah pernyataan tegas, tetapi kategorisasinya dapat berupa diagnosa, prediksi, notifikasi, pengakuan, penolakan, pembantahan, jawaban, pengandaian.

2. *Directive*

Tindakan agar audiens melakukan sesuatu. Ketika pamiwara meminta pengantin lelaki untuk mengenakan peci, pamiwara tersebut sedang berusaha agar pengantin lelaki melakukannya sesuai dengan permintaannya. *Directive* ada dua jenis. Jenis pertama adalah permintaan untuk melakukan suatu tindakan, seperti, perintah dan usulan. Jenis kedua adalah bersifat informatif, seperti “Apa yang sedang Anda lakukan?” pamiwara hanya mengharapkan informasi .

3. *Commissive*

Jenis ini mengacu kepada komitmen penutur terhadap tindakan ke depan atau yang akan datang. Sifat dasarnya (*prototype*) adalah perjanjian. Seperti dalam ikrar pengantin lelaki “Saya akan bertanggung jawab dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri”. Pernyataan ini merupakan janji yang mungkin muncul dalam hati nuraninya atau sekedar ucapan yang bersifat penawaran kerelaan dirinya dihadapan orang banyak.

4. *Expressive*

Inti dari *expressive* adalah ucapan atau tuturan berdasarkan perasaan tertentu, seperti ucapan terima kasih kepada hadirin yang telah memberikan doa restu kepada kedua mempelai, ucapan permohonan maaf dari keluarga yang berhajat, dan penyapaan sebagai ungkapan keramahan dan kegembiraan kepada audiens. Ungkapan lain sering dijumpai dalam peristiwa umum di Indonesia adalah molornya waktu. Peristiwa ini bukan saja pada acara resmi (hadirin datang berdasarkan undangan yang diterimanya) melainkan juga tidak resmi secara lisan, seperti saya datang jam 10 pagi.

5. *Declarative*

Jenis yang terakhir ini dilakukan oleh institusi, seperti institusi hukum, dan permainan yang terorganisir. Melalui institusi ini penutur dapat memainkan peranannya dalam rangka untuk menciptakan iklim yang baik. Seperti hakim yang berperanan untuk menghukum pelaku yang terbukti bersalah. Wasit sepak bola memberikan hukuman yang

beragam tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pemain tersebut, mulai dari kartu kuning sampai kartu merah dan keluar dari lapangan pertandingan. Naib yang menyatakan sah dalam ijab kabul.

Declarative dalam konteks ini terdiri atas dua jenis, yaitu *Effective Declaration* dan *Verdictive Declaration*. *Declarative* jenis pertama (efektif) mengacu kepada penciptaan suasana institusi. Di suatu perusahaan, seorang direktur mengangkat seseorang sebagai staf ahli. Di pengadilan, seorang hakim membebaskan hukuman kepada tersangka atau mengabulkan permohonan cerai dari pihak istri selaku pemohon. Polisi melakukan penilangan terhadap pengendara motor yang tidak memiliki surat ijin mengemudi. Dalam konteks ini, terlihat konkret tuturan yang disampaikan oleh pemegang kekuasaan atau jabatan untuk merubah suatu keadaan. Dengan mengucapkan “Dengan ini saya nyatakan Anda telah bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara selama 20 tahun”. Tuturan harus sesuai dengan kondisi dan suasana di mana peristiwa sedang berlangsung.

Jenis kedua adalah *verdictive* yang mengacu kepada suatu ketentuan atas apa yang terjadi atau ada masalah apa dalam suatu institusi. Dalam pertandingan sepak bola seorang wasit yang menentukan bola menyentuh tangan atau keluar lapangan, padahal bola tidak menyentuh tangan dan tidak keluar lapangan, tetapi karena dalam koridor permainan maka semuanya berjalan. Contoh lain (*verdictive*) editor jurnal yang menerima dan menolak artikel untuk diterbitkan. Berikut ini adalah skema ringkas tentang tindak tutur ilokusen dalam bahasa Inggris yang dikutip dari Clark (1997).

<i>Illocutionary act</i>	<i>Illocutionary point</i>
<i>Assertives</i>	<i>to get the addressee to form or attend to a belief</i>
<i>Directives</i>	<i>to get the addressee to do something</i>
<i>Commissives</i>	<i>to commit the speaker to doing something</i>
<i>Expressive</i>	<i>to express a feeling toward the addressee</i>
<i>Effectives</i>	<i>to change an institutional state of affairs</i>
<i>Verdictives</i>	<i>to determine what is the case in an institution.</i>

Sementara dalam teori lain, seperti yang dikemukakan oleh Searle (1975) mengatakan bahwa tingkat tutur terdiri atas lima, yaitu:

1. Tindak representatif

Tindak representatif yaitu tindakan yang berfungsi menetapkan atau menjelaskan apa dan bagaimana sesuatu itu adanya. Yang termasuk kelompok ini diantaranya: tindakan, menyatakan, mengemukakan, menjelaskan, menuntut, mengikrar, menunjuk, memonitor, mengira.

2. *Commissive act*

Commissive act yaitu suatu tindakan yang berfungsi mendorong pembicara melakukan sesuatu seperti: tindak berjanji, bersumpah, berkewajiban, dan bernazar.

3. *Directive act*

Directive act yaitu suatu tindakan yang berfungsi mendorong pendengar untuk melakukan sesuatu seperti: mengusulkan, memohon, mendesak, menentang, memerintahkan dan sejenisnya. Untuk mewujudkan tindak tutur ini secara maksimal, Fraser menyodorkan strategi dasar yaitu penyentuhan perasaan lawan bicara terhadap hal-hal yang menyangkut: tanggung jawab moral (*moral obligation*), saling membutuhkan (*mutual cooperation*), kesehatan/keselamatan (*well-being*), rasa bangga/harga diri (*pride*), kaitan status diri (*lack of status*), dan rasa gentar khawatir (*fear*).

4. *Expressive act*

Expressive act yaitu tindakan yang menyangkut perasaan dan sifat seperti: tindakan meminta maaf, berterima kasih, mengadukan, menyampaikan ucapan selamat, mengeritik, memberikan penghargaan, memuji dan lain-lain.

5. *Declarative act*

Declarative act yaitu suatu tindakan yang berfungsi memantapkan, membenarkan sesuatu tindak tutur yang lain. Tindak tutur ini disebut juga *establishive acts*, seperti: “Apakah kamu setuju?” lalu dijawab dengan “setuju”. Tindak tutur dengan model pertanyaan dan jawaban sering terjadi. Contoh dalam perkuliahan, seorang dosen bertanya kepada mahasiswanya tentang materi yang disampaikan.

Pengelompokan lebih lanjut dilakukan atas tinjauan segi sifat hubungan tindak tutur (Fraser, 1978). Dari segi ini, tindak tutur dibagi atas: *locutionary act*, *illocutionary act*, dan *perlocutionary act*. Ketiga jenis tindak tutur tersebut memiliki orientasi yang berbeda, seperti pada penjelasan berikut.

1. *Locutionary act*

Tindak tutur yang berhubungan dengan mengatakan sesuatu (*an act of saying something*) dinamakan *the locutionary act*. Contoh: “Awas ada strom listrik dekat panggung!”

Selanjutnya oleh Bach dan Harnish, *locutionary act* diperinci menjadi lima macam berdasarkan bidang-bidang:

- a. *Hukum/perundang-undangan*, seperti: membebaskan, menunda, menuntut, memutuskan.
- b. *Keagamaan*, seperti: memberkati, merestui, mendoakan.
- c. *Bisnis*, seperti: menyewa, membayar, mengembalikan.
- d. *Pemerintahan*, seperti turun tahta, tanggung jawab, memveto.
- e. *Olah raga*, seperti: gol, kalah, menang, dan seri.

2. *Illocutionary act*

Tindak tutur yang berkaitan dengan perbuatan dalam hubungan dengan mengatakan (*an act of doing in saying something*). Tindak tutur ini dinamakan *illocutionary act*. Contoh: “Saya menentang keputusan keputusan itu.”

Tindak tutur yang menimbulkan akibat karena adanya suatu tindakan dalam mengatakan sesuatu (*an act of some effect because of doing something in saying something*). Tindak tutur ini dinamakan *perlocutionary act*. Contoh: “Alarm!! Alarm!!”

Penjelasan akibat adanya teriakan alarm semua orang berlari ke tempat perlindungan.

Selanjutnya, ditinjau dari segi hakikat pemakaiannya, tindak tutur terbagi menjadi tindak tutur sopan santun (*politeness*), tindak tutur penghormatan (*deference*), tindak tutur anggap enteng/tidak menghiraukan/*migitation* (Fraser, 1978).

1. Tindak tutur sopan santun (*politeness*)

Tindak tutur ini biasanya dijumpai pada percakapan pertama pada orang-orang yang baru berkenalan. Pada saat itu, kedua belah pihak menunjukkan tindak dan sifat saling menghormati dan menggunakan tutur yang seimbang pula, misalnya dengan sambil membungkuk sedikit seseorang menanyakan:

A: Maaf Pak, saya mengganggu sebentar. Apakah di sini rumah H. Abdullah yang punya hajatan pernikahan anaknya?

B: Oh, ya, betul. Silahkan masuk.

Kadang-kadang tindak tutur ini dijumpai pada situasi yang tanpa diduga. Misalnya seseorang berkunjung pada temannya atau orang yang kebetulan sedang makan. Maka terwujudlah tutur sopan santun seperti:

A: Kami sedang makan. Mari makan dengan kami (hanya ajakan).

B: Terima kasih. Saya sudah makan.

Tindak tutur penghormatan biasanya dijumpai pada situasi percakapan antara kedua belah pihak yang berbeda status sosialnya. Misalnya antara murid dengan guru. Guru cenderung menggunakan tindak tutur yang biasa dan santai sedangkan murid dengan tindak tutur sopan. Contoh:

A: Saya permisi dahulu, pak.

B: Baik. Jangan sampai jatuh surat undangan nikah itu.

A: Ya, pak akan saya jaga baik-baik.

Daftar Pustaka

Alwasilah, A.C. (2000). *Perspektif Pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia dalam Konteks Persaingan Global*. Bandung: Andira.

Bakhtin, M.M. (1981). *The Dialogic Imagination: Four Essays*. Austin: University of Texas Press.

Bauman, R. & Sherzer, J. (1974). *Explorations in the Ethnography of Speaking*. Cambridge: Cambridge University Press.



Benson, P. (2001). *Teaching and Researching Autonomy in Language Learning*. England: Pearson Education Limited.

Brown, G & Yule, G. (1983). *Discourse Analysis*. Cambridge UP.

Cambell, D. T & Fiske, D. W. (1959). "Convergent and Discriminant Validation by the Multitrait-Multimethod Matrix" .

Chomsky, N. (1957). *Syntactic Structures*. Mouton: The Hague.

Clark, Herbert H. (1996). *Using Language*. Cambridge: Cambridge University Press.

Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Traditions*. London: Sage Publications; International and Professional Publisher Thousand Oaks.

Crystal, D. (1997). *The Cambridge Encyclopedia of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.

Fairclough, N. (1989). *Language and Power*. London: Longman.

Fraser, B. (1978). Acquiring Social Competence in a Second Language, *Journal*, 9(2).

Glaser, B. & Strauss, A. (1967). *The Discovery of Grounded Theory*. Chicago: Aldine.

Guba, E.G & Lincoln, Y.S. (1994). Comparing Paradigms in Qualitative Research. In N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (eds), *Handbook of Qualitative Research*, (pp.105-117). Thousand Oaks, CA: Sage.

Gumperz, J.J & Hymes, D. (1972). *Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication*. New York: Holt Rinehart and Winston.

Halliday, M.A.K. (1978). *Language as Social Semiotic*. London: Edward Arnold.

-----, (1976). *Cohesion in English*. London: Longman Group Lined.

Harris, Z. S. (1951). *Methods in Structural Linguistics*. Chicago: The University of Chicago Press.

Heath, S.B. (1983). *Ways With Words: Language, Life, and Work in Communities and Class-rooms*. Cambridge: Cambridge University Press.

Holmes, J. (2001). *An Introduction to Sociolinguistics*. England: Pearson Education Limited.

Horn, V. (1975). Teaching Locical Relationship in Written Discourse. *TESOL Quarterly*.

Howe, K & Eisenhardt, M. (1990). Standards for Qualitative Research: A Prolegomenon. *Educational Research*, 19(4): 2-9.

Huberman, A. M & Miles, M. B. (1994). *Data Management and Analysis Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Hymes, D. (1972). *The Ethnography of Speaking*. Dalam Gladwin dan Sturtevant (eds). *Antropology and Human Behavior*. Washington DC: Anthropological/Society of Washington.

-----, (1977). *Foundations in Sociolinguistics*. London: Tavistock.

Ibrahim, A.S. (1993). *Kajian Tindak Tutur*. Surabaya: Usaha Nasional.

Jack, R.F. (1981). *Helping Student Think*. New Jersey: Prentice Hall Inc.



- Kaseng, S. (1992) *Linguistik Terapan: Pengantar Menuju Pengajaran Bahasa yang Sukses*. Ujung Pandang: IKIP Ujung Pandang.
- Kridalaksana, H. (1983). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Labov, W. (1972). *Language in the Inner City*. Philadelphia: University of Philadelphia Press.
- Leech, G. (1993). *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. (Oka, M.D.D, Trans). Jakarta: UI Press.
- Levinson, S.C. (1987). *Pragmatics* (cet. ke-2). Cambridge: Cambridge University Press.
- Merritt, M. (1973). On Questions Following Questions in Service Encounters. *Language in Society*. Great Britain.
- Milroy, L. (1987). *Observing and Analysing Natural Language*. Oxford: Basil Blackwell Limited.
- Mukhlis, A. (2007). *One Size Can't Fit All: A Story of Malay Children Learning Literacy*. Dalam V. Vaish, Gopinathan S. & Y. Liu (Ed.). *Language, Capital, Culture: Critical Studies of Language in Education in Singapore*. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.
- Padmaningsih, D. (1996). Tindak Tutur dalam Akad Nikah Pengantin Jawa. Tugas Mata Kuliah pada Program Pascasarjana, Universitas Udayana.
- Phillips, S. (1972). *Participant Structures and Communicative Competence*. Dalam C.B. Cazden, D.H. Hymes, & V.D. John (Ed.), *Functions of Language in the Classroom*. New York: Teachers College Press.

- Sacks, H., Schegloff, E.A & Jefferson, G. (1973). A Simplest Systematics for the Organization of Turn Taking for Conversation. *Language*, 50(4).
- Samsuri. (1988). *Berbagai Aliran Linguistik Abad XX*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Sapir, E. (1921). *A Bird's Eye View of American Languages North of Mexico, Science, Development, Ethnography, and Education*. London: Longman.
- Searle, J. (1972). *What is a Speech Act: Language and Social Context*. Penguin.
- Schiffrin, D. (1994). *Approaches to Discourse*. Cambridge: Blackwell Publishers Inc.
- Syamsuddin, A.R. (1986). *Studi Wacana*. Bandung: IKIP Bandung.
- Soekanto, S. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumarlam. (2002). Wacana Bahasa Jawa dalam Akad Nikah. *Jurnal Penelitian Humaniora*.
- Trudgill, P. (2000). *Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society* (Edisi ke-4). London: Penguin Books.

**PENDIDIKAN *ENTREPRENEURSHIP*
BERBASIS KOMPETENSI BAHAN PANGAN
ALTERNATIF SORGUM (*SORGHUM SP*)**

**Endang Noerhartati¹, Toho Cholik Mutohir², Yoyok Soesatyo²,
Yatim Riyanto², Soedjarwo³, Moedjito³, Lusy Tunik
Muharlisiani⁴, Abdul Talib Bin Bon⁵**

¹Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas
Teknik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

¹Program Pasca Sarjana, Program Doktor Manajemen
Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

²Professor, Program Doktor Manajemen Pendidikan,
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

³Dosen, Program Doktor Manajemen Pendidikan, Universitas
Negeri Surabaya, Indonesia

⁴Program Studi Bahasa Inggris, Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya, Indonesia

⁴Program Pasca Sarjana, Program Doktor Manajemen
Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

⁵Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, Universiti
Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Johor, Malaysia
endang_noer@uwks.ac.id+endang.18006@mhs.unesa.ac.id
+toho.ditjora@gmail.com+yoyoksoesatyo@unesa.co.id+jati
mriyanto@gmail.com+soedjarwo9@gmail.com+ak.mudjito
@gmail.com+lusy_fbs@uwks.ac.id+lusy.18007@mhs.unesa.
ac.id+talibon@gmail.com

Pendahuluan

Pendidikan *entrepreneurship* adalah satu konsep pendidikan yang memberikan semangat pada peserta didik untuk kreatif dan inovatif

dalam mengerjakan sesuatu hal. Pola pendidikan yang demikian ini menuntut peserta didik untuk bisa produktif. Pendidikan *entrepreneurship* adalah sebuah pendidikan yang mengarahkan dan membekali peserta didik untuk bisa cepat dalam merespon perubahan dan memahami kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.

Entrepreneurship telah menjadi wahana penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kekuatan ekonomi secara keseluruhan. Apalagi dengan munculnya industri 4.0, berbagai kompetensi seperti kreativitas, inovasi, dan kepiawaian diperlukan untuk membangun bisnis *start-up*. Oleh karena itu, sebagian besar lembaga saat ini menyediakan program pelatihan *entrepreneurship* dengan keyakinan bahwa pentingnya kewirausahaan, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pengusaha dapat diajarkan. Pada saat yang bersamaan dukungan kebijakan Pemerintah terhadap pendidikan kewirausahaan telah meningkat di banyak negara di seluruh dunia. Dapat diperhatikan bahwa investasi dalam pendidikan kewirausahaan meningkat di semua program gelar dari sekolah dasar hingga Perguruan Tinggi untuk meningkatkan pemikiran kewirausahaan. Pendidikan wirausaha ini menjadi penting seiring dengan permintaan siswa mencari pendidikan bisnis yang dapat memberikan keterampilan yang diperlukan agar berhasil dalam lingkungan manajemen yang semakin beragam dan kompleks.

Pendidikan *entrepreneurship* berperan penting dalam lingkungan yang tidak pasti karena bisa mengembangkan wawasan yang diperlukan untuk menemukan dan menciptakan peluang bagi wirausahawan dan mendapatkan kemampuan untuk berhasil memulai dan mengelola bisnis mereka sendiri. Karena itu, universitas memiliki kesempatan menekankan pentingnya pendidikan *entrepreneurship* yang sistematis dan memainkan peran dalam melakukan pendidikan kewirausahaan profesional. Banyak universitas juga aktif mengejar berbagai macam perkembangan pendidikan sebagai bagian dari strategi mereka yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas program dan untuk mendorong pendidikan dan pembelajaran mahasiswanya. Banyak juga yang menawarkan paket kursus dan program yang terkait kewirausahaan

dengan tujuan memberikan motivasi dan kepercayaan kepada siswa serta agar berperan dan memberikan kontribusi sosial melalui kewirausahaan. Namun, pendapat tentang pendekatan mana yang efektif dan metode pengajaran mana yang tepat masih kontroversial.

Entrepreneurship telah menjadi wahana penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kekuatan ekonomi secara keseluruhan. Apalagi dengan munculnya industri 4.0, berbagai kompetensi seperti kreativitas, inovasi, dan kepiawaian diperlukan untuk membangun bisnis start-up. Oleh karena itu, sebagian besar lembaga saat ini menyediakan program pelatihan *entrepreneurship* dengan keyakinan bahwa pentingnya kewirausahaan, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pengusaha dapat diajarkan. Pada saat yang bersamaan dukungan kebijakan Pemerintah terhadap pendidikan kewirausahaan telah meningkat di banyak negara di seluruh dunia. Dapat diperhatikan bahwa investasi dalam pendidikan kewirausahaan meningkat di semua program gelar dari sekolah dasar hingga Perguruan Tinggi untuk meningkatkan pemikiran kewirausahaan. Pendidikan wirausaha ini telah menjadi penting seiring dengan permintaan siswa mencari pendidikan bisnis yang dapat memberikan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam lingkungan manajemen yang semakin beragam dan kompleks (Zoltan et al, 2018; Drucker, 1984; Congregado, 2008).

Pendidikan *entrepreneurship* berperan penting dalam lingkungan yang tidak pasti karena bisa mengembangkan wawasan yang diperlukan untuk menemukan dan menciptakan peluang bagi wirausahawan dan mendapatkan kemampuan untuk berhasil memulai dan mengelola bisnis mereka sendiri. Karena itu, universitas memiliki kesempatan menekankan pentingnya pendidikan *entrepreneurship* yang sistematis dan memainkan peran dalam melakukan pendidikan kewirausahaan profesional. Banyak universitas juga aktif mengejar berbagai macam perkembangan pendidikan sebagai bagian dari strategi mereka yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas program dan untuk mendorong pendidikan dan pembelajaran mahasiswanya. Banyak juga yang menawarkan paket kursus dan program yang terkait kewirausahaan

dengan tujuan memberikan motivasi dan kepercayaan kepada siswaserta agar berperan dan memberikan kontribusi sosial melalui kewirausahaan. Namun, pendapat tentang pendekatan mana yang efektif dan metode pengajaran mana yang tepat masih kontroversial.

Perguruan tinggi di Indonesia saat ini sudah menyelenggarakan pendidikan *entrepreneurship* (kewirausahaan). Hal ini dimulai dari adanya Instruksi Presiden R.I. Nomor 4 tahun 1995 tentang “Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan”. Pada tahun 2008, pemerintah melalui Departemen Koperasi dan UKM telah mencanangkan program GETUKNAS (Gerakan Tunas Kewirausahaan Nasional) untuk mahasiswa dan pelajar SMA. Pada tahun 2009, Dirjen Dikti mewajibkan bagi perguruan tinggi memasukkan mata kuliah kewirausahaan ke dalam kurikulum sebagai mata kuliah wajib kewirausahaan dengan bobot 2-3 SKS. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah di atas bertujuan untuk menumbuhkan jiwa dan semangat *entrepreneurship* sejak dini dikalangan mahasiswa agar berminat menjadi *entrepreneur*.

Pendidikan *entrepreneurship* diharapkan mampu mengubah *mind-set* lulusan perguruan tinggi dari mencari pekerjaan (*job seeker*) menjadi pencipta lapangan kerja (*job creator*). Untuk menumbuhkan jiwa dan semangat kewirausahaan apalagi sampai menghasilkan lulusan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan harus dilakukan secara terus menerus melalui kegiatan pendidikan dan pengembangan yang berkesinambungan.

Pendidikan *Entrepreneurship*

Terminologi “*entrepreneurship*” baru muncul sekitar 30 tahun terakhir, namun begitu mempengaruhi tata ekonomi dunia dan dunia pendidikan tinggi. Sejak awal 1970, sedikit sekali universitas, akademi dan kursus “*entrepreneurship*”. Namun 30 tahun kemudian sekitar 1.600 lembaga pendidikan kemudian membuka program pendidikan “*entrepreneurship*”.

Perkembangan itu selanjutnya meningkatkan kebutuhan pendidikan program tersebut di Perguruan Tinggi. Para pengajar dan



pelatih dari kalangan bisnis membuktikan bahwa mitos “*entrepreneurship*” itu dilahirkan dan bukan dididik itu tidak benar. Ternyata “*entrepreneurship*” merupakan disiplin ilmu dan bisa dibentuk melalui pendidikan.

Pendidikan *entrepreneurship* yang sukses menjadi faktor kunci dari pengembangan pekerja berkualitas yang akan dapat memposisikan diri sebagai pekerja kompetitif di pasar tenaga kerja internasional (World Bank Group, 2016). Perilaku *entrepreneur* adalah hasil dari pengembangan dua faktor: motivasi berprestasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk pencapaian ini.

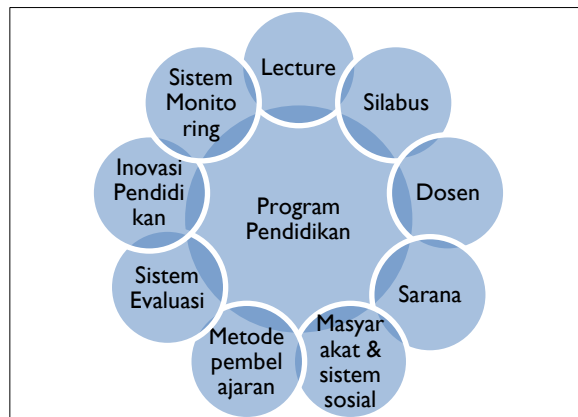
Kompetensi dapat dikembangkan melalui penelitian pedagogik, pendidikan mahasiswa dan pembuatan program pendidikan. Dengan demikian, kompetensi *entrepreneur* sama dengan karakteristik yang diperlukan dari seorang *entrepreneur* potensial dan serangkaian kualitas yang terkait dengannya pengembangan aktivitas *entrepreneurship* yang sukses (Carter & Tamayo, 2017; Gürol & Atsan, 2006; Henry dalam Ustyuzhina, et al. 2019).

Pengetahuan kewirausahaan mendukung nilai-nilai wirausaha terutama bagi mahasiswa, sehingga diharapkan menumbuhkan jiwa usaha untuk berwirausaha. Sikap, motivasi dan minat mahasiswa sangat dibutuhkan bagi mahasiswa yang berwirausaha agar mampu mengidentifikasi peluang usaha, kemudian mendayagunakan peluang usaha untuk menciptakan peluang kerja baru. Minat mahasiswa dan pengetahuan mereka tentang kewirausahaan diharapkan akan membentuk kecenderungan mereka untuk membuka usaha baru di masa mendatang.

Hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat wirausaha menunjukkan bahwa variabel minat wirausaha dipengaruhi sebesar 60,4% secara total oleh modal, *skill*, tempat, dan jiwa kewirausahaan. Wirausaha merupakan orang yang menciptakan sebuah bisnis yang berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian, bertujuan memperoleh *profit* dan mengalami pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi kesempatan dan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan. Dewasa ini, banyak kesempatan untuk berwirausaha bagi

setiap orang yang jeli melihat peluang bisnis tersebut. Karier kewirausahaan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat yaitu menghasilkan imbalan finansial yang nyata (Agustina & Sularto, 2011).

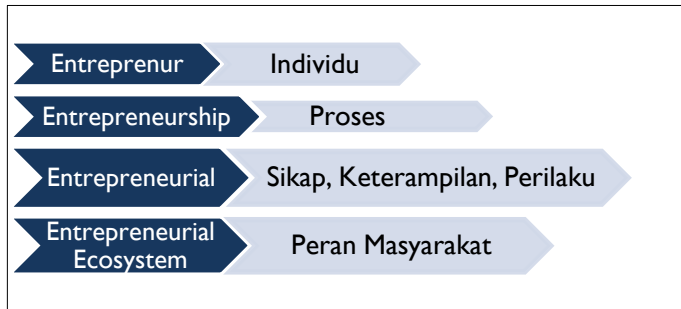
Kompetensi merupakan ciri khas seseorang yang berkaitan dengan efektifitas kinerja individu pada pekerjaan. Indeks prestasi merupakan parameter keberhasilan mahasiswa dalam dunia akademik, bagaimana dia sudah menjalani mata kuliah yang sudah ditempuh. Faktor yang mempengaruhi indeks prestasi mahasiswa tidak terlepas dari dosen. Dosen salah satu penentu tingkat keberhasilan mahasiswa dalam melakukan proses transformasi ilmu pengetahuan, teknologi, internalisasi etika dan moral. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kualitas mahasiswa juga tidak terlepas dari fasilitas belajar di kampus. Fasilitas belajar merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang mempengaruhi proses belajar.



Gambar 1
Manajemen Pendidikan *Entrepreneurship* (Lantip, 2009)

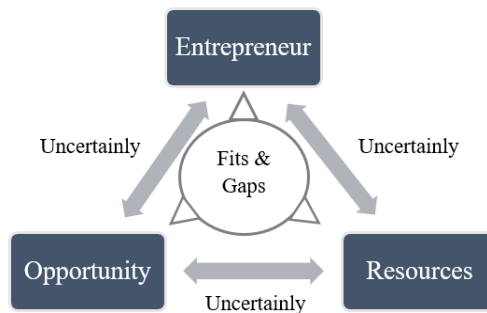
Pendekatan penelitian didasarkan pada siklus yang saling terkait program pendidikan di mana ada unsur aktor, penentu, dan kegiatan pendidikan: dosen, silabus, anggaran, peralatan, lingkungan sosial, sistem sosial, metode pembelajaran, sistem evaluasi, inovasi pendidikan,

dan sistem pemantauan. Setiap elemen mempengaruhi proses dan keberhasilan program pendidikan kewirausahaan. Unsurnya adalah sistem itu secara dinamis mampu melakukan perbaikan terus menerus untuk beradaptasi dengan perubahan dan pengembangan.



Gambar 2
Terminologi bagi *entrepreneur* (World Economic Forum, 2009)

Terminologi bagi *entrepreneur* pendidikan kewirausahaan melibatkan proses individu yang memiliki sikap, keterampilan, dan perilaku kewirausahaan untuk menjadi agen ekonomi yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan organisasi bisnis.

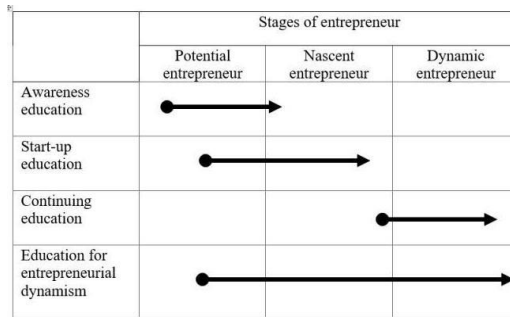


Gambar 3
Process entrepreneurial model (Timmons, 1990)

Dalam *process entrepreneurial model* ini, seorang pengusaha berusaha untuk memahami kesenjangan dan mencoba

menyesuaikannya dengan peluang dan terbatas sumber daya di mana peluang dan sumber daya itu sendiri bahkan memiliki unsur ketidakpastian.

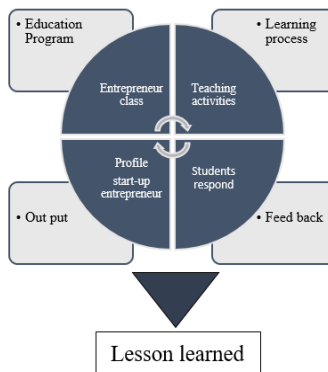
Berdasarkan tingkat pendidikan kewirausahaan, tujuan pendidikan dapat dikategorikan sebagai berikut: membangun wirausaha potensial, menciptakan wirausahawan yang baru lahir (pemula) serta berkembangnya pengusaha yang dinamis (bisnis yang baru didirikan). Kategori ini mengikuti konsep UBESS, di mana tingkat pendidikan kewirausahaan diklasifikasikan menjadi empat tahap: (1) pendidikan kesadaran; (2) pendidikan awal; (3) pendidikan berkelanjutan; dan (4) pendidikan untuk dinamika kewirausahaan (Gambar 4).



Gambar 4

UBEEs Concept: Objectives of Entrepreneurship Education (Fayolle, 2007)

Proses pendidikan kewirausahaan adalah kegiatan belajar mengajar berkelanjutan yang terus ditingkatkan berdasarkan akumulasi pengalaman di mana peningkatan berkelanjutan adalah hasil analisis matriks kinerja dan hasil dari empat elemen utama, yang kemudian diwujudkan dalam *Lesson-Learned* (Gambar 5). Keempat elemen utama adalah program pendidikan di kelas kewirausahaan, proses pembelajaran, respon siswa dan keluarnya profil siswa kewirausahaan. Narasi *Lesson-Learned* dapat berupa eksplorasi metode pengajaran yang menginspirasi, mendorong antusiasme siswa, memberikan dukungan untuk jaringan, dan memberikan tantangan (Fayolle dan Kyro, 2008).



Gambar 5

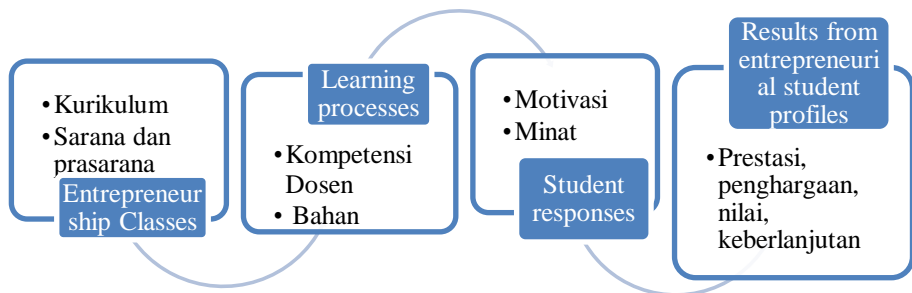
The Matrix of Entrepreneurship Education at UWKS

Narasi dalam *Lesson-Learned* adalah:

1. Kewirausahaan adalah pembelajaran praktis. Itu menunjukkan menjadi hal yang berlaku dalam bisnis. Jadi di kelas ini siswa harus termotivasi untuk membuat bisnis tampilan atau memberikan peningkatan bisnis yang sudah ada.
2. Kisah sukses selalu merupakan pelajaran yang menarik.
3. Memasuki era industri 4.0.
4. Dosen membutuhkan lebih banyak kreativitas untuk siswa yang termotivasi.
5. Menyebarkan manfaat kewirausahaan membantu orang dan solusi untuk keamanan pangan.

Pendidikan kewirausahaan universitas sebagaimana yang disajikan pada Gambar 2 merupakan kegiatan belajar mengajar yang berkelanjutan meliputi program pendidikan di kelas kewirausahaan, proses pembelajaran, respons siswa, dan hasil dari profil mahasiswa kewirausahaan. Kelas kewirausahaan dipengaruhi oleh fasilitas kurikulum dan infrastruktur. Persiapan kurikulum harus disajikan sebagai pembelajaran kewirausahaan sebagai kegiatan pembelajaran berkelanjutan, pada proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh kompetensi dan materi dosen, respons siswa yaitu motivasi dan minat,

dan hasil dari profil siswa wirausaha adalah prestasi, penghargaan, nilai, dan keberlanjutan (Noerhartati, dkk 2016; 2017a; 2018a).



Gambar 6
Pendidikan Kewirausahaan Universitas

Bahan Pangan Alternatif Sorgum

Pada proses belajar mengajar *entrepreneurship* dosen pengampu MK kewirausahaan, diharuskan memberikan kompetensi untuk mahasiswa di mana salah satu kompetensi adalah bahan baku dari produk *entrepreneurship*. Salah satu kompetensi bahan pangan alternatif adalah tanaman sorgum. Penerapan sorgum selain sebagai bahan kompetensi dari pendidikan *entrepreneurship* juga sebagai implementasi kebijakan pangan alternatif mendukung ketahanan pangan Bangsa Indonesia (UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

Sorgum (*Sorghum Sp*) sebagai sumber pangan dunia berada di peringkat ke-5 setelah gandum, padi, jagung dan barley. Bila kelembaban tanah bukan merupakan faktor pembatas, hasil sorgum rata-rata dapat mencapai 5-6 ton/ha.

Di Indonesia sorgum telah lama dikenal oleh petani khususnya di Jawa, NTB dan NTT. Khusus di Jawa Timur produksi sorgum terbesar di daerah Bojonegoro, Lamongan, Blitar dan Lumajang. Sorgum memiliki kandungan nutrisi yang baik. Selain karbohidrat, protein, lemak, sorgum juga mengandung mineral kalsium, besi, pospor, dan

vitamin B₁. Berdasarkan hal tersebut maka sorgum dapat digunakan sebagai alternatif sumber pangan.

Bagian yang dimanfaatkan untuk bahan pangan adalah beras. Bagian ini selanjutnya akan dapat diolah menjadi produk setengah jadi yang diarahkan untuk memperkaya potensi sorgum, yaitu dalam bentuk tepung sorgum. Kemudian dalam proses akan juga menghasilkan bekatul sorgum, serta batang sorgum yang dapat diolah menjadi bahan pemanis. Kandungan gizi sorgum dibandingkan sumber pangan lain disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1

Kandungan Nutrisi Sorgum dibanding Sumber Pangan Lain

Unsur Nutrisi	Kandungan/100 g					
	Gandum	Beras	Sorgum	Singkong	Jagung	Kedelai
Kalori (cal)	365	360	332	146	361	286
Protein (g)	8.9	6.8	11.0	1.2	8.7	30.2
Lemak (g)	1.3	0.7	3.3	0.3	4.5	15.6
Karbohidrat (g)	77	78.9	73.0	34.7	72.4	30.1
Kalsium (mg)	16	6.0	28.0	33.0	9.0	196.0
Besi (mg)	1.2	0.8	4.4	0.7	4.6	6.9
Posfor (mg)	106	140	287	40	380	506
Vit. B ₁ (mg)	tad	0.12	0.38	0.06	0.27	0.93

Sumber: DEPKES RI, Direktorat Gizi (1999).

Sorgum memang diketahui sebagai "saudaranya" gandum atau jagung, tanaman biji-bijian (serelia) yang kaya kalori, sehingga dipertimbangkan sebagai salah satu jenis pangan pokok substitusi beras, selain jagung, singkong, atau sagu. Sorgum selain bentuk dan rasanya mirip nasi, juga bergizi tinggi. Jika dilihat dari tabel Direktorat Gizi Depkes, kandungan nutrisinya lebih tinggi dibanding makanan pokok lain seperti beras, terigu (gandum), jagung dan singkong.

Kalori sorgum sebesar 332cal per 100g, sedikit lebih rendah dari beras (360cal), terigu (365cal) dan jagung (361cal), dan kandungan karbohidrat sorgum sebesar 73g per 100g juga lebih sedikit dibanding

beras (78,9g) dan terigu (77,3g). Namun biji-bijian ini mempunyai kandungan protein yang tinggi (11g per 100 g) dibanding terigu (8,9g), beras (6,8g), jagung (8,7g) atau bahkan singkong (1,2g). Kandungan kalsium (28mg per 100g), besi (4,4mg), fosfor (287mg), vitamin B1 (0,38mg). Kandungan protein 1g sorgum adalah 1,6 kali lipat dibandingkan beras. Sorgum juga memiliki kandungan besi 5,5 kali lipat dibandingkan beras, 2,05 kali lipat fosfor, 3,1 kali lipat vitamin B1, 4,7 kali lipat lemak dan 4,6 kali lipat kalsium. Selain itu, sorgum juga mengandung fenol dan tannin dengan komposisi tinggi, dua senyawa ini mampu melawan radikal bebas penyebab kanker. Semua bagian tanaman sorgum dapat digunakan sebagai bahan baku yaitu beras, tepung, dan bekatul untuk memperkaya potensi sorgum, serta batang sorgum sebagai bahan pemanis alami.

Sorgum juga masih ada keunggulan lain dari sisi kesehatan, yaitu “*gluten free*”, lebih banyak serat, mengandung antioksidan, tannin, dan antioksidan. Manfaat sorgum bagi kesehatan yaitu: sebagai bahan pangan bernutrisi, mengandung serat yang tinggi sehingga baik untuk pencernaan. Selain itu juga sebagai pengendali diabetes, “*gluten free*” yang dapat mencegah penyakit celiac; mengandung kalsium yang baik untuk kesehatan tulang; dapat meningkatkan sirkulasi dan produksi sel darah merah, meningkatkan tenaga, dan pencegahan kanker.

Spesifikasi sirup batang sorgum adalah merupakan suatu produk yang hampir sama dengan madu, dapat langsung dikonsumsi, atau bisa juga dilarutkan dengan air, rasa manis, bergizi dan juga merupakan produk *non chemical*. Keutamaan produk sirup batang sorgum adalah merupakan salah satu produk pemenuhan gizi tinggi, produk yang mudah dicerna, produk non kolesterol, nilai organoleptik produk, minuman lebih praktis dan sehat, mudah dikonsumsi, tahan lama, produk siap saji, produk untuk segala usia, dan mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Kegiatan kewirausahaan berbasis kompetensi bahan pangan alternatif sorgum, dengan bahan baku beras sorgum, tepung sorgum, bekatul sorgum, dan batang sorgum, yang dimulai dengan berbagai kegiatan penelitian, menghasilkan berbagai produk penelitian seperti:

sorgum cake dan cookies (Endang, 2010; Endang et al., 2010), sirup sorgum (Endang & Rahayuningsih, 2010a; Endang & Rahayuningsih, 2010b), berbagai kue kering dan roti sorgum (Endang, 2014), mie sorgum (Endang & Rahayuningsih, 2015). Brownis sorgum sangat potensial untuk dikembangkan sebagai produk wirausaha (Rizal, 2015), sorgum produk tape (Retnowati, 2015), beras dan serpihan sorgum (Endang & Puspitasari, 2016), berbagai kue dan cookies sorgum dedak lunak (Endang & Rahayuningsih, 2016), dan produk tempe sorgum sebagai produk fermentasi beras sorgum yang berpotensi sebagai produk wirausaha (Safitri, 2015), keripik sorgum (Marda, 2017), stik sorgum (Endang, et al., 2017b) dan bakpao sorgum sebagai salah satu produk wirausaha berbasis sorgum yang menjadi pilihan produk makanan (Putri, 2017) dan juga kegiatan pengabdian masyarakat oleh Centre for *Entrepreneurship Sorghum* (CSE) UWKS (Endang et al., 2010; 2013; 2016; 2017; 2018), bekatul sorgum (Noerhartati dan Rahayuningsih, 2016), stik sorgum (Noerhartati dkk, 2017), IBIKK sentra produksi olahan produk sorgum di UWKS (Noerhartati dkk, 2016-2018), peningkatan kapabilitas produk sorgum sebagai bahan pangan alternatif (Noerhartati, dkk, 2017-2018), minuman fungsional sorgum (Noerhartati, dkk, 2018), dan membangun jejaring *entrepreneurship* (Noerhartati, 2017).



Aneka Kue Basah Sorgum: sorgum sebagai substitusi tepung ketan, tepung beras, dan tepung terigu

Gambar 7
Foto-Foto Hasil Penelitian Sorgum

Sentra *Entrepreneurship* Sorgum

Perguruan Tinggi harus memberikan sumbangan nyata kepada bangsa dan tanah air yang kita cintai, Indonesia sebagaimana dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah memberikan solusi terhadap problem nasional di bidang ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Bangsa ini memerlukan pasokan pangan yang cukup dan mandiri, tidak selalu harus impor, serta tidak selalu bergantung pada satu jenis komoditi pangan. Kita memerlukan beras yang cukup, namun disaat yang sama kita perlu bahan pangan alternatif pengganti beras.

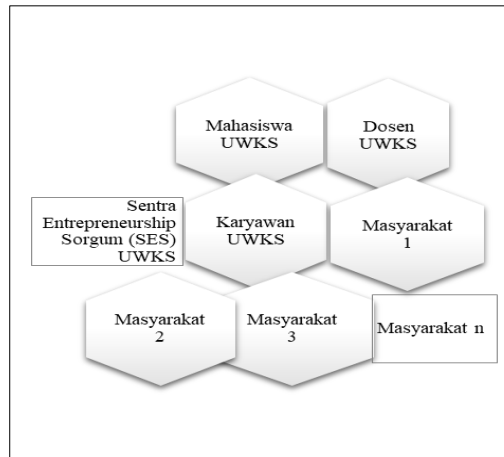
Indonesia sejak lama mengimpor gandum dalam jumlah yang sangat besar dan masyarakat mulai terbiasa bergantung pada tepung dan produk turunannya. Sejak tahun 2009, UWKS telah berkecimpung dalam intensifikasi program pangan alternatif dan substitusi pangan impor serta menggerakkan *entrepreneurship* komoditi sorgum. Sorgum menjadi pilihan karena komoditi ini merupakan bahan pangan yang telah lama dikenal sebelum era menanam padi, khususnya di Pulau Jawa.

Sorgum mudah ditanam di hampir semua wilayah, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Selain itu juga unggul ditanam di lahan-lahan marjinal atau di lahan persawahan tanpa irigasi teknis pada saat musim kemarau. Sorgum merupakan tanaman yang mampu beradaptasi secara mengagumkan.

Berdasarkan hal tersebut menjadikan produk sorgum mempunyai nilai strategis produk bagi kebutuhan nasional. Penelitian-penelitian telah dilakukan. Kemudian mulai tahun 2016 diimplementasikan pada kegiatan Inovasi Kegiatan Kampus (kegiatan IbIKK), sehingga dapat mewujudkan UWKS sebagai SES yang nantinya dapat menciptakan pengusaha-pengusaha baru di bidang sorgum, khususnya lulusan sehingga pengembangan sorgum sebagai pangan alternatif akan lebih maksimal (Noerhartati, dkk. 2016-2018).

Perkembangan iptek berbasis sorgum akan mendukung tercapainya kemampuan nasional dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek yang dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, peradaban, ketangguhan, dan daya saing bangsa, serta terpacunya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri, dan sejahtera.

Kebutuhan masyarakat terhadap pangan yang bervariasi menuntut pihak produsen makanan harus terus meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam menyajikan produknya ke masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka aneka produk olahan sorgum mampu memberikan kontribusi dan solusi terhadap bangsa dengan *entrepreneurship* diversifikasi pangan sorgum, yang akhirnya dapat meningkatkan sorgum sebagai pangan alternatif Bangsa Indonesia.



Gambar 7
Kegiatan IbiKK Mewujudkan *Sentra Entrepreneurship Sorgum (SES)*

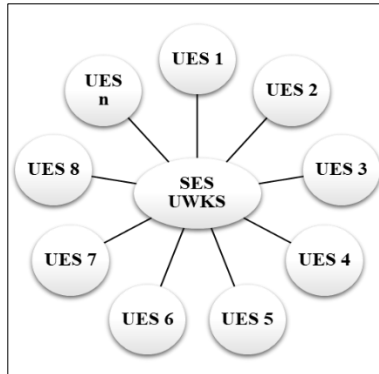
UWKS sebagai SES, sehingga UWKS mampu berkontribusi dan memberikan solusi terhadap bangsa dengan pembentukan SES yang telah menghasilkan diversifikasi pangan berbasis sorgum, meningkatkan potensi sorgum sebagai pangan alternatif, membuka peluang industri sorgum, tercipta pengusaha-pengusaha baru di bidang sorgum, yang akhirnya dapat mendukung program Ketahanan, Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Bangsa Indonesia.

Unit *Entrepreneurship Sorgum*

Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi pengolahan produk, mahasiswa sebenarnya bebas memilih komoditas yang akan dikembangkan menjadi produk untuk kegiatan kewirausahaan. Namun demikian, dalam penelitian ini pengenalan pengembangan sorgum sebagai bahan pangan dicoba. Hal ini didasarkan pada tanggung jawab sosial universitas dalam menangani masalah ketahanan pangan. Seperti sudah diketahui, konsumsi beras nasional selalu meningkat dan stok beras berada dalam kondisi rentan karena kekurangan pasokan di negara tersebut. Solusi mengatasi kelangkaan beras dengan kebijakan impor bukan tanpa masalah karena mengimpor beras justru akan

memicu masalah berkelanjutan. Penulis telah mengembangkan sorgum sebagai bahan makanan melalui kegiatan penelitian dan layanan masyarakat sejak tahun 2009 hingga sekarang, dengan berbagai hasil penelitian dan materi layanan masyarakat yang dihasilkan oleh SES-UWKS menjadi referensi penting bagi mahasiswa di kelas kewirausahaan, di samping berbagai referensi dari sumber lain. Selain itu, SES-UWKS juga membangun dan mengembangkan Unit *Entrepreneurship Sorghum* (UES) dalam masyarakat di pusat produksi sorgum dan di daerah pasar potensial baru untuk produk olahan sorgum. Kelompok UES yang telah didirikan adalah: UES biji , UES beras, UES tepung, serta UES unit pengolahan (aneka kue, roti, beras, katering). Keberadaan UES menjadi bagian dari jaringan bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa. Dalam silabus, kegiatan kewirausahaan dirumuskan sebagai kesadaran dan pendidikan awal yang bertujuan untuk membuat mahasiswa menjadi (setidaknya) calon wirausaha dan berjuang untuk siswa menjadi wirausahawan yang baru lahir atau wirausahawan yang berpendidikan.

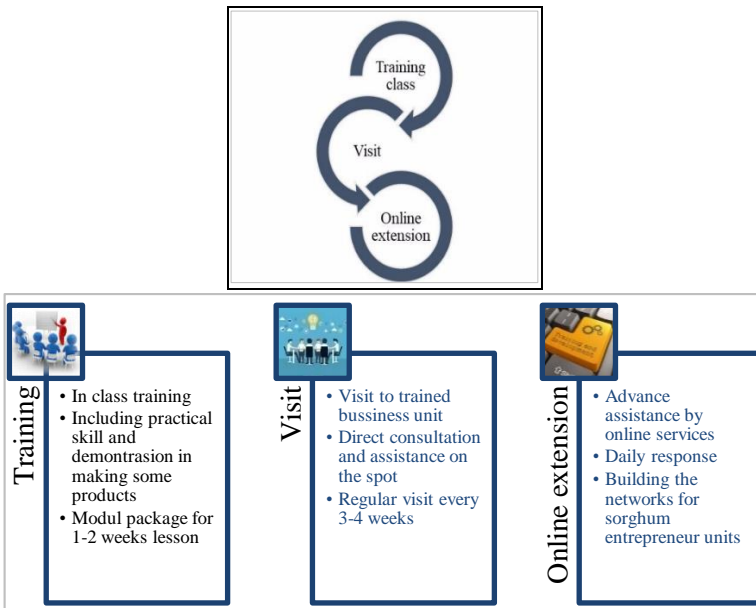
Pada proses belajar mengajar, mahasiswa memainkan peran aktif sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Dosen menyediakan waktu tambahan untuk konsultasi bagi mereka yang ingin tahu lebih banyak tentang komoditas sorgum. Kata kunci yang menarik mahasiswa untuk mengeksplorasi berbagai peluang bisnis komoditas sorgum adalah: (1) sorgum adalah makanan bebas gluten; (2) sorgum adalah gandum purba yang masih ada sampai sekarang; (3) sorgum adalah makanan sehat; (4) sorgum dapat ditanam di lahan marjinal dan tumbuh dengan baik di kering musim, dan itu menuntut air yang relatif sedikit dibandingkan dengan penanaman padi. Selain itu, mahasiswa juga tertarik sebab peluang bisnis komoditas sorgum dianggap baik karena tidak ada bisnis atau hanya ada beberapa usaha di bidang pengolahan sorgum dan pasar potensial untuk produk olahan sorgum terbuka lebar.



Gambar 8

Pembentuk Unit *Entrepreneurship* Sorgum (UES) UWKS

Berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat tentang pengembangan sorgum sebagai makanan alternatif yang dilakukan di UWKS, penguatan Unit *Entrepreneurship* Sorgum (UES) dengan *Training, Visit, and Online Extension (TVO) System* (Endang et al., 2018) (Fayolle and Kyro, 2008) (Gambar 9).



Gambar 9

TVO System Methods (Endang et all., 2018)

Metode TVO sistem dapat digunakan untuk memperkuat kewirausahaan dalam program produk berbasis sorgum oleh SES-UWKS, termasuk pengembangan paket teknologi dari hasil penelitian tentang produk sorgum berkelanjutan sebagai masa depan makanan sehat. Hal ini harus didukung oleh ketersediaan varietas unggul, teknologi pemrosesan, dan pengetahuan tentang manfaat makanan fungsional. Selain paket teknologi juga paket bisnis dengan pembentukan unit kewirausahaan dalam berbagai kelompok sesuai dengan kemampuan mereka, membangun jaringan sorgum, membuka pasar baru dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan demikian pada akhirnya dapat secara bertahap memperkuat UES dengan meningkatkan tingkat dan penguatan jaringan UES terus dilayani oleh SES, sehingga jaringan UES dapat memperbesar kapasitas bisnis dan ruang lingkup area pemasaran.

Penutup

Entrepreneurship merupakan disiplin ilmu, dan bisa dibentuk melalui pendidikan. Perilaku *entrepreneur* adalah hasil dari pengembangan dua faktor: motivasi berprestasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk pencapaian ini. Pada era industri 4.0, berbagai kompetensi seperti kreativitas, inovasi, dan kepiawaian sangat diperlukan, sehingga pendidikan *entrepreneurship* diharapkan mampu mengubah *mind-set* lulusan perguruan tinggi dari mencari pekerjaan (*job seeker*) menjadi pencipta lapangan kerja (*job creator*). Untuk menumbuhkan jiwa dan semangat kewirausahaan apalagi sampai menghasilkan lulusan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan harus dilakukan secara terus menerus melalui kegiatan pendidikan dan pengembangan yang berkesinambungan.

Daftar Pustaka

Agustina, C & Sularto, L. (2011). Intensi Kewirausahaan Mahasiswa (Studi Perbandingan Antara Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Komputer). *Prosiding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur, & Sipil) Universitas Gunadarma, Depok, 18-19 Oktober 2011*, 4: E.63-E.69.

- Amue, G. J & Adiele, K.C. (2012). New Product Development and Consumer Innovative Behaviour: An Empirical Validation Study. *European journal of business and social sciences*, 1(6), 97-109.
- Astamoen, M.P. (2005). *Entrepreneurship dalam Perspektif Kondisi Bangsa Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Cannon, T. (1978). New Product Development. *European Journal of Marketing*, 12(3), 217–248.
- Casson, M. (2012). *Entrepreneurship Teori, Jejaring, Sejarah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Chandra, S.T. (2015). Analisis Proses dan Evaluasi Pengembangan Produk Baru di PT UD Raja Maritim. *Jurnal Agora*, 3(1), 285-292.
- Congregado, E. (2008). *Measuring Entrepreneurship*. New York, USA: Springer.
- Drucker, P.F. (1984). *Innovation and Entrepreneurship Practice and Principles*. California: Perfectbound.
- Fayolle A & Kyro, P. (2008). *The Dynamic Between Entrapreneurship, Environment and Education*. Bodmin, Cornwall: MPG Books Ltd.
- Fayolle, A. (2007). *Handbook of Research in Entrepreneurship Education*, volume 1: a general perspective. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing Limited.
- Irbawan, MI. (2017). *Entrepreneurship Sorchips (Sorgum Chips) Mendukung Keamanan Pangan Bangsa Indonesia*. Prosiding Dies Natalis 36 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 164-170.
- Kangama, C.O. (2005). Introduction of Sorghum into China. *African Journal of Biotechnology*, 4 (7): 575-579.
- Kholiq, R. (2015). Pembuatan Bronis Sorgum: Kajian dari Jenis dan Konsentrasi Tepung Sorgum. Laporan Skripsi. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

- Menrad, K. (2003). Market and Marketing of Functional Food in Europe. *Journal of Food Engineering*, 56(2-3), 181-188.
- Ningsih, PW., Noerhartati E., & Rayahuningsih, T. (2017). Potensi Bakpao Sorgum mendukung Difersifikasi Pangan Indonesia. *Prosiding Dies Natalis 36* (pp. 171-178). Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Noerhartati, E & Puspitasari, D. (2016). Flake Sorghum (*sorghum sp*): Kajian dari Jenis dan Konsentrasi Tepung Sorgum. *Prosiding Proceeding International Conference on Food Agriculture and Natural Resource* (pp. 83-94).
- Noerhartati, E & Rahayuningsih, T. (2012a). Karakterisasi Gula Cair Batang Sorgum. *Journal of Agroteknologi*, 7(2): 111-119.
- Noerhartati, E & Rahayuningsih, T. (2012b). Gula Cair Batang Sorgum: Kajian dari Metode Ekstraksi. *Prosiding PERTETA* (pp.60-67). Malang: Universitas Brawijaya.
- Noerhartati, E & Rahayuningsih, T. (2015). Optimasi Produk Mie Sorgum Instan. *Prosiding ISREM* (pp.50-67). Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Noerhartati, E. (2010). Berbagai Produk Industri dibuat dari Gandum dan Sorgum. Dinas Pertanian Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Noerhartati, E. (2014). Variasi Produk cookies, Flakes, Stik, dan Mie Sorgum. *Prosiding Seminar Nasional SPRINT 2014 LIPI* Yogyakarta, 235-238.
- Noerhartati, E. (2017). Membangun Jejaring *Entrepreneurship* Mendukung Pengembangan Sorgum sebagai Pangan Alternatif. *Prosiding Sminar Nasional Dies Natalis 36* (pp.39-48). Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Noerhartati, E., & Rahayuningsih, T. (2016). Potensi Bekatul Sorgum Sebagai Makanan Suplemen Berserat Tinggi. *Prosiding Innovation*

of Food Technology (IFC) 2016 (pp. 131-137). Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Noerhartati, E., Puspitasari, D., Rahayuningsih, T., Rejeki, FS & Wedhowati, E.R. (2010). Produk Cookies berbasis Tepung Sorgum, Laporan kegiatan "Si Unyil TV TRANS 7". Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Noerhartati, E., Puspitasari, D., Rahayuningsih, T., Rejeki, FS & Wedhowati, E.R. (2013). Laporan Kegiatan IbM Kelompok Usaha Tepung Sorgum. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Noerhartati, E., Rahayuningsih, T & Mujianto. (2017b). Stik Sorgum (*sorghum sp*) sebagai Diversifikasi Pangan Alternatif. *Jurnal Reka Pangan*, 11(2), 38-44.

Noerhartati, E., Rahayuningsih, T., Rejeki, FS & Wedhowati, ER. (2010). Laporan Kegiatan IbM Kelompok Usaha Sirup Sorgum. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Noerhartati, E., Widiarti, T., Maslihah & Karyanto, N.D. (2016). Laporan Kegiatan IbIKK Pusat Produksi Aneka Produk Sorgum UWKS (Tahun 1). Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Noerhartati, E., Widiarti, T., Maslihah & Karyanto, N.D. (2017a). Laporan Kegiatan IbIKK Pusat Produksi Aneka Produk Sorgum UWKS (Tahun 2). Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Noerhartati, E., Widiarti, T., Maslihah & Karyanto, N.D. (2018). Laporan Kegiatan IbIKK Pusat Produksi Aneka Produk Sorgum UWKS (Tahun 3). Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Retnowati. (2015). Pembuatan Tape Sorgum: Kajian dari Lama Perendaman dan konsentrasi Ragi. Laporan Skripsi. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

- Safitri. (2016). Pembuatan Tempe Sorghum: Studi Tentang Jenis Beras Sorgum dan Jenis Pengemas. Laporan Skripsi. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Tzokas, N., Hultkinkb E.J, & Hartc, S. (2004). The New Product Development Process. *Journal of Industrial Marketing Management*, 33, 619–626.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Ustyuzhina, O., Mikhaylova, A & Abdimomynova, A. (2019). Entrepreneurial Competencies In Higher Education. *Journal of Entrepreneurship Education*, Volume 22, Issue 1, 2019.
- Widiartin, T., & Noerhartati, E. (2017). Membangun Situs Web Sorgum sebagai Pusat Penelitian Fasilitas Promosi dan Pengembangan Sorgum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. *Jurnal Simetris*, 8 (2), 477-482.
- Winardi. (2017). *Entrepreneur dan Entrepreneurship*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- World Bank Group. (2016). Increasing *Entrepreneurship* in the Digital Economy, Trade And Competiveness Global Practice. 11 -14.
- Zoltan, J.A., Szerb, L., & Lloyd, A. (2018). *Global Entrepreneurship Index*. Washington: GEDI.
- Zubair, A. (2016). Sorgum Tanaman Multi Manfaat. Padjadjaran: Unpad Press.



URGENSI PENGETAHUAN AWAL (*PRIOR KNOWLEDGE*) PADA PEMBELAJARAN SAINS DI SEKOLAH DASAR

Irvin Novita Arifin

Dosen FIP. Universitas Negeri Gorontalo
email: irvinnovitaarifin@ung.ac.id

Pendahuluan

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan dasar yaitu agar siswa mampu memahami potensi diri, peluang dan tuntutan lingkungan sehingga siswa dapat merencanakan masa depan melalui serangkaian keputusan bagi diri siswa sendiri. Oleh sebab itu, peran aktif guru sangat diperlukan dalam menciptakan proses pembelajaran dengan suasana yang tenang, menyenangkan, kondisi yang demikian menuntut aktivitas dan kreativitas guru. Agar dapat menghasilkan tenaga pendidik yang kreatif, handal terlibat secara aktif baik mental, fisik maupun sosialnya dibutuhkan tenaga pendidik guru sekolah dasar yang sesuai dengan kompetensi pendidikannya yaitu menguasai bidang pengetahuannya dan menguasai keterampilan pedagogisnya dalam mengajar siswa sekolah dasar.

Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Karena meskipun sistem pendidikannya baik, jika tidak didukung dengan kualitas kemampuan dan profesionalisme tenaga kependidikan tentu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk mewujudkan tenaga guru yang sesuai dengan kompetensinya maka sangat diperlukan kerja sama dan dukungan dari perguruan tinggi, dalam hal ini jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang mampu menyiapkan serta melahirkan tenaga-tenaga guru sekolah dasar. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan guru SD diantaranya UU Nomor 14 Tahun 2005

tentang guru dan dosen, menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berkaitan dengan masalah tersebut, dibutuhkan kemampuan peserta didik dalam upaya memecahkan masalah (*problem solving*) sebab masih ditemui peserta didik yang belum mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar, tidak mampu menjelaskan dan menggambarkan masalah yang dihadapi. Selain itu juga tidak mampu mencari strategi apa yang akan dibuat ketika memperoleh masalah dalam pembelajaran IPA. Secara fisik dan mental masih ada peserta didik yang belum mampu memecahkan masalah yang dihadapi yang merupakan bagian integral dalam pembelajaran IPA diantaranya merupakan salah faktor yang berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja sama yang baik antara guru dan siswa khususnya pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang dianggap sulit oleh sebagian peserta didik. Anggapan oleh sebagian peserta didik bahwa pelajaran IPA ini sulit adalah benar, terbukti dari hasil perolehan Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang dilaporkan oleh Depdiknas masih sangat jauh dari standar yang diharapkan, justru semakin tinggi jenjang pendidikan, maka perolehan rata-rata UAS pendidikan IPA ini menjadi semakin rendah (Susanto, 2013, p. 165).

Dengan demikian, jika pada pembelajaran IPA guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan pengetahuan awal siswa, maka siswa akan memproses informasi dalam rangka mengkonstruksi pengetahuan dengan lebih mudah.

Pengetahuan Awal (*Prior Knowledge*)

Gredler (2011, p. 237) mengidentifikasikan dua kategori umum pengetahuan yaitu: (1) pengetahuan tidak jelas (*tacit*); dan (2) pengetahuan yang kelihatan jelas (*ekplisit*). Komponen umum dari

pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan konseptual dan metakognitif. Pengetahuan seseorang kebanyakan tidak kelihatan jelas (*tacit*). Secara singkat pengetahuan *tacit* bersifat implicit, dan beroperasi di bawah ambang kesadaran.

Menurut Piaget (Sagala, 2010, p. 28) ada tiga bentuk pengetahuan yakni sebagai berikut.

1. *Pengetahuan fisik*, merupakan pengetahuan tentang benda-benda yang ada di luar dan dapat diamati dalam kenyataan eksternal. Sumber pengetahuan fisik terutama terdapat dalam benda itu sendiri, yaitu cara benda itu memberikan pada subjek kesempatan-kesempatan untuk pengamatan.
2. *Pengetahuan logika matematik* terdiri atas hubungan-hubungan yang diciptakan subjek dan diintroduksikan pada objek-objek.
3. *Pengetahuan sosial* seperti fakta. Pengetahuan fisik dan sosial merupakan pengetahuan empiris yaitu melalui observasi berupa pengamatan yang melibatkan seluruh indera dan percobaan. Sedangkan pengetahuan logika matematika mewakili pengetahuan menurut tradisional.

Cara untuk membangun pengetahuan menurut (Sagala, 2010, p. 29) yaitu, *equilibras*. Piaget dan para konstruktivis pada umumnya berpendapat bahwa dalam mengajar, seharusnya diperhatikan pengetahuan yang telah diperoleh siswa sebelumnya. Maka dalam hal ini guru diharapkan dapat memperhatikan pengetahuan sebelumnya atau yang disebut pengetahuan awal.

Pengetahuan awal (*prior knowledge*) adalah kumpulan dari pengetahuan dan pengalaman individu yang diperoleh sepanjang perjalanan hidup mereka dan yang akan ia bawa kepada suatu pengalaman belajar yang baru (Liliasari dan Rahmatan, 2012). Selanjutnya, Zakaria dan Yusuf (2009) menyatakan pengetahuan awal berperan penting terhadap kemampuan pemecahan masalah.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam proses belajar mengajar khususnya pada pembelajaran IPA guru sebaiknya mampu memperhatikan pengetahuan siswa sebelumnya atau yang disebut dengan pengetahuan awal (*prior knowledge*) sebab hal ini membantu

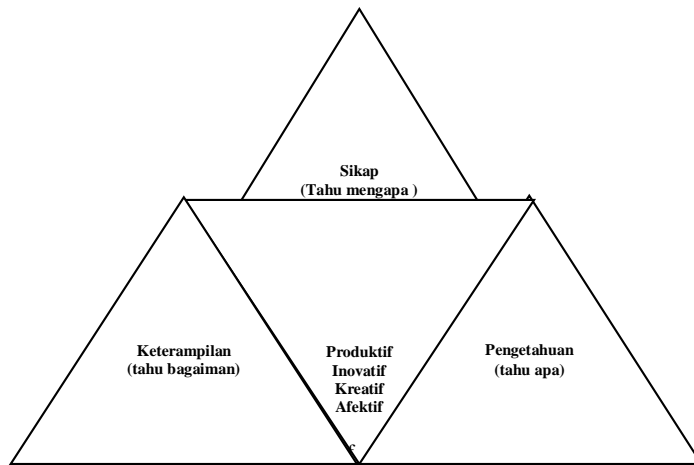
siswa dalam menkonstruksi pengetahuan baru yang nantinya siswa akan peroleh pada saat proses pembelajaran dan hal ini merupakan salah satu solusi bagi guru dalam memecahkan problematika pada proses pembelajaran IPA di sekolah dasar.

Pembelajaran IPA pada Peserta Didik

Teori Piaget (Daryanto, 2014, p. 53) menyatakan bahwa belajar berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan skema (jarak skemata). Skema adalah suatu struktur mental atau struktur kognitif yang dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya (Baldwin, 1967). Selanjutnya Vygotsky dalam teorinya menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuan peserta didik. Dengan kata lain tugas itu berada dalam *zona of proximal development* daerah terletak antara tingkat perkembangan siswa saat ini yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah dibawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu.

Pembelajaran dengan metode saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut. (1) Berpusat pada siswa. (2) Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip. (3) Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir siswa. (4) Dapat mengembangkan karakter siswa.

Berikut ini akan disajikan bagan tentang hasil belajar melahirkan siswa yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.



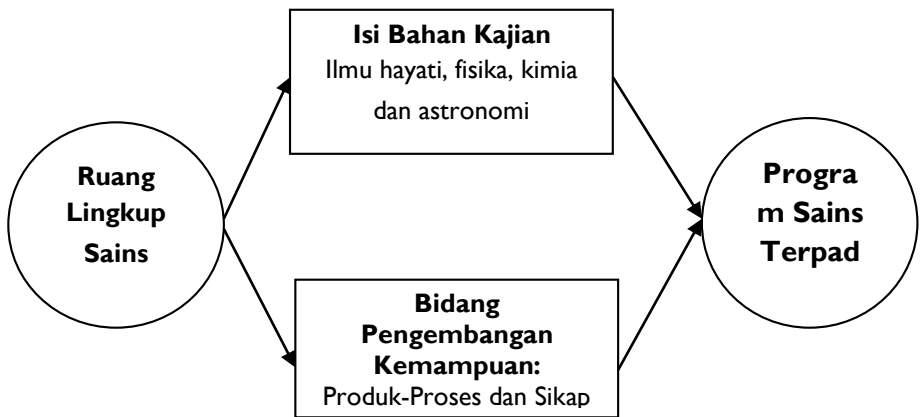
Gambar 1
Hasil Belajar Melahirkan Siswa yang Produktif, Kreatif, Inovatif, dan Afektif melalui Penguatan Sikap, Keterampilan dan Pengetahuan yang Terintegrasi

Disadari, pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini manusia yang terlibat dalam sistem pembelajaran yaitu, siswa, guru dan tenaga lainnya. Selanjutnya material seperti papan tulis, spidol, buku dan lain sebagainya. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruang kelas, perlengkapan audio visual. Prosedur seperti praktik, jadwal belajar dan metode penyampaian informasi. Pembelajaran haruslah diwarnai oleh organisasi berbagai komponen yang saling berkaitan. Pembelajaran siswa usia dini merupakan proses interaksi antara peserta didik dan guru serta orang dewasa lainnya dalam hal ini orang tua pada suatu lingkungan untuk mencapai tugas perkembangan.

Dari uraian tersebut guru hendaknya merancang pembelajaran sehingga siswa tidak terbebani dalam mencerna konsep yang diberikan guru. Sikap ilmiah berkaitan dengan kemampuan siswa dalam berpikir kritis yang merupakan landasan dalam melakukan penyelidikan ilmiah

sehingga menghasilkan produk ilmu seperti fakta, konsep, prinsip, teori dan hukum, Amin (1987) menggambarkan keterkaitan antara kemampuan melakukan penyelidikan, proses, dan produk ilmu serta sikap ilmiah.

Ruang lingkup program pengembangan pembelajaran sains pada siswa dari bidang pengembangan atau kemampuan yang harus dicapai maka terdapat tiga dimensi yang harus dikembangkan yaitu meliputi, kemampuan yang terkait dengan penguasaan produk sains, penguasaan proses sains, dan penguasaan sikap sains (jiwa ilmun).



Gambar 2
Ruang Lingkup Program Pembelajaran Sains
(Nugraha, 2008, p. 94)

Dari Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa pembagian ruang lingkup program pengembangan pembelajaran sains dapat bermakna jika semua program pengembangan pembelajaran sains yang sifatnya terpadu dapat meramu berbagai bidang pengembangan ke dalam satu perencanaan yang utuh dan sinergis. Tugas guru selanjutnya untuk kepentingan program pengembangan pembelajaran sains adalah menseleksi hal-hal yang dapat dimasukkan secara lebih khusus yang terkait dengan program pengembangan sains untuk siswa. Harapan umum adalah dengan pengembangan pembelajaran sains memiliki pemahaman dan

pengalaman belajar sains yang utuh, bermakna dan fungsional bagi kehidupannya.

Kesimpulan

Dibutuhkan kemampuan awal peserta didik dalam upaya memecahkan masalah (*problem solving*) sebab masih ditemui Peserta didik yang belum mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar, tidak mampu menjelaskan dan menggambarkan masalah yang dihadapi, tidak mampu mencari strategi apa yang akan dibuat ketika memperoleh masalah dalam pembelajaran IPA, secara fisik dan mental belum mampu memecahkan masalah yang dihadapi yang merupakan bagian integral dalam pembelajaran IPA.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama yang baik antara guru dan siswa khususnya pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang dianggap sulit oleh sebagian peserta didik. Guru hendaknya mampu merancang pembelajaran sehingga peserta didik tidak terbebani dalam mencerna konsep yang diberikan guru. Sikap ilmiah berkaitan dengan kemampuan siswa dalam berpikir kritis yang merupakan landasan dalam melakukan penyelidikan ilmiah sehingga menghasilkan produk ilmu seperti fakta, konsep, prinsip, teori dan hukum, dari bidang pengembangan atau kemampuan yang harus dicapai maka terdapat tiga dimensi yang harus dikembangkan yaitu meliputi, kemampuan yang terkait dengan penguasaan produk sains, penguasaan proses sains, dan penguasaan sikap sains (jiwa ilmuan).

Daftar Pustaka

Gredler, M.E. (2011). *Learning and Intruction Teori dan aplikasi* (edisi keenam). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ifenthaler, D. (2011). *Multiple Perspectives on Problem Solving and Learning in The Digital Age*. Germany: Springer.

Jihad, A dkk. (2012). *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Pressindo.

Jufri, W. (2013). *Belajar dan Pembelajaran IPA*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

----- (2017). *Belajar dan Pembelajaran IPA*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Lubis, G dkk. (2016). *100 Masalah Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Nugraha, A. (2008). *Pengembangan Pembelajaran Sains Pada Siswa Usia Dini*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Susanto, A. (2013). *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana.

MENUMBUHKAN MINAT BACA SISWA MELALUI *E-LEARNING* BERBASIS EDMODO

Zefrin

Email: zefrinaie@gmail.com

Pendahuluan

Permendikbud Nomor 23 tahun 2015 yang menegaskan substansi budi pekerti diantaranya ialah mewajibkan siswa membaca buku sebelum jam pelajaran mulai relevan dengan kemajuan zaman sekarang ini. Percepatan kemajuan arus teknologi dan informasi membutuhkan budaya baca yang konsisten dan terus-menerus dilakukan. Membaca haruslah membudaya untuk anak-anak di Indonesia. Membaca bukan saja tentang aspek kognitif, melainkan harus menyentuh makna sebagai cerminan perilaku masyarakat yang pedomannya tercermin pada nilai-nilai agama dan Pancasila.

Hasil survei UNESCO yang telah dirilis menunjukkan minat baca di Negara Indonesia sangat rendah, mencapai 0,001% dengan perbandingan 1:1000. Hal tersebut berarti bahwa hanya satu di antara seribu penduduk Indonesia yang mempunyai minat baca yang tinggi. Hal ini sangat memprihatinkan. Untuk itu, harus ada upaya untuk mendorong minat membaca masyarakat sejak dini.

Minat baca siswa khususnya di SDN 89 Sipatana Gorontalo sangat rendah. Siswa lebih banyak menggunakan *gadget* atau *handphone* mereka dibanding kegiatan membaca buku. *Gadget* atau *handphone* selalu digunakan untuk bermain daripada mengakses hal-hal terkait pembelajaran.

Untuk membangun minat baca siswa, diperlukan strategi, metode, teknik, atau media yang tepat, diantaranya adalah pemanfaatan

e-learning berbasis edmodo. Penggunaan *e-learning* merupakan solusi di era modern sekarang ini untuk membangun kembali minat baca siswa yang telah merosot. Kelas maya pada edmodo merupakan suatu media belajar yang mampu membangun kembali minat dan aktivitas membaca siswa berbasis *e-learning*. Siswa mengakses dan membaca buku yang dibagikan atau diposting oleh guru melalui kelas digital dan bahkan mereka dapat memberikan umpan balik atau tanggapan dari buku yang telah mereka baca tersebut.

Minat Baca Siswa

Minat menurut Sinambela (Zusnani, 2013, p. 79) adalah tingkah laku yang positif disebabkan oleh ketertarikan dari suatu aktivitas. Sedangkan menurut Zusnani (2013, p. 80) membaca adalah kekuatan yang mendorong anak untuk memperhatikan, merasa tertarik dan cenderung senang terhadap sesuatu aktivitas sehingga anak dapat melakukannya sendiri.

“Membaca adalah proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk mendapatkan pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis” (Tarigan, 2008, p. 7). Hal ini selaras dengan pendapat Abidin (2012, p. 59) bahwa membaca adalah suatu aktivitas atau kegiatan dalam rangka mendapatkan suatu informasi atau pesan sehingga pembaca mendapatkan pemahaman atas bacaan tersebut.

Secara operasional, Hasanah, dkk (2011, p. 34) menyatakan bahwa yang dimaksud minat baca yakni keinginan yang tinggi dari seseorang baik secara sadar atau tidak sehingga ia merasa puas dari perilaku membacanya. Minat sangat mempengaruhi kegiatan dan frekuensi kegiatan membaca, sehingga pembaca mampu memilih bacaannya sendiri, menentukan keaktifan siswa untuk mengerjakan tugas, bertanya-jawab, dan memiliki ketertarikan serta ketahanan membaca di luar kelas.

Pandangan Sinambela (Sanjaya, 2005), minat baca adalah perilaku positif dan rasa tertarik anak untuk dapat terus membaca.

Aspek minat membaca yakni kesadaran pentingnya membaca, dan frekuensi membaca serta rasa senang dengan kegiatan membaca.

Menurut Hernowo (2002, p. 68), terbiasanya aktivitas membaca dari masing-masing orang tidak dapat disamakan. Namun, yang harus sering kita biasakan adalah melakukan program membaca atau terencana. Hal-hal yang berkorelasi dengan masalah membaca tercermin dari penjelasan berikut.

1. Waktu membaca

Kegiatan membaca di mana dan kapan saja sekarang ini belum membudaya di masyarakat kita. Masyarakat Indonesia lebih senang melakukan kegiatan menyimak dan berbicara dari pada membiasakan budaya baca dan menulis sehingga mereka beranggapan tidak terlalu penting untuk membuat dan merencanakan program waktu membaca. Semestinya meluangkan waktu untuk aktivitas membaca bukanlah perkara yang terlalu lama, kita bisa meluangkan waktu 45 menit saja dalam seminggu.

2. Frekuensi membaca

Frekuensi baca setiap individu selalu berbeda. Hal ini berdasarkan pada minat baca seseorang dan kepentingan seseorang yang membuatnya membaca. Seseorang bisa saja membaca tiga kali dalam sehari rutin dalam seminggu, bisa juga seseorang membaca hanya sekali setahun ketika ia berada dalam keadaan yang mengharuskan ia membaca.

3. Sikap membaca

Penjelasan dari sikap membaca dapat dijelaskan sebagai berikut. (1) Sabar. Kesabaran sangat penting dalam hal membaca karena jika kita terburu-buru akan sulit menentukan makna dan proses menarik kesimpulan pun bisa menjadi salah. (2) Telaten. Ketelatenan memaknai pada setiap halaman buku juga penting karena jika hal demikian tidak dilakukan, maka akan banyak gagasan hilang. (3) Tekun. Ketekunan dalam hal menelusuri gagasan-gagasan pokok pada setiap kalimat, alinea, dan bab menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. (4) Gigih. Kegigihan dimaksudkan agar setiap bacaan yang belum dipahami agar selalu diulang agar dapat dipahami secara baik. (5) Sungguh-sungguh.



Kesungguhan dalam mencari makna dan memahami maksud dilakukan untuk menemukan makna dan maksud dari seorang penulis sangat penting bagi si pembaca.

E-Learning Berbasis Edmodo

E-learning adalah materi pelajaran atau pengalaman belajar yang disampaikan melalui teknologi elektronik (Sanjaya, 2012, p. 205). *E-learning* merupakan suatu proses belajar yang lebih memanfaatkan komputer dan jaringan internet. Perkembangan teknologi dengan sistem jaringan khususnya jaringan internet berdampak pada terjadinya perubahan peranan guru dan perubahan pengelolaan pembelajaran yang kemudian memberi dampak pada perubahan paradigma mengajar.

E-learning adalah pembelajaran yang berbasis TIK yang dengan maksud transformasi belajar dari guru ke siswa. Tujuan penting dengan adanya teknologi adalah terjadinya efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam belajar. Selain itu, *e-learning* memiliki kemudahan pembelajaran yang terakses secara online.

Dari uraian tersebut dapat ditarik simpulan bahwa *e-learning* merupakan implementasi penggunaan teknologi sebagai media yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi serta kenyamanan dalam belajar dengan sasaran pembelajaran efektif dan interaktif. Hasil akhir yang selalu diharapkan adalah terjadinya peningkatan hasil belajar serta pengurangan waktu, anggaran dan tenaga (Murtiyasa, p. 2012).

Pengembangan pembelajaran *e-learning* salah satu diantaranya adalah penggunaan edmodo. Edmodo menurut Nu'man (2014, p. 4) adalah sebuah platform pembelajaran sosial yang dikembangkan di akhir tahun 2008 oleh Nic Borg dan Jeff Hara yang di peruntukkan buat guru, siswa dan orang tua. Pembelajaran melalui edmodo memberi pulang bagi siswa, guru dan orang tua untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan informasi teknologi yang semakin pesat melalui aplikasi digital dengan akses internet.

Edmodo adalah pembelajaran berbasis media sosial dan aman digunakan guru dan siswa (Hippy, 2016). Edmodo sangat besar

manfaatnya bagi kelas karena siswa dan guru dapat berkolaborasi dan berinteraksi dalam *digital class*. Hasil pekerjaan dan tugas-tugas siswa dapat diakses dan dijadikan data di sekolah masing-masing. Tujuan dikembangkan edmodo adalah sebagai penguatan untuk sosial media yang penggunaannya dijadikan sebagai media belajar kolaboratif dan interaktif bagi siswa.

Dari penjelasan tentang *e-learning* berbasis edmodo dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan edmodo merupakan media interaktif bagi guru yang bermanfaat terhadap peningkatan minat membaca siswa kelas VI yang dilakukan kapan dan dimana saja siswa berada. Membaca melalui edmodo dilakukan melalui jaringan atau akses internet yang dapat terhubung pada perangkat komputer, laptop atau pada *handphone* masing-masing siswa.

Untuk penggunaan edmodo baik guru maupun siswa harus memiliki akun dan membentuk sebuah kelas atau grup, sehingga guru dapat melakukan postingan teks bacaan atau buku bacaan dalam grup kelas yang telah dibentuk. Penggunaan edmodo salah satu syarat utamanya adalah tersedianya koneksi internet pada perangkat komputer, laptop atau *smartphone*.

Langkah-langkah dalam membuat akun edmodo untuk guru sebagai berikut.

1. Tulis alamat web www.edmodo.com.
2. Klik “*I’m a Teacher*” selanjutnya terdapat format isian.
3. Isilah form isian secara lengkap, dan password yang akan kita tentukan sendiri dengan minimal 8 karakter.
4. Masukkan nama sekolah masing-masing.
5. Dalam mengupload foto, klik “*browse/choose file*”
6. Masukkan nama masing-masing, sehingga mudah bagi teman anda untuk menemukan anda.
7. Selanjutnya klik (*confirm your email address*) untuk mengkonfirmasi email pada akun edmodo.
8. Selanjutnya akan muncul tampilan “*home teacher*”.

Langkah-langkah dalam membuat akun edmodo untuk siswa adalah sebagai berikut.

1. Tulis alamatweb www.edmodo.com
2. Klik pada “*I’m a Student*”
3. Selanjutnya isilah format isian yang ada.
4. Mengisi *Grup Code* yang telah dibagikan guru.
5. Selanjutnya klik “Sign Up”
6. Pada bagian akhir akan tampak beranda “*home student*”.

Membuat akun edmodo untuk orang tua, sama halnya dengan membuat akun untuk siswa, hanya saja kita akan masuk dengan menu “*Parents*” dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Tulis alamat web www.edmodo.com
2. Klik pada “*I’m a Student*”.
3. Selanjutnya isilah format isian yang ada.
4. Mengisi *Grup Code* yang telah dibagikan guru.
5. Selanjutnya klik “Sign Up”.
6. Pada bagian akhir akan tampak beranda “*home parents*”.

Implementasi Membaca Melalui Edmodo

Penggunaan *e-learning* berbasis edmodo sangat tepat dalam membangun minat baca siswa. Dalam implementasi penggunaan edmodo terhadap minat baca siswa **kelas VI Sekolah Dasar Negeri 89 Sipatana** terlihat antusias siswa dalam membaca sangat tinggi. Mereka menggunakan *smartphone* android masing-masing dalam membaca teks bacaan ataupun buku yang telah dibagikan melalui kelas maya. Penggunaan *smartphone* yang biasanya digunakan sebagian besar untuk *games*, sekarang diisi dengan membaca pada akun edmodo masing-masing siswa.



Gambar 1
Gambar Kegiatan Membaca Siswa di Kelas
dengan Menggunakan e-Learning Berbasis Edmodo

Menurut Sanjaya (2012, p. 207) membaca pada *e-learning* terdapat beberapa ciri- ciri diantaranya adalah:

1. Siswa tidak lagi memerlukan waktu maupun tempat khusus untuk belajar, akan tetapi siswa bisa belajar di mana dan kapan pun sesuai dengan kesempatan yang dimiliki olehnya secara individual.
2. Siswa memiliki akses pada buku teks dan sumber-sumber informasi yang bersifat digital, yang dapat diakses melalui dunia maya.
3. Guru dapat mengakses dan melakukan kontrol terhadap aktivitas membaca siswa secara online.
4. Siswa dapat berpartisipasi aktif karena membaca pada *digital class* memberikan lingkungan pembelajaran interaktif.

Dari penggunaan *e-learning* berbasis edmodo terlihat minat baca siswa, yang sangat antusias dalam kegiatan membaca. Setelah dilakukan wawancara pada siswa mereka sangat tertarik dengan penggunaan edmodo. Mereka dapat membuka teks bacaan kapan saja, di mana saja

melalui *smartphone* mereka masing-masing. Hal ini bertalian dengan pendapat Sanjaya (2012, p. 207). Siswa tidak lagi memerlukan waktu maupun tempat khusus untuk belajar, akan tetapi siswa bisa belajar dimana, kapan saja sesuai dengan kesempatan secara individual.

Penggunaan edmodo juga dapat berkontribusi positif pada proses kontrol orang tua dan wali murid terhadap anaknya. Sehingga orang tua mampu melihat aktivitas membaca anaknya melalui edmodo. Orang tua yang bergabung melalui grup yang dibuat oleh guru dapat memberikan saran dan tanggapannya terhadap minat serta aktivitas membaca anaknya. Dengan demikian, orang tua dapat dengan baik mengikuti proses belajar dan membaca anaknya pada kelas atau grup baca.

Simpulan

Membaca merupakan suatu aktivitas yang harus dimiliki dan dilakukan oleh setiap individu terutama bagi siswa. Karena membaca memiliki berbagai manfaat yang positif dalam rangka perkembangan proses belajar siswa. Membaca pula sangat mempengaruhi sikap dan perilaku siswa jika dilakukan dengan penuh kebermaknaan. Membaca tidak hanya memperbanyak pengetahuan saja melainkan mengambil makna dan pesan positif sehingga membentuk karakter itulah yang utama dari aktivitas

membaca. Minat baca siswa yang rendah dapat dibangun dengan salah satu solusi yakni penggunaan *e-learning* berbasis edmodo. Dengan menggunakan edmodo sebagai media dalam membaca siswa dapat memudahkan untuk melakukan kegiatan membaca karena membaca bisa dilakukan dimana dan kapan saja.

Edmodo memberikan fitur yang dapat menghubungkan antara guru, orang tua dan wali murid dan serta siswa itu sendiri. Sehingga kegiatan membaca dapat mendapatkan kontrol dari guru dan orang tua/wali. Pada akun edmodo juga memberikan nuansa interaktif dan kolaboratif di mana siswa dapat memberikan tanggapan dan pertanyaan serta guru memberikan umpan balik dari tanggapan dan pertanyaan siswa.

Oleh karena itu penggunaan *e-learning* berbasis edmodo dapat membantu membangun minat baca siswa. Kegiatan membaca yang berlangsung *online* dalam jaringan pada edmodo membuat ketertarikan siswa dalam melakukan aktivitas membaca dengan menggunakan *smartphone* masing-masing.

Semoga budaya baca anak-anak Indonesia terus dan semakin meningkat sehingga generasi penerus bangsa kita menjadi manusia-manusia yang cerdas, unggul dan bermartabat. Setiap guru haruslah terus berjuang untuk mencerdaskan siswa, dan teruslah memotivasi mereka untuk membangun budaya baca kapanpun dan dimanapun.

Daftar Pustaka

Abidin, Y. (2012). *Pembelajaran Membaca Berbasis Pendidikan Karakter*. Bandung: Refika Aditama.

Hasanah, M. Nurchasanah & Hamidah, S.C. (2011). *Membaca Ekstensif: Teori, Praktik Pembelajaran*. Malang: Pustaka.

Hippy, H. (2016). *Panduan Edmodo Bagi Guru*. Gorontalo: LPMP Gorontalo.

Kaiswaran, H. (2002). *Mengikat Makna*. Bandung: Kaifa.

Murtiyasa, B. (2012). *Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Informasi untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika*. Surakarta: FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Nu'man, A.Z. (2014). *Efektifitas Penerapan E-learning Edmodo untuk Pembelajaran Agama Islam Terhadap Hasil Belajar Siswa*. Artikel. Volume 7. Surakarta: STIMIK Surakarta.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015.

- Sandjaya, S. (2005). *Pengaruh Keterlibatan Orang Tua terhadap Minat Membaca Anak Ditinjau dari pendekatan Ster Lingkungan*. Online. Diakses dari <http://www.unika.ac.id/fakultas/psikologi/artikel/ss-lpdf>), pada 3 Oktober 2016.
- Sanjaya, W. (2012). *Media Komunikasi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, A. (2012). *The Art of Reading*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Tarigan, H.G. (2008). *Membaca Sebagai Keterampilan Berbahasa*. Bandung: Angkasa.
- Zusnani, I. (2013). *Pendidikan Kepribadian Siswa SD dan SMP*. Yogyakarta: Platinum.

MODEL PEMBELAJARAN AKTIF TIPE *TEAM QUIZ*

Meylan Saleh

Dosen Jurusan PGSD FIP UNG
meylan.saleh@ung.ac.id

Pendahuluan

Demi mencapai aspek pokok pembelajaran IPA secara optimal diharapkan pembelajaran IPA di sekolah dasar memberikan kesempatan yang besar untuk mengembangkan potensi siswa, khususnya pada aspek kognitif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, mengembangkan kemampuan berpikir siswa serta mengarahkan siswa untuk dapat membuat suatu kesimpulan dan deduksi pengetahuan yang bersifat empiris dan faktual. Kegiatan pembelajaran IPA dapat dilakukan di laboratorium, kelas, lingkungan sekolah dengan ditunjang oleh alat bantu pembelajaran berupa alat peraga serta media pembelajaran. Sehingga dapat membuat siswa menikmati proses pembelajaran yang berhadapan dengan fenomena dan realita yang dipelajari.

Pada kenyataannya, model pembelajaran yang diterapkan guru masih bersifat konvensional dan kurang menarik perhatian siswa. Padahal model pembelajaran merupakan hal penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran lebih dominan kepada guru sehingga siswa mudah bosan dan lebih memilih berbicara dengan teman sebangkunya. Hal ini menjadikan keadaan kelas semakin kurang kondusif. Kurangnya penggunaan model pembelajaran yang inovatif berdampak pula pada kurang optimalnya hasil belajar siswa. Oleh karena itu, seorang guru seharusnya berupaya agar mampu menjadi manajer yang handal dalam mengatur dan membuat model pembelajaran di dalam kelas guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan hasil belajar IPA di sekolah dasar. Sehingga dapat melahirkan manusia yang berkualitas sebagai pembangun suatu bangsa.



Upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk dapat memaksimalkan hasil belajar IPA yaitu dengan mengenal, mempelajari dan menerapkan model pembelajaran aktif tipe *Team Quiz*. Menurut Sidik (2008, p. 21) tipe *Team Quiz* merupakan model pembelajaran aktif yang dikembangkan oleh Mel Sibermen, yang mana dalam *Team Quiz* ini peserta dibagi menjadi tiga tim. Model pembelajaran tipe *Team Quiz* merupakan model pembelajaran dengan sistem pembagian kelompok belajar di mana materi ajar dibagi sesuai dengan kelompok belajar sehingga kelompok belajar akan mendapat kesempatan sebagai kelompok penanya maupun penjawab. Dengan menerapkan model *Team Quiz* siswa dituntut untuk bersama-sama mempelajari materi, saling memberi arahan, saling memberi pertanyaan dan jawaban untuk memahami materi tersebut. Sehingga dengan hal tersebut siswa akan senantiasa berusaha belajar dengan motivasi yang besar agar dapat memperoleh nilai yang tinggi.

Hasil Belajar

Istilah belajar merupakan hasil penguasaan ilmu pengetahuan yang diungkapkan dalam bentuk perubahan perilaku yang menyangkut yang harus dicapai oleh siswa selama belajar di sekolah aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Menurut Purwanto (2010, p. 54) belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku yang mengarah dalam hal yang lebih baik.

Selanjutnya dikemukakan bahwa hasil belajar merupakan prestasi yang dicapai setelah siswa menyelesaikan sejumlah materi pelajaran (Sinar, 2018, p. 20). Hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa baik perubahan tingkah laku maupun skor atau prestasi belajar yang tinggi berkat adanya usaha dan pikiran, yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk penguasaan materi dan kecakapan dasar dalam proses pembelajaran, (Ningrum, 2015, p. 98). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang lebih baik meliputi kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik melalui pelatihan dan pengalaman.

Purwanto (2010, p. 106) menyebutkan bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:



1. Faktor dari luar

- 1) Faktor lingkungan, baik lingkungan alam maupun sosial.
- 2) Faktor instrumental, berkaitan dengan kurikulum atau bahan ajar, guru sebagai pengajar, sarana dan fasilitas yang tersedia, administrasi dan manajemen.

2. Faktor dari dalam

- 1) Faktor fisiologi, berkaitan dengan bagaimana kondisi fisik, panca indera, dan sebagainya.
- 2) Faktor psikologi, seperti minat, tingkat kecerdasan, bakat, motivasi, kemampuan kognitif, dan sebagainya.

Hasil Belajar IPA di Sekolah Dasar

Benjamin S. Bloom (Sudjana, 2010, p. 22) mengatakan bahwa hasil belajar ialah perubahan tingkah laku yang dibagi menjadi tiga ranah sebagai berikut.

1. Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.
2. Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari penerimaan jawaban atau reaksi dan penilaian.
3. Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil belajar siswa di sekolah dasar tak lepas dari tiga unsur utama hakikat IPA, yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai sikap yang dapat mendorong perubahan tingkah laku siswa dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotorik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hasil belajar yang dilihat pada penelitian ini adalah hasil belajar pada ranah kognitif siswa.

Model Pembelajaran

Menurut Arends model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas (Darmadi, 2017, p. 42). Model pembelajaran



mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pengajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Selanjutnya, model pembelajaran menurut Supriyono (Kusnadi, 2018, p.2) adalah sebuah rencana atau pola yang mengorganisasi pembelajaran di dalam kelas dan menunjukkan cara penggunaan materi pembelajaran.

Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman yang di dalamnya terdapat tahap-tahap kegiatan pembelajaran yang memiliki tujuan dan berfungsi untuk memudahkan guru dalam mengelola kelas serta lingkungan kelas dalam melaksanakan pembelajaran. Model pembelajaran membungkus seluruh aspek dalam kegiatan pembelajaran.

Model Pembelajaran Aktif (*Active Learning*)

Belajar aktif (*active learning*) merupakan pembelajaran yang mengarahkan kepada pengoptimalisasian pelibatan intelektual-emosional siswa dalam proses pembelajaran (Dimiyati & Mujiyono, 2010, p. 115). Silberman mengemukakan bahwa untuk belajar secara aktif siswa harus menggunakan semua alat indera, mulai dari telinga, mata, sekaligus pikiran untuk dapat mengolah informasi yang diperolehnya dan ditambah dengan mengerjakan sesuatu (Kasinyo dan Abdurrahman, 2009, p. 225). Ketika belajar secara pasif, peserta didik mengalami proses tanpa rasa ingin tahu, tanpa pertanyaan dan tanpa daya tarik pada hasil. Untuk membedakan pembelajaran pasif dan aktif, berikut adalah ciri-ciri pembelajaran aktif (Silberman, 2012).

1. Pengetahuan dialami, dipelajari, dan ditemukan oleh siswa.
2. Belajar dengan teman.
3. Siswa melakukan sesuatu untuk memahami materi pembelajaran.
4. Siswa membutuhkan informasi untuk memecahkan masalah.
5. Siswa mengkomunikasikan sendiri hasil pemikirannya.

Model Pembelajaran Aktif Tipe *Team Quiz*

Menurut Suprijono hakikat model pembelajaran aktif (*active learning*) tipe *team quiz* adalah untuk mengarahkan atensi peserta didik terhadap materi yang dipelajari oleh peserta didik (Kusmawati, 2017,



p. 28). Pada penerapan model pembelajaran aktif tipe *team quiz* ini, perlu diketahui bahwa siswa mempunyai kreativitas yang berbeda-beda dalam belajar dan mencari jawaban sekaligus mengutarakan pendapat. Kreativitas tersebut dapat diukur, sehingga semakin tinggi kreativitas siswa diprediksi akan memberikan hasil belajar yang semakin baik dalam implementasi model pembelajaran aktif tipe *team quiz*.

Ada 8 langkah yang harus dilakukan dalam model pembelajaran aktif tipe *team quiz*, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut (Silberman, 2012, p. 175).

1. Pilihlah topik yang bisa disajikan dalam tiga segmen.
2. Bagilah siswa menjadi tiga tim.
3. Jelaskan format pelajaran dan mulailah penyajian materi.
4. Perintahkan tim A untuk menyiapkan kuis jawaban singkat. Kuis tersebut harus sudah siap dalam 5 menit. Tim B dan C menggunakan waktunya untuk memeriksa catatan mereka.
5. Tim A memberikan kuis kepada anggota tim B. Jika tim B tidak dapat menjawab kuis maka tim C yang akan menjawab kuis tersebut.
6. Tim A mengarahkan pertanyaan berikutnya kepada tim C, dan mengulang proses tersebut.
7. Ketika kuisnya selesai, lanjutkan dengan segmen kedua dari pelajaran anda dan tunjukkan tim B sebagai pemandu kuis.
8. Setelah tim B menyelesaikan kuisnya, lanjutkan dengan segmen ketiga dari pelajaran anda, dan tunjukkan tim C sebagai pemandu kuis.
9. Kesimpulan.

Dari uraian mengenai langkah-langkah model pembelajaran aktif tipe *team quiz* di atas, dapat diketahui bahwa model tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai berikut. Kelebihannya adalah model ini: (1) Berpusat pada siswa; (2) penekanannya pada menemukan pengetahuan; (3) sangat menyenangkan; dan (4) dapat memberdayakan semua potensi dan indra siswa. Adapun kelemahannya adalah: (1) peserta didik kesulitan dalam mengutarakan pemikirannya, ketika tidak didampingi oleh guru; dan (2) membutuhkan waktu yang panjang untuk mengembangkan kesadaran berkelompok (Silberman, 2012, p. 10).



Untuk mengatasi kelemahan di atas, sebaiknya guru mendampingi peserta didik dalam mengutarakan pendapat mereka. Selain itu guru juga perlu memberi batasan waktu kepada masing-masing kelompok untuk kembali ke kelompok mereka masing-masing.

Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar

Struktur kognitif anak tidak dapat dibandingkan dengan struktur kognitif ilmunan. Anak perlu dilatih dan diberi kesempatan untuk mendapatkan keterampilan, dapat berpikir dan bertindak secara ilmiah. Adapun IPA untuk anak sekolah dasar didefinisikan oleh Paolo dan Marten yaitu sebagai berikut: mengamati apa yang terjadi, mencoba apa yang diamati, mempergunakan pengetahuan baru untuk meramalkan apa yang terjadi, menguji bahwa ramalan-ramalan itu benar (Samatowa, 2010).

Sulistiyorini mengatakan bahwa pembelajaran IPA harus melibatkan keaktifan siswa secara penuh (*active learning*) dengan cara merealisasikan pembelajaran yang mampu memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan keterampilan proses meliputi: mencari, menemukan, menyimpulkan, mengkomunikasikan sendiri sebagai pengetahuan, nilai-nilai dan pengalaman yang dibutuhkan (Hisbullah dan Selvi, 2018, p.13).

Daftar Pustaka

- Darmadi. (2017). *Pengembangan Model Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar Siswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dimiyati, & Mujiyono. (2010). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hisbullah, & Selvi, N. (2018). *Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar*. Makassar: Aksara Timur.
- Kusnadi. (2018). *Metode Pembelajaran Kolaboratif*. Tasikmalaya: Edu Publisher.



- Kusumawati, N. (2017). Penerapan Metode Active Learning Tipe Team Quiz Untuk Meningkatkan Keaktifan Bertanya Dan Kreatifitas Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa Kelas V SDN Ronowijayan. *e-Journal Bidang Pendidikan Dasar Universitas PGRI Madiun Jurusan Prodi PGSD*, 1(2) diakses pada 9 Desember 2018.
- Ningrum. (2015). Pengaruh Penerapan Model Active Learning Tipe Team Quiz Terhadap Hasil Belajar Kewirausahaan Siswa Kelas X Semester Genap SMK Kartikatama Metro Tahun Pelajaran 2014/2015. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro*, 3(1).
- Purwanto, N. (2011). *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samatowa, U. (2010). *Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar*. Jakarta: Indeks.
- Silberman, M. L. (2012). *Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif*. Bandung: Nuansa.
- Sinar. (2018). *Metode Aktive Learning*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sudjana, N. (2010). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.





PERGURUAN TINGGI: NASIBMU KINI?

Elita Rahmi

Staf Pengajar Fakultas Hukum Unja

Email: elitarahmi79@yahoo.co.id

Lama dada ini menyesak, melihat “tontonan sexy” akademisi yang konon katanya berasal dari universitas ternama di negeri ini, kini menjadi penoda negara, pemangku pendidikan negeri yang jauh dari tujuan negara yakni perdamaian, keadilan dan keberpihakan kepada bangsanya sendiri, sebagai wujud kesadaran spiritual karena anak dan keluarganya telah disejahterakan negara lewat gaji dan penghasilan yang didapatnya sejak kuliah S-1, S-2, bahkan S-3 di dalam maupun di luar negeri! Paling tidak dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa telah sangat menikmati pembangunan yang berlangsung sejak kemerdekaan bangsa. Selayaknya perguruan tinggi menjadi garda terdepan dalam pembelaan negara untuk terus mengibarkan panji-panji generasi yang cinta damai dan cinta bangsanya sehingga tidak paradoks dengan visi *world class university*, yang sekarang tengah menjadi tren.

Tulisan kegelisahan Sulistyowati Irianto dalam opininya yang bertajuk “Matinya Universitas”, telah digoresnya sejak tahun 2017. Tulisan tersebut berisi tentang potret universitas negeri yang dilakukan di dalam maupun di luar kampus oleh sebagian dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang menodai marwah universitas, universitas yang jauh dari konstitusi dan roh kebangsaan, bertutur secara terbuka via media sosia. Semua hal tersebut telah mencederai peran universitas sebagai salah satu lembaga yang harus berada di barisan terdepan dalam menjunjung gerakan moral kebangsaan Indonesia.

Perguruan Tinggi, Kau Mau Kemana?

Betapa miris atmosfer kehidupan kampus, ketika para akademisi memberikan seruan atas nama agama, atas nama jihad, atas nama



kejujuran dan atas nama kebenaran untuk memporak-porandakan bangsanya sendiri, melalui kata-kata kasar, sikap tidak hormat pada pemangku negeri dan berbicara semaunya. Tidak ditemui lagi kata santun untuk mengungkap hati dan perasaan. Masihkah mereka akademisi yang menjunjung tinggi moral dan etika, yang secara normatif tercantum dalam Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Ada apa semua ini?

Mengapa Kau Menjadi Kasar Wahai Perguruan Tinggi?

Masihkah kau menjadi soko guru kehebatan bangsamu wahai Perguruan Tinggi? Bukankah Perguruan Tinggi adalah tolok ukur kecerdasan bangsa dalam ber hukum dan beretika? Kepada siapa lagi alam akan bertanya bila sebagian isi perguruan tinggi telah divibrasi negatif sejak dari alam pikir hingga tindakan nyata bahkan terang-terangan mempertontonkan nafsu sendiri tanpa perasaan? Semakin jelas karut-marut kehidupan kampus yang gagal dalam menggairahkan lembaga pendidikan dan keilmuan, sebagai tempat berguru *plus* cetak biru peradaban bangsa dan Negara Indonesia tercinta yang telah diperjuangkan *the founding fathers* dengan tetesan darah dan air mata.

Dapatkah negeri ini memetik pelajaran dari perayaan hari pendidikan 2 Mei di tahun 2019 ini? Hari yang dikenal sebagai hari pendidikan nasional (Hardiknas) bersamaan dengan hari ulang tahun Ki Hajar Dewantara (lahir 2 Mei 1889), sosok Pahlawan Nasional sekaligus bapak pendidikan bagi bangsa Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1959. Dalam hidupnya, beliau juga merupakan pendiri lembaga pendidikan Taman Siswa di Indonesia. Menangis tiada henti Ki Hajar Dewantara dalam peristirahatan, karena ulah yang tiada arti?

Sementara sisi lain, sebagian mahasiswa, dosen, diam dan menonton adegan demi adegan dengan pasif. Apakah diam berarti ikut serta? Atau diam karena telah bosan, dan boros energi, karena gagal paham akan perjuangan Ki Hajar Dewantara? Perjuangan pendiri bangsa yang sangat toleran dengan perbedaan, keragaman dan keindonesiaan, sehingga dijadikannya Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya sebagai lambang Negara tetapi juga sebagai asas hukum dalam sistem hukum di

Indonesia. Bukankah mengingkari perbedaan adalah mengingkari fakta dan realita bangsa Indonesia?

Apakah Indonesia telah darurat kebhinnekaan, darurat keagamaan, dan darurat kemajemukan? Sehingga semua tindakan lembaga-lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang harus diporak-porandakan dengan keinginan, nafsu sepihak atas nama kepentingan tertentu. Betapa sedih dan pilunya hati Ki Hadjar Dewantara dalam peringatan hari pendidikan menyongsong I (satu) abad Indonesia merdeka tahun 2045 mendatang.

Bagaimana mahasiswa akan berinovasi, apabila penoda marwah perguruan tinggi hanya asyik dengan caci maki, fitnah dan “*memercik didulang terpercik muka sendiri*”, alias, justru menjelek-jelekkan negerinya sendiri. Apa yang bisa diharapkan dari pencaci maki yang hanya akan menjauhkan perguruan tinggi dari peradaban dunia?

Perjuangan pendiri bangsa telah menjadikan para penoda perguruan tinggi tak ubahkan sebagai pecundang. Bukankah menjadi dosen adalah Rahmat Allah yang luar biasa, harus disyukuri, dibanggakan dan dicintai? Sehingga pekerjaan menjadi guru adalah yang sangat menyenangkan, membanggakan dan membahagiakan kehidupan keluarga. Bukankah hampir setiap kita ke luar kota bertemu dengan anak-anak didik yang sukses dan hormat pada gurunya? Tapi bila gurunya telah menjadi garang, pada akhirnya pekerjaan ini menjadi cerita panjang tentang suka duka untuk revolusi pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan moral dan etika akademik.

Perguruan Tinggi yang Kalah Etika

Belajar dari film *The Social Network*, Mark Zuckerberg (dibintangi Jesse Eisenberg), suatu film yang bercerita tentang tentang kasus kepemilikan *Facebook* dan sejarah penciptaan *Facebook*. Mark dinilai melanggar etika, karena telah menciptakan *Facemash* yakni suatu jejaring yang mengambil foto anggota asrama di Harvard University, sehingga dinilai melanggar privasi dan dapat dikeluarkan alias DO. Hanya mengambil foto wajah perbuatan Mark dipandang mahasiswa **tidak beretika**.



Lain halnya dengan Perguruan Tinggi kita, yang secara sengaja merongrong marwah perguruan tinggi, malah tidak merasa bersalah dan dengan sengaja berteriak seraya berpolitik praktis sektarian di Perguruan Tingginya sendiri, tempat anak dan keluarganya dibiayai oleh Negara. Apakah ini bertanda otonomi perguruan tinggi telah salah kaprah? Sementara Mark dalam cerita film di atas, yang hanya mengambil foto wajah hanya sekedar untuk memilih perempuan cantik dan kurang cantik sudah dipandang sebagai suatu perbuatan amoral. Lain halnya dengan kita, sebagian dosen dan mahasiswa tidak hanya melanggar hukum tetapi jauh dari itu telah melanggar moral Perguruan Tinggi.

Perguruan tinggi sebagai mesin cetak sumber daya manusia generasi mendatang, mesin mencari solusi, generator dan bahkan katalisator percepatan pembangunan, kini justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Perguruan tinggi kronis.

Kritik keras kepada kampus masa lalu karena tampilan yang eksklusif dan introvert, menjadikan kampus masa lalu sangat populer dengan istilah kampus sebagai menara gading. Kini istilahnya menjadi lebih kejam lagi, yakni “menara virus” yang seketika dapat mencekam lingkungan dan alam di sekitarnya. Bahkan memporak-porandakan peradaban itu sendiri.

Saatnya Negara Bertindak Tegas

Virus kematian perguruan tinggi, akan terus merongrong kehidupan kampus. Untuk itu, sudah saatnya Negara bertindak tegas untuk memberikan sanksi hukum diberhentikan atau diturunkan kewenangannya, sehingga fungsinya sebagai generator pembangunan dapat teratasi. Tindak tegas setiap dosen dan mahasiswa bahkan tenaga kependidikan yang berencana merongrong kedaulatan bangsa yang oleh UUD 1945 harus diwujudkan dengan cinta Indonesia, cinta merah putih dan cinta Bhinneka Tunggal Ika, yang senantiasa menjadi arah dalam setiap kebijakan pembangunan.

Ketegasan Negara yang dimaksud adalah tidak memberi tempat sedikit pun terhadap virus kampus yang terus berkembang, baik

kuantitas maupun kualitasnya, sebelum kampus di Indonesia naik ranking menjadi mati mendadak, sehingga menghambat pencapaian kampus dalam melahirkan intelektual masa depan. Tujuan Negara Indonesia hanya dapat terwujud bila kita serius menjalankan konstitusi yang ada yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai guru biasa, kenangan yang tak terlupakan menjadi guru adalah ketika mendapat gelar **Guru Man Jadda Wa Jadda** oleh para mahasiswa yang pernah belajar di kelas saya. Mengapa? Karena pembukaan dan penutup kuliah selalu melantunkan kalimat yang dapat diartikan dengan sungguh-sungguh. Ternyata habis berucap *Man Jadda Wa Jadda* menjadi kenikmatan sendiri bagi mahasiswa untuk *brainwashing* yang ternyata ampuh untuk mengubah pola pikir dan perilaku seseorang.

Era digital, sesungguhnya lebih mempermudah kita memberikan perkuliahan, karena dengan menetapkan kelompok dan membuat group WA per kelas menjadikan setiap sub bab, serta membuat video, dan mengupload kuliah melalui video tersebut dan kelompok lain wajib bertanya dan menjawab, sehingga interaksi bisa terjadi selama 24 jam. Inilah yang saya artikan revolusi pendidikan Indonesia, sehingga era digital bagi saya sangat membantu proses belajar mengajar menjadi menyenangkan 24 jam, via group WA.

Betapa padatnya waktu untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga dapat dipastikan dosen dan mahasiswa, kalau benar menjalankan tugas dan kewajibannya, tidak memiliki waktu untuk dapat berpropaganda dengan sesama warga Negara. Sehingga dapat diartikan seseorang yang melancarkan hasutan adalah dosen yang mengkhianati profesinya, mahasiswa yang menjadi virus akademik, sehingga harus diberikan tindakan tegas. Bertindaklah Negara demi menjaga marwah perguruan tinggi yang dinanti. Ratusan ribu anak negeri yang berharap besar pada generasi mendatang. Salam HARKITNAS 2019. Saatnya Negara tegas. Bukankah Perguruan Tinggi adalah eksekutif pendidikan? Menyelamatkan perguruan tinggi adalah amanah konstitusi.

